

ANALISA

1987 – 1

Ketahanan Nasional dalam Perubahan Dunia

Perkembangan Situasi Dunia dan Ketahanan
Nasional Kita di Dalamnya

Pasal 32 UUD 1945:
Makna dan Dinamikanya

Cita-cita Politik untuk Pembangunan Nasional
Jangka Panjang Tahap II

Kebudayaan Indonesia di Masa Mendatang

Suatu Visi mengenai Tata Masyarakat

Perang dan Negara Kesejahteraan di Inggris



ANALISA

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai terbitan berkala yang menyajikan analisa-analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh Staf CSIS. Tetapi ANALISA juga menerima tulisan-tulisan dari luar CSIS dan menyediakan honoraria bagi karangan-karangan yang dimuat. Tulisan-tulisan dalam ANALISA tidak selalu mencerminkan pandangan CSIS.

*Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab*

Pande Radja SILALAH

Dewan Redaksi

Daoed JOESOEF
Rufinus LAHUR
A.M.W. PRANARKA
M. Hadi SOESASTRO
Harry TJAN SILALAH
Jusuf WANANDI
Clara JOEWONO
Kirdi DIPOYUDO
Djisman S. SIMANDJUNTAK
J. Soedjati DJIWANDONO

Redaksi Pelaksana

Pande Radja SILALAH
Medelina KUSHARWANTI
S. TJOKROWARDOJO
Ronald NANGOI

STT

SK Menpen RI No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978,
tanggal 28 Agustus 1978

ISSN

0126-222X

Tata Usaha

Harga Rp 1.000,00 per eksemplar; langganan setahun (12 nomor, sudah termasuk ongkos kirim) Rp 12.000,00. Pesanan ke Biro Pemasaran CSIS.

Alamat

Jalan Tanah Abang 111/27, Jakarta 10160,
Telepon 356532, 356533, 356534, 356535

Daftar Isi

SAHUN XVI, NO. 1, JANUARI 1987

Pengantar Redaksi	2
Perkembangan Situasi Dunia dan Ketahanan Nasional Kita di Dalamnya <i>L.B. MOERDANI</i>	4
Pasal 32 UUD 1945: Makna dan Dinamikanya <i>A.M.W. PRANARKA</i>	19
Cita-cita Politik untuk Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahap II <i>Soepardjo RUSTAM</i>	43
Kebudayaan Indonesia di Masa Mendatang <i>Haryati SOEBADIO</i>	56
Suatu Visi Baru mengenai Tata Masyarakat <i>Hugh KAY (disadur oleh Kirdi DIPOYUDO)</i>	70
Perang dan Negara Kesejahteraan di Inggris <i>T.H. MARSHALL (disadur oleh Kirdi DIPOYUDO)</i>	78

Pengantar Redaksi

Masalah dasar dari tatanan dunia dewasa ini terletak pada bentuk rivalitas dan konflik antara Blok Barat dan Blok Timur yang dilatarbelakangi oleh pertentangan ideologi dan wawasan nasional masing-masing. Pertentangan tersebut memiliki dimensi global, karena dampaknya secara langsung atau tidak mengenai negara-negara lain, di luar kelompok tersebut. Bahkan masalah yang dipertentangkan pun meluas ke bidang ekonomi, sosial maupun budaya.

Indonesia sebagai bagian dari sistem internasional tidak luput dari pengaruh-pengaruh yang timbul sebagai akibat dari adanya perkembangan tersebut. Padahal bentuk kehidupan masyarakat pada hakikatnya didasarkan pada perpaduan antara keadaan lingkungan serta bagaimana masyarakat itu mengembangkan diri. Secara demikian cara menilai serta menghadapi lingkungan internasional akan mempengaruhi wawasan nasional bangsa Indonesia dalam membentuk lingkungan strategisnya. Ini berarti bahwa usaha-usaha pembangunan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan yang diarahkan untuk mewujudkan ketahanan nasional secara menyeluruh tidak cukup jika hanya didasarkan pada pertimbangan faktor-faktor intern, namun perlu dikaitkan dengan kondisi sistem internasional dengan segala kompleksitasnya. Di atas semuanya, tolok ukur maupun kerangka acuan yang dipakai dalam pengembangan subyek-subyek ketahanan nasional, tidak bisa lain dari Pancasila.

ANALISA nomor pertama tahun ini menyajikan tema KETAHANAN NASIONAL DALAM PERUBAHAN DUNIA dengan menurunkan enam buah tulisan dengan pembahasan khusus tentang strategi-strategi yang diterapkan ke dalam bidang-bidang pembangunan yang diharapkan dapat menjadikan bangsa Indonesia mampu bertahan dan berkembang di dalam segala situasi dan kemungkinan yang dihadapi baik di masa kini maupun di masa yang mendatang.

Tulisan pertama berjudul "Perkembangan Situasi Dunia dan Ketahanan Nasional Kita di Dalamnya," oleh L.B. MOERDANI. Selain membahas wawasan nasional bangsa Indonesia serta konsep Ketahanan Nasional yang dipakai di tengah kompleksitas hubungan internasional, mengulas pula sumbangan ABRI di dalam mendukung terwujudnya Ketahanan Nasional.

Fungsi pembangunan kebudayaan adalah memberikan wawasan-wawasan mendasar yang melandasi segala pertumbuhan kemajuan di berbagai sektor kehidupan bersama. Melalui tulisan yang berjudul "Pasal 32 UUD 1945: Makna dan Dinamikanya," A.M.W. PRANARKA menggali kembali ajaran-ajaran Ki Hadjar Dewantara yang ternyata memiliki kesejajaran pandang dengan wawasan-wawasan yang menjiwai Pasal 32. Selain hal tersebut penulis juga menekankan perlunya mengembangkan seluruh wawasan yang diamanatkan oleh Pasal 32 secara kreatif dan obyektif dalam menghadapi tantangan akulturasi ke-4.

Pengalaman sejarah percaturan politik Indonesia menunjukkan bahwa problema ideologi merupakan masalah sentral yang selalu muncul, dan kerawanan dalam bidang ini pada gilirannya akan berdampak langsung terhadap sistem pertahanan secara keseluruhan. Prestasi politik yang ditunjukkan pemerintah Orde Baru selain melakukan langkah-langkah pengamanan ideologis juga membentuk "design" politik nasional untuk mengadakan penataan kehidupan bangsa dan negara yang sifatnya mendasar. Semua itu dibahas oleh Soepardjo RUSTAM dalam tulisannya yang berjudul "Cita-cita Politik untuk Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahap II." Di dalam tulisan ini juga diproyeksikan perjalanan bangsa Indonesia di masa datang dalam perspektif kenusantaraan.

Tantangan pengembangan kebudayaan Indonesia di masa depan adalah upaya-upaya meningkatkan kesatuan dengan tetap memelihara keanekaragaman kultural. Selain hal di atas, tulisan Haryati SOEBADIO yang berjudul "Kebudayaan Indonesia di Masa Mendatang," mengulas bahwa hubungan terbuka kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan lainnya dimaksudkan untuk semakin memperkaya dan mengembangkan kebudayaan nasional serta agar kebudayaan Indonesia dapat berperan dalam membentuk peradaban dunia.

Dua tulisan berikutnya berupa saduran oleh Kirdi DIPOYUDO. Yang pertama berjudul "Suatu Visi Baru mengenai Tata Masyarakat" yang membahas pengertian milik perseorangan dan pengertian kerja dalam etika Kristen. Di dalamnya diajukan konsep-konsep untuk menyamakan keadilan dan perdamaian lewat perubahan dan lewat sistem teologi pembebasan. Tulisan terakhir, berjudul "Perang dan Negara Kesejahteraan di Inggris," membahas gagasan dan konsep kesejahteraan, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai cermin atau bahan perbandingan dan usaha mensejahterakan bangsa.

Perkembangan Situasi Dunia dan Ketahanan Nasional Kita di Dalamnya*

L.B. MOERDANI

PENDAHULUAN

Perkembangan situasi dunia hingga saat ini dan kecenderungannya di dalam satu atau dua dekade mendatang, akan tetap diwarnai oleh benturan antara berbagai kepentingan nasional berbagai bangsa, yang didasarkan pada kepentingan ideologi dan wawasan nasionalnya.

Apabila ideologi mempunyai fungsi meletakkan landasan berpijak bagi setiap bangsa di dalam meletakkan tata-nilai kehidupannya, maka fungsi wawasan nasional setiap bangsa condong dimaksudkan sebagai konsep untuk mengusahakan agar bangsa yang bersangkutan dapat tetap hidup dan mengembangkan kehidupannya. Di dalam kerangka upaya inilah masalah sumber daya yang tersebar tidak merata di antara berbagai bangsa telah menciptakan berbagai bentuk wawasan di dalam sejarah umat manusia.

Penjajahan yang berabad-abad terhadap bangsa-bangsa di Afrika dan di Asia dan mencapai puncaknya pada Perang Dunia II, pertama-tama adalah karena dorongan keinginan bangsa-bangsa yang lebih kuat untuk merampas sumber daya yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain yang masih lemah.

Perebutan sumber daya dalam wujud peperangan-peperangan, setelah berakhirnya Perang Dunia II mempunyai bentuk-bentuk yang tampak lunak, namun tetap keras dan kejam di dalam hakikinya. Ciri-ciri semacam inilah yang menyebabkan upaya-upaya untuk mewujudkan Tata Ekonomi Internasional Baru, melalui Dialog Utara-Selatan, tidak pernah memberikan sesuatu hasil.

*Amanat Panglima Angkatan Bersenjata RI pada Sarasehan Tamansiswa, 10 November 1986.

Salah satu kristalisasi dari perwujudan pertentangan dengan motif ideologi dan wawasan tersebut yang menonjol adalah rivalitas dan konflik antara Blok Barat dan Blok Timur, yang berkembang sejak setelah berakhirnya Perang Dunia II. Pertentangan tersebut memperoleh dimensi global karena negara-negara yang terlibat di dalamnya adalah negara-negara besar dan mempunyai pengaruh luas di dalam berbagai aspek di dalam hubungan antarbangsa. Pertentangan antara Blok Barat dan Blok Timur juga mempunyai dimensi global, karena banyak konflik-konflik lokal yang terjadi di berbagai kawasan, menunjukkan mempunyai kaitan dan merupakan akibat pula dari pertentangan antara Blok Barat dan Blok Timur tersebut.

Dewasa ini meskipun peredaan ketegangan di dalam pertentangan antara Blok Barat dan Blok Timur telah terjadi, namun seperti telah disinggung di muka, berbagai konflik yang terjadi di berbagai kawasan dunia tetap tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh pertentangan antara kedua blok tersebut. Di dalam hubungan ini, gejolak-gejolak massa di Eropa Barat, ketegangan dan terorisme di Amerika Latin, di Afrika dan Timur Tengah, di Teluk Parsi, di Kampuchea dan di beberapa tempat di Pasifik Selatan dan Pasifik Timur Laut (khususnya Korea), jelas mengandung ciri-ciri kepentingan ideologi dan adanya pengaruh dari wawasan-wawasan yang hidup di kalangan berbagai bangsa selama ini.

Menyadari kecenderungan akan terus berkembangnya konflik semacam itu mudah difahami pula, bahwa perlombaan membangun kemampuan dan kekuatan militer, baik kemampuan dan kekuatan konvensional maupun apabila mungkin, kemampuan dan kekuatan nuklir, terus diupayakan oleh negara-negara yang terlibat di dalamnya.

Menghadapi kenyataan-kenyataan semacam itu bangsa Indonesia harus mampu dan kuat untuk menghadapi akibat-akibat negatif yang mungkin timbul dari situasi yang terjadi. Dari segi ideologi bangsa Indonesia harus mampu menghadapi setiap godaan apapun, yang datang dari semua faham lain yang berusaha menyusup ke dalam tubuh bangsa Indonesia. Demikian pula dari segi politik dan segi-segi kehidupan lainnya, bangsa Indonesia harus dapat membangun ketahanan nasionalnya, sehingga akibat-akibat negatif dari berbagai wawasan bangsa lain akan dapat dinetralisasi. Untuk itu konsep bangsa Indonesia menghadapi situasi semacam itu bukan hanya dengan membangun kemampuan dan kekuatan militernya saja, tetapi membangun ketahanan nasionalnya.

Sesuai dengan uraian di atas, penyajian tulisan ini akan mencakup ruang lingkup sebagai berikut:

1. Faktor-faktor dominan dalam perkembangan dunia;

2. Trend perkembangan situasi internasional;
3. Kepentingan nasional bangsa Indonesia;
4. Peranan ABRI dalam upaya mewujudkan ketahanan nasional.

FAKTOR-FAKTOR DOMINAN DALAM PERKEMBANGAN DUNIA

Faktor Ideologi

Sebagaimana telah disinggung di dalam pengantar penyajian tulisan ini, maka ideologi merupakan salah satu faktor yang pertama-tama mewarnai perkembangan dunia selama ini. Kita mencatat, bahwa faham-faham "nasional-sosialisme" dan "ultra-nasionalis" merupakan sumber-sumber bagi terjadinya Perang Dunia II pada waktu itu. Meskipun manusia semakin rasional, namun ideologi sebagai hasil dari falsafah condong tetap menentukan perwujudan tingkah-laku manusia di dunia ini.

Komunisme sebagai penjabaran dari falsafah Karl Marx dan ajaran Lenin sejak kelahirannya memang didisain (dirancang) untuk mengubah masyarakat yang dikuasai oleh faham liberalisme yang muncul terlebih dahulu di Eropa, melalui revolusi.

Faham liberalisme yang lahir sebelum faham komunis ditandai oleh berkembangnya industri di Eropa pada pertengahan Abad ke-19 yang telah melahirkan sistem ekonomi yang dewasa ini dikenal sebagai sistem kapitalisme. Praktek dari sistem tersebut pada saat itu digambarkan sangat memprihatinkan, di mana pemilik modal menguasai kehidupan ekonomi dan membayar upah buruh sangat rendah. Digambarkan pula kaum buruh yang terdiri dari orang tua dan anak-anak di samping bekerja dengan gaji yang rendah di pabrik-pabrik dan tambang batu-bara juga mereka bekerja tanpa jaminan sosial apapun.

Situasi inilah yang mendorong Karl Marx menyusun teorinya tentang perubahan kelas melalui suatu revolusi sebagai suatu langkah yang harus dilakukan. Faham yang dicetuskan oleh Karl Marx berhasil dijabarkan oleh Lenin menjadi ideologi komunis dan sebagai kekuatan politik pada tahun 1917.

Letak daya tarik faham komunis bagi bangsa-bangsa yang baru merdeka jelas karena latar-belakang lahirnya faham komunis itu sendiri. Memang banyak bangsa-bangsa setelah menganut faham itu menjadi sadar bahwa banyak hal yang diwajibkan oleh ajaran komunis ternyata tidak cocok dengan kepribadiannya. Namun pada umumnya bangsa tersebut tidak mungkin lagi

melepaskan diri dari kekuasaan partai komunis yang sudah terlanjur menguasai semua aspek kehidupannya.

Hal-hal inilah yang menyebabkan ideologi komunis menjadi permasalahan yang sangat menonjol sejak berakhirnya Perang Dunia II. Ancaman ideologi komunis tersebut akhirnya menjelma menjadi pertentangan antarbangsa, karena ideologi komunis yang telah berkembang menjadi kekuatan-kekuatan politik yang besar setelah berakhirnya Perang Dunia II jelas-jelas mengarahkan pandangannya ke lingkungan-lingkungan bangsa-bangsa di seluruh dunia.

Perkembangan inilah pula yang sejak berakhirnya Perang Dunia II telah melahirkan kelompok bangsa-bangsa yang menggabungkan diri di dalam Blok Barat yang anti-komunis dan negara-negara Blok Timur yang berideologi komunis. Situasi inilah yang kemudian melahirkan periode perang dingin sampai satu hingga dua dekade setelah berakhirnya Perang Dunia II.

Dalam situasi semacam itu negara-negara yang baru lahir setelah berakhirnya Perang Dunia II, seolah-olah juga menghadapi dua pilihan bagi falsafah hidupnya, yaitu komunisme atau non-komunisme sebagai dasar negaranya. Sebagaimana disinggung di muka kelemahan-kelemahan yang dihadapi berbagai negara yang baru merdeka pada semua aspek kehidupan, condong mendekatkan mereka pada tawaran-tawaran yang datang dari faham komunis. Sebaliknya kelompok non-komunis tidak jarang berkembang menjadi negara-negara yang anti-komunis dan sikap semacam inilah yang membuka peluang adanya kerjasama-kerjasama yang erat dengan Blok Barat untuk menghadapi kegiatan-kegiatan komunis di dalam negerinya.

Faktor Wawasan

Wawasan sesuatu bangsa terutama timbul di dalam pandangannya terhadap tanah airnya dikaitkan dengan upayanya untuk dapat bertahan hidup dan mengembangkan kehidupannya. Pandangan tersebut sudah tentu akan dipengaruhi oleh kepribadian dan falsafah hidup bangsa yang bersangkutan di dalam menganalisa arti letak geografi, keadaan dan kekayaan alam yang dimilikinya, dihadapkan pada situasi lingkungannya.

Dari proses semacam inilah di dunia selama ini kita jumpai berbagai wawasan yang dianut berbagai bangsa. Beberapa bangsa menyadari kenyataan tentang dirinya dan didorong oleh ciri-ciri kepribadian dan falsafahnya bangsa tersebut menganut wawasan-wawasan hidup yang adakalanya melebihi wilayah nasionalnya sendiri. Akibat dari wawasan semacam ini pula yang

melahirkan berbagai bentuk penjajahan yang dialami oleh berbagai bangsa di Afrika dan Asia.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, konsep wawasan nasional tersebut tampak terus berkembang, ditandai dengan meningkatnya perhatian berbagai bangsa terhadap kawasan-kawasan strategis seperti Pasifik, Samudera Hindia dan kawasan-kawasan dunia lainnya sebagai wilayah di mana tersedia sumber daya yang melimpah. Di dalam kerangka rivalitas dan pertentangan Blok Barat dengan Blok Timur, wawasan nasional yang mereka anut menjadi faktor yang tampak semakin besar pengaruhnya. Wawasan global Blok Barat yang anti-komunis dan Blok Timur yang berideologi komunis terus berkembang sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Beberapa wilayah yang semula dikuasai Blok Barat memang telah berubah menjadi negara-negara merdeka seperti terjadi di Afrika, Asia dan Pasifik. Namun demikian perubahan-perubahan status tersebut tidak mengurangi pandangan-pandangan global berbagai negara besar di dunia dewasa ini. Demikian pula wawasan global sudah tidak lagi harus berarti penguasaan secara fisik militer atas segenap kawasan dunia, namun dapat pula dalam bentuk luasnya kehadiran kegiatan ekonomi negara yang bersangkutan.

Rivalitas dan Pertentangan Blok Barat dengan Blok Timur

Dengan latar-belakang motif-motif ideologi dan wawasan nasional masing-masing, rivalitas dan pertentangan antara Blok Barat dan Blok Timur mewarnai secara dominan perkembangan dunia selama ini, baik di dalam bidang politik, ekonomi, militer maupun sosial-budaya. Pengaruh rivalitas tersebut sangat menonjol, karena baik ideologi dan wawasan yang mereka anut mempunyai ciri-ciri yang bersifat global.

Rivalitas dan pertentangan antara Blok Barat dengan Blok Timur tersebut memang sangat menonjol perwujudannya di Eropa dan daerah-daerah pendukung di sekitarnya, di antaranya di wilayah Timur Tengah. Namun hal ini tidak berarti rivalitas dan pertentangan tersebut tidak terjadi di wilayah-wilayah lain. Wilayah-wilayah lain di luar Eropa dan Timur Tengah adalah juga daerah kepentingan Blok Barat, karena di situlah terletak sumber bahan mentah dan daerah pemasaran industrinya. Oleh karena itu wilayah-wilayah ini harus tetap di dalam lingkup pengaruhnya. Sebaliknya Blok Timur pun berpendapat daerah-daerah yang mendukung kekuatan Blok Barat tersebut harus direbut dan menjadi daerah yang menjadi lingkup pengaruhnya.

Ketegangan-ketegangan inilah yang melahirkan situasi perang dingin, sebagaimana telah diuraikan pada awal penyajian tulisan ini. Periode perang

dingin yang mereda pada akhir dekade 1960-an ditandai oleh upaya meredakan ketegangan antara dua negara adikuasa yang menjadi titik pusat pola rivalitas dan pertentangan antara Blok Barat dan Blok Timur. Dalam upaya untuk mencegah terjadinya krisis dunia yang dapat berakibat kehancuran total, pada tahun 1972 ditandatangani pula SALT-I, oleh kedua negara adikuasa yang bersangkutan. Bersamaan dengan situasi ini pula, pola rivalitas dan pertentangan antara Blok Barat dan Blok Timur mengalami perubahan-perubahan dalam wujudnya, meskipun tidak berubah hakikatnya.

Rivalitas antara Blok Barat dan Blok Timur sejak dekade 1970-an terasa lebih menyempit sebagai seolah-olah hanya rivalitas antara negara-negara adikuasa dari masing-masing blok tersebut. Hal ini disebabkan semakin menonjolnya kepentingan nasional masing-masing bangsa, sehingga negara-negara Blok Barat maupun negara-negara Blok Timur meskipun tidak memisahkan diri dari kelompok-kelompok ideologi masing-masing, namun mencoba melaksanakan bentuk-bentuk rivalitas yang tidak merugikan wawasan nasionalnya.

Perubahan-perubahan tersebut juga sebagai akibat pengaruh perkembangan politik di negara-negara Blok Barat sendiri yang mulai mengakomodasikan tampilnya golongan-golongan kiri di dalam sistem politiknya. Perubahan-perubahan tersebut diperkuat pula oleh kebijaksanaan negara-negara Blok Barat untuk menormalisasikan dan terus meningkatkan hubungan diplomatik dengan Cina-Komunis sejak tahun 1972.

Situasi-situasi semacam itulah yang melahirkan adanya hubungan langsung antara negara-negara Blok Barat dan negara-negara dari Blok Timur. Perkembangan yang terjadi sejak dekade tujuh puluhan tersebut merupakan budaya politik yang sangat tabu di dalam periode perang dingin sebelumnya.

TREND PERKEMBANGAN SITUASI INTERNASIONAL

Perkembangan Berbagai Kawasan

Rivalitas antara Blok Barat dan Blok Timur yang telah condong menyempit menjadi rivalitas antara negara-negara adikuasa, sebagaimana diuraikan di muka tidak mengurangi pengaruhnya terhadap situasi di berbagai kawasan, seperti apa yang terjadi di Nikaragua, di Timur Tengah, di Teluk Persia, di Afghanistan, di Kampuchea dan situasi yang terus-menerus tegang di Jajirah Korea. Pada kawasan dan daerah-daerah tersebut peredaan ketegangan tidak ada, sebaliknya konflik-konflik bersenjata terus terjadi atau potensial untuk terjadi.

Di Nikaragua, faktor ideologi telah menjadi faktor penghambat yang sangat sulit dicari titik-temunya. Pertentangan antara kelompok yang condong kepada komunisme dan kelompok yang anti-komunis diperkirakan akan terus berkembang.

Di Timur Tengah, masalah Palestina merupakan masalah yang sangat rumit, karena terkaitnya wawasan strategis berbagai negara di dalamnya. Oleh karena itu tampaknya apa yang dipersiapkan bangsa-bangsa di kawasan tersebut bukanlah kesiapan untuk menyongsong perdamaian, tetapi kesiapan untuk menghadapi perang yang setiap saat dapat pecah kembali.

Di Teluk Persia, peperangan yang terjadi di wilayah tersebut sangat sulit diperhitungkan, mengingat adanya berbagai motivasi yang tidak mudah dikenali. Kesiap-siagaan berbagai negara besar menghadapi memburuknya perang tersebut cukup menunjukkan adanya wawasan negara-negara besar terkait dengan permasalahan yang ada di kawasan tersebut.

Demikian pula pergolakan di Afghanistan bisa dilihat sebagai pergolakan yang bermotivasi ideologi maupun wawasan dari negara yang terlibat di dalamnya.

Di Asia Tenggara, satu-satunya konflik yang terjadi adalah di Kampuchea, di mana di dalam konflik ini tampak nyata benturan dari kepentingan yang dilandasi oleh wawasan yang berbeda.

Di Pasifik Utara, ketegangan yang terus terjadi jelas karena latar belakang ideologi, namun demikian situasi "tidak perang dan tidak damai" itu pun terjadi karena dapat dijaminnya keseimbangan antara wawasan negara-negara besar yang terkait di belakangnya.

Perpacuan Senjata

Wujud lain dari persaingan di bidang militer antara Blok Barat dan Blok Timur adalah pacuan senjata, baik konvensional maupun non-konvensional serta penggelaran kekuatan di berbagai pangkalan "depan" masing-masing di seluruh dunia.

Dalam kaitan dengan pacuan senjata, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan tumbuhnya kemudahan dalam penemuan dan penciptaan persenjataan mutakhir. Sehingga pacuan senjata berkembang sama pesat dengan kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri.

Pacuan senjata antara dua negara adikuasa sebagai inti kekuatan Blok Barat dan Blok Timur terjadi karena adanya kekhawatiran dan kecurigaan di masing-masing pihak atas keunggulan kemampuan lawannya. Pacuan senjata pun relatif tak terkendali lagi walaupun telah ada usaha antara keduanya untuk mengurangi atau membatasi jumlah pemilikan senjata nuklir maupun konvensional, yang dalam kenyataannya lebih merupakan upaya politik daripada niat yang sungguh-sungguh.

Pada skala dunia, dana yang dibelanjakan dalam sektor militer pada tahun lalu tercatat dua kali lebih besar daripada dana yang dibelanjakan pada seluruh sektor perdagangan non-senjata. Namun demikian, merupakan harapan segenap bangsa di dunia bahwa konflik militer langsung antara kedua negara adikuasa tidak akan terjadi dengan pertimbangan, bahwa kedua pihak menilai bahwa keuntungannya tidak seimbang dengan usahanya. Harapan berbagai bangsa ini tentu tidak berarti perlombaan di bidang persenjataan akan mereda karena sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pacuan senjata tersebut akan terus terjadi.

KEPENTINGAN NASIONAL BANGSA INDONESIA

Kepentingan Luar Negeri Bangsa Indonesia

Tujuan nasional bangsa Indonesia seperti dapat disimpulkan dari Pembukaan UUD 1945 adalah, agar atas dasar Falsafah Pancasila:

- a. Dapat diwujudkan keamanan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Dapat diwujudkan kesejahteraan umum dan kehidupan bangsa Indonesia yang cerdas;
- c. Dapat ikut melaksanakan ketertiban dunia pada umumnya dan Asia Tenggara pada khususnya.

Tujuan nasional inilah yang harus diwujudkan melalui pembangunan nasional yang arah dan pedomannya ditetapkan di dalam GBHN.

Potensi nasional sebagai modal dasar pembangunan nasional, memang merupakan kekayaan yang melimpah. Namun untuk mengubah potensi tersebut menjadi kekuatan nyata memerlukan upaya dan dukungan yang tidak kecil. Di dalam aspek luar negeri dukungan yang diperlukan bangsa Indonesia untuk dapat mengubah potensi nasional tersebut menjadi kekuatan nyata adalah:

- a. Terdapatnya situasi politik yang menguntungkan hubungan antarbangsa, sehingga adanya saling ketergantungan (inter-dependensi), dapat diarah-

- kan kepada bentuk-bentuk kerjasama yang positif;
- b. Terdapatnya situasi ekonomi internasional, baik dalam aspek moneter maupun perdagangan internasional, yang memungkinkan dapat diperolehnya tambahan modal pembangunan serta tersedianya pasaran bagi hasil produksi Indonesia;
 - c. Terwujudnya situasi keamanan yang mantap, baik di regional Asia Tenggara maupun di dunia internasional pada umumnya, sehingga dana dan daya yang tersedia lebih dapat diarahkan untuk membangun kesejahteraan bangsa.

Di dalam pengantar penyajian tulisan ini telah disinggung bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi situasi dunia pada dasarnya beraneka-ragam, tersebar pada semua aspek kehidupan, misalnya:

- a. Krisis moneter dunia yang belum kunjung teratasi dengan mantap;
- b. Masalah perdagangan internasional yang tidak menguntungkan negara-negara industri baru; dan
- c. Masalah-masalah sosial-ekonomi lainnya.

Namun demikian, masalah ideologi dan wawasan nasional berbagai bangsa pada dasarnya merupakan faktor-faktor yang menjiwai segenap faktor-faktor lainnya yang ada. Oleh karena itu pengamatan terhadap kedua faktor ini dinilai penting untuk dilakukan, karena mengkait langsung kepentingan dunia pada umumnya, yaitu ketertiban di bidang politik dan keamanan.

Dengan menyadari betapa dominannya faktor-faktor ideologi dan wawasan di dalam perkembangan situasi dunia, maka berbagai dampak negatif yang dapat mengganggu kepentingan nasional bangsa Indonesia di bidang luar negeri perlu benar-benar diwaspadai.

Konsep Ketahanan Nasional

Falsafah bangsa Indonesia adalah Pancasila dengan ciri-cirinya yang sangat khas sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Falsafah ini pada gilirannya mempengaruhi perwujudan wawasan nasional bangsa Indonesia di dalam menghadapi lingkungan strategisnya.

Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah Wawasan Nusantara yaitu wawasan yang mengkonsepsikan terwujudnya ketahanan nasional, sebagai sarana bangsa Indonesia agar dapat bertahan hidup dan mengembangkan kehidupannya. Dengan konsep ketahanan nasional dimaksudkan:

- a. Dari segi ideologi mampu menetralisasi pengaruh dari ideologi apa pun yang datang dari luar tubuh bangsa Indonesia;
- b. Dari segi politik, mampu menjabarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sehingga dapat mewujudkan sistem politik dengan out-put (keluaran) yang mampu menetralisasi pengaruh negatif dari lingkungan strategis yang dihadapi;
- c. Dari segi ekonomi, mampu mewujudkan kondisi ekonomi yang tidak mudah goyah oleh perkembangan-perkembangan lingkungan strategis yang dihadapi;
- d. Dari segi sosial-budaya, mampu mewujudkan kondisi sosial budaya yang tidak mudah terpengaruh oleh budaya negatif yang datang dari luar tubuh bangsa Indonesia;
- e. Dari segi militer, mampu mewujudkan kekuatan penangkal dan penyangga, sehingga mampu mencegah keinginan pihak lain yang secara fisik berusaha mengganggu integritas nasional bangsa Indonesia. Kekuatan militer tersebut diharapkan juga mampu melakukan tindakan-tindakan represif terhadap gangguan-gangguan yang terjadi.

Ukuran bagi suatu tingkat ketahanan nasional memang belum dapat ditetapkan kriterianya. Ketahanan nasional memang merupakan kondisi yang dinamis, sesuai dengan bentuk tantangan yang dihadapi maupun kemampuan nasional yang tersedia.

Oleh karena itu ketahanan nasional harus tidak diukur melalui aspek demi aspek, tetapi harus merupakan integrasi kualitatif dari kondisi yang ada. Sebagai suatu ilustrasi, kemampuan materiil yang terbatas tetapi didukung oleh semangat juang yang tinggi akan dapat membentuk kekuatan yang besar daya tangkalnya, justru karena itu konsep pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya.

SUMBANGAN ABRI DI DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA KETAHANAN NASIONAL

Seminar ABRI Tahun 1986

Ketahanan nasional adalah perpaduan yang serasi antara keamanan nasional dan kesejahteraan nasional di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Di dalam mendukung upaya mewujudkan ketahanan nasional, ABRI melalui fungsinya sebagai kekuatan Hankam dan sebagai kekuatan sosial-politik telah melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan.

Sebagai kekuatan Hankam, ABRI dapat melaksanakan tugas-tugas tem-

pur dan sekaligus juga tugas-tugas teritorial, misalnya ABRI Masuk Desa. Kegiatan teritorial ABRI Masuk Desa dapat dilakukan baik di daerah-daerah yang belum sepenuhnya mantap maupun di daerah-daerah yang terisolasi dan belum terjangkau oleh pembangunan. Sedangkan sebagai kekuatan sosial-politik ABRI melaksanakan kegiatan-kegiatannya tidak dengan kekuatan militer tetapi dengan konsepsi-konsepsinya, dengan konsep-konsep kebijaksanaan dan operasionalnya serta dengan kesanggupannya untuk ikut memecahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi bangsa Indonesia.

Dalam kaitan ini akan diuraikan beberapa pokok pikiran ABRI yang ter-cetus di dalam Seminar ABRI bulan Agustus 1986 yang lalu. Pokok-pokok pikiran ini pada esensinya adalah arah kebijaksanaan yang disarankan perlu diintensifkan pelaksanaannya.

Arah-arrah kebijaksanaan tersebut dicetuskan berdasarkan identifikasi terhadap berbagai unsur pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh GBHN, yaitu:

A. Identifikasi terhadap Pola Dasar Pembangunan Nasional

Pola dasar pembangunan nasional yang berunsurkan tujuan, landasan, asas-asas, modal dasar, wawasan dan sasaran pembangunan adalah pedoman-pedoman yang harus ditaati di dalam setiap gerak bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunannya.

Ketaatan bangsa Indonesia terhadap unsur-unsur pola dasar pembangunan nasional tersebut, berdasarkan pengamatan, masih sangat perlu ditingkatkan dan dimantapkan perwujudannya. Ketaatan terhadap pola dasar pembangunan nasional sangat penting untuk menjamin keserasian, keharmonisan dan keterpaduan pembangunan. Keserasian, keharmonisan dan keterpaduan pembangunan merupakan salah satu unsur yang penting dalam upaya mewujudkan efisiensi nasional.

Ketaatan adalah disiplin. Oleh karena itu, esensi dari identifikasi ini adalah, bahwa disiplin nasional yang berisi kepatuhan dan ketaatan kepada unsur-unsur pola dasar pembangunan nasional harus benar-benar diwujudkan. Secara umum, disiplin nasional yang mencakup perilaku segenap unsur bangsa Indonesia dan mencakup pelaksanaan segenap bidang pembangunan, perlu benar-benar diintensifkan dan diefektifkan perwujudannya.

B. Identifikasi terhadap Pemanfaatan Modal Dasar Pembangunan

Modal dasar pembangunan nasional adalah potensi yang ada di dalam tubuh bangsa Indonesia. Modal dasar pembangunan nasional adalah unsur-

unsur yang dapat saling memperkuat, saling membantu dan harus dibina secara simultan, sehingga dapat menjadi kemampuan dan kekuatan nasional yang bulat.

Sampai dengan menjelang berakhirnya Pelita-IV, pemanfaatan modal dasar tersebut agar menjadi kemampuan dan kekuatan nasional yang optimal, menunjukkan tanda-tanda belum sepenuhnya dilakukan. Pembinaan dan penggarapan terhadap unsur-unsur modal dasar pembangunan belum intensif dan belum seluruh potensi pembangunan digarap secara simultan, sehingga kemampuan dan kekuatan nasional yang terbentuk pada dasarnya belum menggambarkan kemampuan dan kekuatan nasional yang optimal.

Esensi dari identifikasi ini adalah produktivitas segenap bidang pembangunan sebagai perwujudan pembinaan dan penggarapan terhadap unsur-unsur modal dasar pembangunan harus diintensifkan.

Dengan demikian gerakan yang didukung oleh disiplin nasional untuk meningkatkan produktivitas nasional harus digalakkan.

C. Identifikasi terhadap Perwujudan Penghayatan terhadap Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional

Wawasan Nusantara dan konsep ketahanan nasional merupakan dua unsur yang saling berkaitan. Penghayatan terhadap Wawasan Nusantara merupakan kunci utama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Persatuan dan kesatuan bangsa adalah pendukung utama stabilitas nasional, yaitu salah satu kepentingan nasional yang harus terwujud agar pembangunan nasional dapat dilakukan. Stabilitas nasional adalah juga salah satu unsur trilogi pembangunan. Sasaran yang dicita-citakan dalam pembangunan nasional adalah terwujudnya ketahanan nasional yang mantap.

Oleh karenanya, belum mantapnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung di dalam Wawasan Nusantara telah mengakibatkan stabilitas nasional masih mengandung berbagai kerawanan. Kondisi ini jelas tidak menguntungkan upaya mewujudkan ketahanan nasional sebagai sasaran pembangunan nasional.

Esensi dari identifikasi ini adalah bahwa stabilitas nasional pada dasarnya adalah amanat yang terkandung di dalam pola dasar pembangunan dan merupakan salah satu unsur trilogi pembangunan yang harus senantiasa dipelihara dan dimantapkan.

D. Identifikasi terhadap Arah dan Kebijaksanaan Pembangunan

Arah dan kebijaksanaan pembangunan pada dasarnya adalah Trilogi Pembangunan, yang dikembangkan secara serasi dan saling memperkuat.

Dengan demikian mengembangkan pembangunan nasional dengan mengabaikan salah satu unsur dari Trilogi Pembangunan akan berarti tidak sejajar dengan arah dan kebijaksanaan pembangunan. Gerak pembangunan yang tidak searah dengan Trilogi Pembangunan, akan mengakibatkan kurangnya keserasian, keharmonisan dan keterpaduan pembangunan.

Produktivitas nasional dapat dicapai baik melalui intensifikasi efisiensi nasional dan juga ekstensifikasi penggarapan segenap modal dasar pembangunan.

Oleh karena itu, pemerataan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha dapat menjadi pendukung utama di dalam upaya peningkatan produktivitas nasional.

Dengan demikian, pemerataan pembangunan sebagai sarana untuk memeratakan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha, perlu senantiasa mendapat perhatian di dalam setiap gerak pembangunan.

Esensi dari identifikasi ini adalah bahwa sesuai dengan arah kebijaksanaan pembangunan, maka upaya untuk mewujudkan pemerataan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha harus menjiwai gerak dari setiap bidang pembangunan.

E. Identifikasi terhadap Kedudukan Manusia Indonesia sebagai Salah Satu Modal Dasar Pembangunan

Salah satu modal dasar pembangunan nasional yang utama adalah manusia-manusia Indonesia karena unsur manusia selain berkedudukan sebagai obyek juga berperanan sebagai subyek pembangunan.

Disiplin nasional yang perlu ditingkatkan dan dimantapkan adalah unsur mental-spiritual dari manusia Indonesia tersebut. Demikian pula, profesionalisme adalah unsur kualitas sebagai subyek pembangunan.

Peningkatan kadar mental-spiritual dan profesionalisme ini hanya mungkin dilakukan melalui pendidikan yang intensif.

Esensi dari identifikasi ini adalah sistem pendidikan nasional, dengan sistem kurikulum sebagai sub-sistemnya, merupakan sektor pembangunan

yang perlu dimantapkan. Dalam hal ini, sistem pendidikan dan sistem kurikulum harus menjamin terbentuknya manusia-manusia Indonesia yang kuat mental-ideologi dan mental-spiritualnya serta tinggi pengetahuan dan ketrampilannya.

Disiplin Nasional

Disiplin nasional sebagaimana diuraikan di atas, dinilai oleh ABRI sebagai salah satu terobosan mental yang perlu digalakkan di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu perlu disusun konsep untuk mewujudkan terobosan mental tersebut, sehingga kiranya akan dapat terus dikembangkan oleh lingkungan masyarakat di luar ABRI.

Sebagai warga negara Indonesia rasa kepatuhan dan ketaatan yang mendasar adalah kepada Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu ketaatan yang mendasar ini harus pertama-tama dimantapkan. Disiplin nasional bermula dari disiplin pribadi dan disiplin pribadi terdiri dari disiplin terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat dan terhadap kewajibannya sebagai warga negara. Ketiga bagian dari disiplin pribadi tersebut sangat erat hubungannya satu sama lain.

Pada hakikatnya disiplin adalah pencerminan dari tata nilai yang dihayati oleh setiap individu dan masyarakat suatu bangsa. Sebagai manusia Pancasila-lais, disiplin adalah penopang pokok yang akan membentuk nilai-nilai kesetia-kawanan nasional, tenggang rasa, hemat, sederhana, bekerja keras, cermat, tertib, jujur dan ksatria yang selalu siap untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara. Bilamana seseorang mempunyai disiplin yang baik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka dia selalu akan berusaha memberikan hal-hal yang terbaik untuk masyarakat dan negara.

Di dalam upaya menegakkan disiplin nasional perlu penegakan hukum yang berlanjut, konsisten dan konsekuen. Konsisten artinya adalah bahwa sesuatu pelanggaran yang terjadi harus mendapat sanksi yang sama bagi setiap pelakunya. Konsekuen artinya adalah dilakukan dengan penuh tanggung jawab berarti bahwa tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan berdasar hukum. Perlu pula dilakukan upaya untuk mencegah dan menindak setiap pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, betapapun kecilnya dengan sanksi sedini mungkin.

Rasa kemanusiaan, rasa sosial dan rasa ikut-serta adalah hal yang sangat mendasar, sensitif dan berperan dalam sikap seseorang dalam menjaga disiplin. Oleh sebab itu pertimbangan dari ketiga perasaan tersebut haruslah dapat ditanamkan pada setiap individu anggota masyarakat. Demikianlah beberapa pokok pemikiran dasar yang kiranya perlu terus dikembangkan.

KESIMPULAN

Dari uraian mengenai perkembangan situasi internasional dewasa ini dan kemungkinannya di masa datang dihadapkan kepada ketahanan nasional bangsa Indonesia, maka diperoleh gambaran:

1. Situasi internasional akan tetap diwarnai oleh rivalitas antara berbagai negara besar untuk menjamin terwujudnya kepentingan nasional masing-masing;
2. Meskipun rivalitas berbagai negara besar, khususnya di antara negara-negara adikuasa condong didasarkan pada upaya memperoleh superioritas sebagai bangsa, namun ciri pertentangan ideologi tidak dapat dilenyapkan;
3. Oleh karena itu konflik-konflik bersenjata yang tersebar mulai dari Amerika Tengah, Timur Tengah, Teluk Persia, Afghanistan dan Kampuchea serta ketegangan di Korea, pada umumnya tetap pertama-tama diwarnai oleh masalah-masalah ideologi dan kemudian kepentingan negara-negara besar di belakangnya;
4. Kegawatan yang terjadi di berbagai kawasan dunia dewasa ini secara langsung atau tidak langsung dapat menjadi situasi lingkungan strategis yang perlu dipertimbangkan dampak negatifnya kepada Indonesia;
5. Untuk menghadapi situasi tersebut pembangunan nasional yang dapat menciptakan manusia Indonesia seutuhnya dan mewujudkan ketahanan nasional yang utuh pula, perlu benar-benar dapat dilakukan.

PENUTUP

Situasi lingkungan strategis tersebut perlu dihadapi dengan penuh kewaspadaan dan memupuk ketahanan nasional yang mantap.

Dari pokok-pokok pikiran yang disimpulkan oleh Seminar ABRI tahun 1986 dalam upaya mensukseskan pembangunan diperlukan lima arah kebijaksanaan yang penting, yang merupakan langkah-langkah terobosan yang perlu dilakukan. Dan untuk mampu menggerakkan 4 arah kebijaksanaan (terobosan) lainnya, disiplin nasional adalah syaratnya, dan sistem pendidikan adalah salah satu sarana utama pembentukan disiplin nasional. Tamansiswa sebagai suatu wadah yang utamanya bergerak dalam bidang pendidikan, dan di dalam sejarah perjuangan nasional telah membuktikan perwujudan kemampuannya sebagai penggerak kebangkitan nasional, kiranya dapat menangkap pokok-pokok pikiran yang telah disampaikan tadi.

Pasal 32 UUD 1945: Makna dan Dinamiknya*

A.M.W. PRANARKA

Sudah barang tentu Pasal 32 UUD 1945 mempunyai makna yang istimewa bagi keluarga besar Tamansiswa. Ada tiga pertimbangan sekurang-kurangnya mengenai hal tersebut: *pertama*, pertimbangan historis; *kedua*, pertimbangan wawasan; dan *ketiga*, pertimbangan perjuangan. Pertimbangan historis, karena Ki Hadjar Dewantara mempunyai saham pemikiran yang tidak sedikit sehubungan dengan pasal itu. Pertimbangan wawasan karena Tamansiswa lahir dan berkembang atas dasar wawasan kebangsaan dan kebudayaan. Pertimbangan perjuangan karena Tamansiswa adalah sebuah pusat pergerakan perjuangan kebangsaan dan kebudayaan.

Namun pasal tersebut juga mempunyai tempat yang penting juga di dalam sejarah kebangsaan kita. Hal kebudayaan itu tampaknya selalu menjadi bagian di dalam arus gelombangnya sejarah bangsa kita. Kebudayaan merupakan salah satu konsep penting di dalam sejarah Indonesia modern. Sudah sejak awal zaman Kebangkitan Nasional kebudayaan menjadi salah satu tema utama. Kebudayaan sebagai sebuah konsep dominan setiap kali muncul mewarnai perkembangan sejarah Indonesia modern. Ada Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Ada Poedjangga Baroe, pada tahun 1931. Ada Polemik Kebudayaan pada tahun 1936.

UUD 1945 di samping merupakan Konstitusi Negara Kebangsaan sekaligus juga merupakan sebuah Piagam Kebudayaan Bangsa Indonesia. Ada Kongres Kebudayaan pada tahun 1948, yang disusul oleh Kongres Kebudayaan di Bali dan Surakarta. Selama dasawarsa 1950-an hubungan antara Pancasila dan Kebudayaan Bangsa menjadi makin eksplisit, seperti terungkap dari Seminar Pancasila pertama di Universitas Gajahmada, Seminar Hukum Nasional yang

*Ceramah di Tamansiswa, Yogyakarta, 29 Oktober 1986.

pertama, dan di dalam pidato Bung Karno di mimbar Universitas Heidelberg di Jerman. Berdirilah pada waktu itu lembaga-lembaga kebudayaan sebagai bagian dari bermacam-macam organisasi politik dan ideologi, di antaranya Lekra yang komunis dan kemudian mendominasi kongres kebudayaan di Bandung. Lebih lanjut lahirilah Manifest Kebudayaan sebagai arus-balik menentang gelombangnya pengaruh komunis.

Kebudayaan menjadi lebih dipertegas lagi di zaman Orde Baru, antara lain di dalam hal hubungan antara Pancasila dan Kebudayaan Bangsa Indonesia. Pembangunan nasional yang dirumuskan sebagai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya mengungkapkan pula pengaruh pendekatan kultural terhadap konsep pembangunan. Pembangunan tidak dititikberatkan kepada acuan ekonomi semata-mata, acuan politik, acuan keagamaan ataupun acuan kedaerahan, melainkan secara fundamental pembangunan ditempatkan di dalam konteks kemanusiaan dan kemasyarakatan Indonesia. Pada tahun 1976 orang mulai berbicara pula mengenai strategi kebudayaan. Dewasa ini kita mencatat adanya berbagai kegiatan yang mencurahkan perhatian dan pemikiran mengenai kebudayaan: ada forum kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ada gagasan untuk menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Menyongsong Indonesia tahun 2000, ada Peringatan Polemik Kebudayaan lima puluh tahun yang lalu itu, dan ada Temu Budaya yang baru saja diselenggarakan di Jakarta.

Dari catatan sederhana seperti itu kita dapat mengangkat suatu kesimpulan betapa kebudayaan merupakan pengertian yang secara terus-menerus timbul di dalam pasang-surutnya sejarah Indonesia Modern, baik pada saat pasang naik mencapai titik tertinggi maupun pada saat pasang-surut menunjukkan batas yang amat rendah. Semua itu mungkin membawa petunjuk bahwa muara dari perjuangan bangsa kita adalah kebudayaan, namun sumber dari perjuangan itu pun adalah kebudayaan juga adanya.

Gejala-gejala sejarah tersebut membawa amanat mengenai pentingnya pembangunan kebudayaan kita. Kebudayaan adalah hal yang amat fundamental dan mendasar. Pembangunan kebudayaan berarti usaha memberikan basis-basis yang sifatnya mendasar bagi pertumbuhan peradaban masyarakat Indonesia.

Namun karena kita sudah menjadi satu bangsa yang merdeka, berdaulat dan bersatu, yang mempunyai satu ideologi dan satu konstitusi, maka pembangunan kebudayaan bangsa Indonesia itu harus pula terjalin dengan kesepakatan ideologikal maupun konstitusionalnya. Di sinilah arti Pasal 32 itu. Segala aspirasi dan cita-cita, segala polemik dan kontroversi, mengenai kebudayaan nasional Indonesia, haruslah kita kaji berdasarkan atas pema-

haman kita mengenai Pasal 32 UUD 1945. Kecuali apabila aspirasi dan cita-cita itu memang bermaksud untuk keluar dari dan berjalan di luar konstitusi kebangsaan kita.

SEJARAH PASAL 32 UUD 1945

Pasal 32 UUD 1945 itu sendiri bunyinya tidaklah terlalu panjang. Pasal tersebut menyatakan: Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Konstitusi memuat uraian yang lebih panjang mengenai pasal ini di dalam Penjelasan, di mana ada dikemukakan berikut ini:

Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Pasal 32 ini pada mulanya adalah Pasal 34, dan menjadi bagian dari bab mengenai kesejahteraan sosial. Akan tetapi oleh Bung Hatta disarankan untuk dipindahkan tempatnya menjadi satu dengan bab mengenai pendidikan, sehingga hal tentang kebudayaan itu pun kemudian menjadi Pasal 32 di dalam UUD 1945.

Mengenai sejarah dari Pasal 32 ini hingga saat ini belum terdapat suatu studi yang dapat disebut lengkap. Sejarah terjadinya Pasal 32 itu pun juga tidak banyak terekam. Hanya sedikit saja yang dapat kita gali. Mungkin perlu sekali digiatkan usaha-usaha untuk mengadakan studi dan penelitian mengenai sejarah masing-masing pasal, termasuk terjadinya Pasal 32 ini, karena lengkapnya sejarah itu merupakan salah satu wahana yang penting di dalam memahami maksud dan makna dari pasal-pasal tersebut.

Yang dapat kita ketahui saat ini adalah bahwa hal kebudayaan itu sudah ada termuat di dalam naskah Rancangan UUD yang disusun oleh Panitia Kecil Perancang UUD di dalam BPUPKI, termuat di dalam Pasal 34, di mana kebudayaan itu tidak menjadi satu dengan hal pendidikan:

Pasal 34: Pemerintah harus memajukan kebudayaan nasional Indonesia dan bagi itu memajukan kebudayaan dari masing-masing daerah, sebagai rukun dari kebudayaan nasional itu.

Rancangan tersebut disampaikan di hadapan para anggota BPUPKI pada tanggal 13 Juli 1945. Terhadap pasal ini tidak banyak terjadi perdebatan dan pembahasan.

Hal kebudayaan di dalam Rancangan UUD tersebut muncul lagi pada tanggal 15 Juli, ketika Soepomo sebagai Ketua Panitia Kecil Perancang UUD memberikan uraiannya. Ia merasa perlu memberikan penjelasan mengenai pasal tentang kebudayaan tersebut, antara lain untuk menghindari agar tidak terjadi salah pengertian. Berkatalah Soepomo antara lain sebagai berikut:

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Ini adalah sebagai penerangan, supaya tidak ada salah paham. Pasal ini tidak berarti, bahwa kita menolak adanya kebudayaan-kebudayaan daerah, misalnya, umpama ada orang berkata: "Sekarang tarian Jawa, Kebudayaan Jawa, bukan kebudayaan Indonesia, maka kita menciptakan yang baru." Bukan begitu maksudnya. Kebudayaan Jawa, Bali, Sunda itu semuanya kebudayaan Indonesia. Itu harus dihormati, dijunjung tinggi, akan tetapi pasal ini maksudnya bahwa oleh karena kita hendak mengadakan persatuan, maka sedapat mungkin kita melahirkan kebudayaan nasional Indonesia. Bagaimana kebudayaan itu terserah kepada masyarakat nanti.

Wawasan yang sama dikemukakan pula oleh Soepomo ketika menjelaskan tentang *Bahasa Negara*:

Bahasa Negara, ialah bahasa Indonesia. Samasekali tidak berarti, bahwa bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lain-lain harus dihapuskan. Samasekali tidak. Dahulu saya juga mendengar dalam sidang ini perkataan: Janganlah memakai nama *Sukarjo*, nama Jawa, tetapi harus nama Indonesia. Itu salah. Bukan itu yang dimaksud. Nama Jawa, nama Sunda itu nama Indonesia. Jadi, bahasa-bahasa daerah, bahasa Jawa, dan lain-lain dihormati. Dengan sendirinya bahasa itu diucapkan, dipakai, apalagi bahasa yang mempunyai tingkatan tinggi, seperti bahasa Jawa misalnya, yang dipakai oleh berjuta-juta orang, tidak bisa lenyap; itu tidak usah dikhawatirkan, sebab itu bahasa Indonesia juga; tetapi di sini kita menjunjung tinggi persatuan rakyat, di samping itu, bahasa negara ialah bahasa Indonesia.

Dalam rapat BPUPKI, tanggal 15 Juli 1945, Moh. Hatta mengusulkan agar Pasal 34 yaitu Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia, sebaiknya ditaruh dalam bagian pendidikan, tidak dimasukkan dalam Bab VIII tentang Kesejahteraan Sosial. Saya kira pasal ini lebih kena, kalau ditempatkan dalam bagian pendidikan. Saran ini diterima.

Pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, sehari sesudah Proklamasi Kemerdekaan, dari naskah Yamin, Ir. Soekarno hanya membacakan Rancangan Pasal 31 tentang Pendidikan.

Ayat (1) : Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Konsekuensinya: leerplicht.

Ayat (2) : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang ditetapkan dengan undang-undang.

Namun di dalam Risalah Negara tahun 1946, kebudayaan terdapat di dalam Pasal 32, disertai dengan Penjelasannya.

ANALISA KONTEKSTUAL TERJADINYA PASAL 32

Di dalam memahami Pasal 32 UUD 1945 sebaiknya kita memperhatikan pula apa yang sudah dikemukakan di dalam Penjelasan mengenai Konstitusi kita ini. Ada dikemukakan di dalam Penjelasan Umum uraian sebagai berikut:

Memang untuk menyelidiki hukum dasar (*droit constitutionelle*) suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-Undang Dasarnya (*loi constitutionnelle*) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana prakteknya dan bagaimana suasana kebatinannya (*geistlichen hintergrund*) dari Undang-Undang Dasar itu.

Undang-Undang Dasar Negara mana pun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin.

Bahwa kebudayaan menjadi hal yang penting dan karena itu terjadilah Pasal 32 itu, tampaknya dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internal.

Menarik untuk diperhatikan bahwa UUD 1945 pada khususnya dan kebangkitan nasional pada umumnya, terjadi di dalam suasana di mana pemikiran-pemikiran mengenai kebudayaan, kebangsaan, kemanusiaan menjadi makin mewarnai alam pikiran modern di Eropa. Menarik pula untuk diperhatikan bahwa periode tersebut juga merupakan periode meningkatnya perhatian di dalam studi dan penelitian mengenai bahasa, masyarakat dan kebudayaan. Menarik untuk diperhatikan bahwa di dalam perkembangan ilmu kebudayaan, saat itu merupakan saat yang diwarnai oleh pemikiran mengenai cultural diffusionism dan tumbuhnya anthropologi kultur. Konsep etnologi (yang menitikberatkan kebudayaan pada etnisitas dan dipengaruhi oleh pandangan evolusionisme unilinear) mengalami transformasi menjadi ilmu kebudayaan (di mana titik pusatnya adalah persamaan kodrat manusia, faktor-faktor yang majemuk, cultural diffusionism, akulturasi, dan sebagainya). Saat itu merupakan saat di mana gairah perhatian kepada kebudayaan Indonesia menjadi amat tinggi, bahkan hampir menyamai gairah perhatian kepada kebudayaan Yunani-Romawi kuno, kebudayaan India ataupun Timur Tengah kuno: ditemukan adanya khazanah kesusasteraan yang besar, ada bahasa yang kaya, ada perkembangan sistem religi, ada candi-candi, dan lain sebagainya. Austronesia, Nusantara, Indonesia, adalah konsep-konsep di dalam dunia pemikiran mengenai kebudayaan. Semua itu membawa semacam kesadaran perasaan betapa Indonesia merupakan khazanah kebudayaan yang besar. Maka tumbuhlah Indologi. Hal-hal ini tentu menjadi suatu pemacu dan sumber inspirasi bagi putera-putera Indonesia generasi pertama yang dapat mengenyam pendidikan modern dari Eropa. Generasi cendekiawan Indonesia pada masa itu amatlah sadar mengenai kha-

zanan kesusasteraan Indonesia, mengenai kebesaran kebudayaan Indonesia, dan mengenai arti kebudayaan itu sendiri. Suasana inilah yang merupakan konteks terjadinya Pasal 32 UUD 1945. Dengan perkataan lain Pasal 32 ini adalah hasil dari suatu proses akulturasi. Ada pengaruh-pengaruh dari luar akan tetapi semua itu diolah secara kreatif di dalam kerangka tumbuhnya wawasan kebangsaan Indonesia. Kata *cultuur* yang kemudian diterjemahkan menjadi kebudayaan tampaknya menjadi bagian penting pula dari proses kebangkitan nasional. Tidaklah mengherankan bahwa kebudayaan tercatat sebagai hal yang penting dan perlu dimasukkan ke dalam UUD Negara.

Masalah kebudayaan itu tampaknya juga merupakan dimensi yang memunculkan problem-problem mendasar pada zaman Kebangkitan Nasional tersebut di antaranya adalah masalah mengenai daerah-daerah, masalah lama dan baru, masa silam dan masa depan, masalah persatuan dan perbedaan, masalah mengenai sikap kita terhadap pengaruh-pengaruh dari luar, dan soal kebangsaan Indonesia. Pertanyaan mendasar mengenai siapakah bangsa Indonesia tampaknya berjalan sejajar pula dengan masalah mengenai bagaimana kebudayaan bangsa Indonesia itu. Nasionalisme adalah hal politik akan tetapi juga hal kebudayaan.

STRUKTUR DAN KOMPOSISI PASAL 32

Struktur dan komposisi Pasal 32 adalah amat sederhana. Pasal itu terdiri dari satu kalimat saja yang berbunyi: Pemerintah memajukan kebudayaan Indonesia. Dari kalimat tersebut kita dapat merasakan bahwa Pasal 32 membawa suatu pesan, suatu amanat, sebuah kalimat imperatif. Berbeda dengan Pasal 31 yang berbicara mengenai pendidikan, pasal ini tidak disertai oleh sebuah penegasan mengenai pengaturan dengan undang-undang.

Walaupun struktur dan komposisi itu sederhana, hanya terdiri tidak lebih dari lima kata, akan tetapi konsep-konsep yang terkandung di dalamnya sungguh bukan hal sederhana. Kalaupun kata Pemerintah dapat kita cari penjelasannya di dalam UUD 1945, dan kata Indonesia juga tidak memerlukan uraian analitikal lebih jauh, toh masih ada tiga kata yang memerlukan penjelasan mengenai maknanya, yaitu kata-kata *memajukan*, *kebudayaan*, *nasional*. Apakah yang dimaksud dengan kata memajukan? Apakah yang dimaksud dengan kebudayaan? Dan apakah yang dimaksud dengan (kebudayaan) nasional? Untuk memperjelas amanat.Pasal 32 inilah kiranya lalu diberi uraian yang lebih panjang yang terdapat di dalam Penjelasan UUD 1945. Maka itu amat perlulah kita mempelajari apakah yang dikatakan di dalam Penjelasan UUD 1945 terhadap Pasal 32 mengenai kebudayaan nasional Indonesia tersebut.

Penjelasan atas Pasal 32 ini struktur dan komposisinya juga termasuk sederhana. Ia hanya terdiri dari tiga kalimat. *Kalimat pertama* dapat kita pandang sebagai definisi mengenai kebudayaan nasional. Bunyi kalimat pertama itu adalah sebagai berikut: Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Istilah kebudayaan nasional tidak terdapat di dalam kalimat ini, yang kita temukan adalah istilah kebudayaan bangsa. Hal ini mengandung arti bahwa kata nasional di dalam Pasal 32 tersebut perlu kita pahami dengan mengacu kepada wawasan kebangsaan dan wawasan kerakyatan Indonesia. Kata timbul di dalam penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan itu adalah suatu gerak, suatu proses, suatu pertumbuhan, suatu dinamika. Kebudayaan bersifat organik. Proses itu ditentukan oleh *usaha budi*. Dinamika kebudayaan adalah dinamika kreatif, dinamika aktif, dari budi manusia, dalam hal ini rakyat Indonesia seluruhnya. Disebutkannya rakyat Indonesia seluruhnya di dalam penjelasan ini adalah untuk mempertegas bahwa kebudayaan itu bukan hasil buah budi-nya orang per orang, akan tetapi buah usaha budinya seluruh rakyat yang terangkum di dalam kebangsaan yang satu adanya (satu bangsa): yaitu persatuan-kesatuan berdasarkan atas persamaan dan menjauhkan segala bentuk diskriminasi. Inilah cita-cita demokrasi kerakyatan Indonesia. Dari satu pihak usaha-usaha masing-masing tidak ditiadakan, namun usaha masing-masing tidak dapat dimutlakkan. Kebudayaan bukanlah suatu konsep individual akan tetapi adalah konsep sosial.

Kalimat kedua berbicara mengenai kebudayaan lama, kebudayaan asli dan kebudayaan daerah. Kalimat itu berbunyi sebagai berikut: Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Kalimat ini tidak jarang mengundang kontroversi, karena penjelasan itu seolah-olah menegaskan bahwa kebudayaan nasional adalah totalitas penjumlahan dari kebudayaan-kebudayaan daerah dan penjumlahan dari kebudayaan-kebudayaan lama. Apakah ini tidak berarti bahwa kebudayaan bangsa itu tidak lain adalah kebudayaan lama dan asli itu? Dan tidakkah ini berarti bahwa kebudayaan bangsa itu menurut konstitusi kita tidak mempunyai orientasi ke depan, orientasi untuk maju, untuk progress? Dan apakah artinya puncak-puncak kebudayaan itu? Sebetulnya kalimat kedua ini terdiri dari dua kalimat di dalamnya: (1) kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah; (2) kebudayaan lama dan asli sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah tersebut, terhitung sebagai kebudayaan Indonesia. Kalimat ini harus kita pahami secara dialektikal, artinya ia merupakan jawaban terhadap permasalahan aktual. Memang pada waktu itu ada terdapat pertanyaan, ada terdapat problematik mengenai lama dan baru dan mengenai daerah dan persatuan nasional. Kebangkitan nasional yang melahirkan wawasan kebangsaan adalah juga membawa tumbuhnya wawasan kemandirian. Kebangkitan nasional membawa cita-cita Indonesia yang baru. Kebang-

kitan nasional membawa cita-cita terwujudnya bangsa yang satu. Di dalam konteks "baru" saja menjadi pertanyaan: bagaimanakah nasib yang lama? Apakah hal tersebut berarti ditinggalkannya yang lama? Di dalam konteks satu bangsa, satu wawasan nasional, maka timbullah pertanyaan: bagaimana kah posisi daerah-daerah? Leburkah daerah-daerah itu? Hilangkah daerah-daerah tersebut? Di samping itu masih ada pula terdapat satu pertanyaan aktual: kalau ingin membangun Indonesia baru, dari manakah akan dimulainya, karena yang lama mesti ditinggalkan, daerah-daerah tidak diakui, tetapi yang baru itu belum ada.

Penjelasan ini memberikan jawaban terhadap ketiga masalah tersebut: (1) masalah hubungan antara lama dan baru; (2) masalah hubungan daerah-daerah berhadapan dengan cita-cita persatuan kesatuan kebangsaan atau nasional; (3) masalah dari manakah titik landasan awal Indonesia baru itu? Hal-hal ini pulalah yang sebetulnya terdapat di dalam penjelasan Soepomo di dalam Sidang BPUPKI baik mengenai hal kebudayaan maupun mengenai hal bahasa kebangsaan. Di dalam kalimat Penjelasan itu ada dikandung pernyataan bahwa kebudayaan lama dan asli mempunyai tempatnya di dalam kebudayaan nasional; daerah-daerah juga mempunyai tempatnya di dalam kebudayaan nasional; dan kebudayaan lama dan asli yang terhitung sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah itu adalah asset inisial dari tumbuhnya kebudayaan nasional. Dengan perkataan lain kebudayaan yang ada itulah merupakan modal untuk tumbuh dan dibangunnya kebudayaan nasional Indonesia.

Kontroversi antara lama dan baru memang merupakan salah satu kontroversi di dalam pemikiran mengenai kebudayaan. Kita pun mengalaminya pula: ada pujangga lama ada pujangga baru. Lama dan baru itu juga menjadi salah satu kontroversi di dalam Polemik Kebudayaan tahun 1936. Toynbee pun berbicara mengenai hal ini. Ia membahas mengenai pertentangan antara archaisme di satu pihak dan futurisme di lain pihak, yang menurut pendapatnya kedua-duanya adalah pandangan yang tidak berpijak atas realisme sejarah dan realisme kebudayaan. Berkatalah Toynbee:

Archaism is an attempt to fly into the past, futurism into the invisible. Both paths are alternative substitutes for the growth of a civilisation, since both aim at the breach of continuity, and the principle of continuity is of the essence of the movement of growth. Futurism and archaism are sheer negations of growth and that is the whole of their tragedy.

Aspirasi untuk maju di dalam geraknya kebangkitan nasional tampaknya telah menimbulkan kekhawatiran bagi mereka yang ingin mempertahankan yang lama dan asli. Dari lain pihak aspirasi untuk maju tersebut telah pula melahirkan gagasan-gagasan untuk membuang yang lama samasekali, dan menjadi baru. Ditinjau dari konteks pertentangan antara archaisme dan futurisme, kalimat bagian ini adalah suatu penolakan terhadap futurisme dan

memberi tempat kepada yang lama dan asli. Apakah dengan demikian wawasan kebudayaan dari Pasal 32 ini lalu menjadi anti terhadap kemajuan? Untuk itu perlu kiranya dibahas pula kalimat berikutnya nanti.

Kontroversi antara daerah dan persatuan nasional (bukan daerah dan pusat) juga merupakan kontroversi aktual di dalam pergerakan kebangkitan nasional, sebagai bagian awal dari sejarah Indonesia modern atau sejarah Nusantara Baru. Kontroversi seperti itu juga merupakan gejala yang sifatnya umum di dalam kehidupan politik, kenegaraan, hukum, bahasa dan kebudayaan. Penjelasan ini menegaskan bahwa persatuan kebangsaan tidaklah berarti hapusnya daerah-daerah. Di dalam garis ini terkandunglah wawasan *bhinneka tunggal ika*. Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa di dalam Penjelasan bagian ini tidak dipergunakan penggabungan kata antara kebudayaan dan daerah, sehingga menjadi kebudayaan daerah. Kalimat itu berbunyi *kebudayaan di daerah-daerah*. Ini menunjukkan bahwa kebudayaan dipandang sebagai suatu pertumbuhan dinamik, dan daerah itu merupakan wilayah tempat tumbuhnya kebudayaan tersebut. Dalam pengertian inilah kita harus memahami arti dari kata puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah. Kata puncak menunjukkan bahwa kebudayaan adalah hal yang "tumbuh," yang menjadi, yang dinamik. Pengertian kebudayaan di sini bukanlah pengertian yang sifatnya *esensialistik* akan tetapi pengertian kebudayaan yang sifatnya organik *eksistensialistik* evolutif. Maka itu tidak dapat kita tafsirkan secara deterministik dan dalam pola pikir yang deterministik pula. Puncak-puncak itu terjadi dan isi serta bentuknya akan ditentukan oleh pertumbuhan yang ada.

Dengan terhitungnya kebudayaan lama dan asli sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah itu sebagai kebudayaan bangsa, maka bangsa Indonesia sudah memiliki modal bagi tumbuh berkembangnya kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional sudah mempunyai titik mula, akar-akar, sumber-sumber, yang tentu saja harus pula dipahami di dalam pengertian kebudayaan yang dinamik eksistensialistik. Kebudayaan nasional bukanlah suatu cita-cita yang berawal dari kekosongan yang harus melahirkan sesuatu yang baru.

Yang tidak kalah pentingnya adalah kalimat ketiga di dalam Penjelasan terhadap Pasal 32 tersebut. Kalimat itu berbunyi sebagai berikut: Usaha kebudayaan harus menuju kepada kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Pokok pikiran yang terdapat di dalam bagian ini antara lain adalah penegasan sikap dan wawasan mengenai yang disebut "*kemajuan*" dan "*usaha memajukan kebudayaan*," termasuk di dalamnya sikap dan wawasan mengenai hubungan antara kebudayaan Indonesia dan kebudayaan asing. Di dalam uraian mengenai hal-

hal tersebut terungkap pula pemikiran-pemikiran mendasar mengenai usaha kebudayaan, yaitu harus menuju kepada kemajuan adab, kemajuan budaya dan persatuan, serta mempertinggi derajat kemanusiaan. Dalam kata-kata itulah terasa betapa pandangan mengenai kebudayaan mempunyai kaitan erat dengan pandangan mengenai kemanusiaan, kemajuan dan persatuan.

Apabila di dalam kalimat sebelumnya terasa adanya sikap yang menolak futurisme, maka di dalam kalimat ini dikemukakanlah pandangan mendasar mengenai wawasan kemajuan. Pasal 32 bukanlah pasal yang menolak kemajuan, bahkan di dalam ayatnya dikatakan bahwa Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Namun kemajuan tersebut tidak diartikan sebagai wawasannya futurisme, yaitu pandangan yang mendewakan masa depan dan menghinakan dimensi masa lampau; juga bukan pandangan futurisme yang tidak mulai dari akar dan kenyataan budaya sendiri sebagai kebudayaan yang ada; bukan futurisme yang ingin membuat lompatan memasuki alam budaya asing dan melupakan dasar pijak untuk terjadinya lompatan tersebut. Di dalam kalimat Penjelasan ini diberikanlah patokan-patokan dasar sehubungan dengan wawasan kemajuan dan sikap kita terhadap kebudayaan asing. Jadi jelaslah bahwa Pasal 32 bukanlah sebuah pasal yang anti-kemajuan, anti-keterbukaan dan tidak mempunyai orientasi ke depan; Pasal 32 justru pasal yang memuat amanat mengenai kemajuan dan wawasan ke depan, mengenai pertanggungjawaban keterbukaan kultural, namun tanpa mau terjerumus ke dalam apa yang dapat disebut sebagai futurisme.

Berdasarkan atas telaah terhadap Penjelasan inilah kita kiranya dapat mengangkat jawaban mendasar terhadap tiga istilah yang masih memerlukan penjabaran maknanya di dalam Pasal 32 UUD 1945, yaitu konsep kebudayaan, konsep memajukan, dan konsep nasional. Mungkin dapat dikemukakan rumusan sebagai berikut:

A. Tentang Kebudayaan dan Kebudayaan Nasional

- Kebudayaan adalah usaha budinya manusia yang menuju kepada kemajuan adab, budaya, dan persatuan serta mempertinggi derajat kemanusiaan.
- Kebudayaan nasional adalah kebudayaan bangsa yaitu kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya, yang menuju kepada kemajuan adab, budaya, dan persatuan serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

B. Tentang Usaha Memajukan Kebudayaan dan Mewujudkan Kebudayaan Baru

Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan

persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa.

C. *Tentang Kebudayaan Nasional dan Kebudayaan di Daerah-daerah*

Kebudayaan nasional adalah kebudayaan bangsa yaitu kebudayaan yang tumbuh sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya, yang menuju kepada kemajuan adab, budaya dan persatuan serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Kebudayaan lama dan asli sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa.

Secara mendasar Pasal 32 mengamanatkan konsep kebudayaan yang diletakkan pada usaha budi manusia, yang sifatnya memajukan dan mempersatukan, serta mempertinggi derajat kemanusiaan. Dengan perkataan lain suatu konsep kebudayaan yang didasarkan kepada wawasan kemanusiaan, wawasan kemajuan dan wawasan persatuan kebangsaan. Di dalam konsep tersebut terkandung suatu pengertian mengenai kebudayaan sebagai hal dinamis, organis.

Dengan mengacu kepada sifat dasar kodrat manusia maka kebudayaan itu sifatnya universal, yaitu suatu aktualisasi dari "*het algemeen menselijke*." Hubungan antara konsep kebudayaan yang sifatnya umum ini dengan kebudayaan nasional atau kebudayaan bangsa adalah sejajar dengan hubungan antara wawasan kemanusiaan dan wawasan kebangsaan. Kebangsaan Indonesia adalah kodrat alamnya manusia-manusia Indonesia. Kebudayaan bangsa merupakan aktualisasi dari kebudayaan kemanusiaan tersebut. Kebudayaan dengan demikian menjadi titik-temu dari segala kebhinnekaan yang ada di dalam masyarakat.

Pasal 32 bukanlah suatu pasal yang tidak menyadari adanya masalah-masalah yang pelik dan kadang-kadang dipandang sebagai dilema yang tak terpecahkan. Namun Pasal 32 berusaha mendamaikan kompleksitas yang ada dengan mencari titik-temunya yang tidak lain adalah pengertian dan proses kebudayaan itu sendiri. Problematik mendasar yang secara dialektikal dijangkit oleh Pasal 32 ini adalah problematik antara kebudayaan di daerah-daerah di satu pihak dengan usaha ke arah kesatuan kebudayaan (kebudayaan nasional Indonesia) di lain pihak; juga problematik antara archaisme di satu pihak dan futurisme di lain pihak. Problematik lain yang dijangkit di dalam pasal ini adalah problem titik awal dari usaha membangun kebudayaan Indonesia sebagai

kebudayaan baru, di mana seolah-olah manusia dihadapkan kepada pertanyaan dikotomis (semu) sehingga Toynbee mengatakan bahwa proses lahirnya kebudayaan baru tersebut adalah bagaikan "between two worlds: once dead and the other is yet to be borne." Mengenai awal inisial dari proses tumbuhnya kebudayaan nasional Indonesia sebagai kebudayaan baru, Pasal 32, seperti telah diulas di depan, menegaskan bahwa awal kebudayaan baru itu terdapat di dalam kebudayaan yang sudah tumbuh di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Pasal 32 menegaskan asas *kontinuitas*. Maka itu kebudayaan-kebudayaan ini terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Ia merupakan awal dan selanjutnya menjadi partes integrales yang dinamis, organis, evolutif dari kebudayaan Indonesia. Dengan menegaskan posisi kebudayaan lama, asli, dan kebudayaan di daerah-daerah itu dalam kebudayaan nasional, Pasal 32 mengamanatkan bahwa kebudayaan nasional itu haruslah sesuai dengan sifat dasar masyarakat kebudayaan Indonesia, yaitu sifat *bhinneka tunggal ika* dan sifat kenusantaraan. Ini adalah asas konsentrisitas, Pasal 32 juga memberikan pedoman yang sifatnya mendasar mengenai soal lama dan baru, mengenai konsep maju dan keterbukaan kultural: kebudayaan lama dan asli masuk di dalam perhitungan akan tetapi tidak boleh terjerumus ke dalam *archaisme* yang menolak segala bentuk kemajuan, masa depan dan keterbukaan; dari lain pihak kemajuan dan wawasan ke depan juga perlu diikuti tanpa menjadi terperangkap ke dalam *futurisme*. Kita tidak boleh membangun kebudayaan tertutup. Namun kemajuan dan keterbukaan tersebut ditempatkan di dalam konteksnya kebudayaan bangsa sendiri dan ia harus memajukan adat, budaya dan persatuan, ia mengembangkan dan memperkaya kebudayaan bangsa, dan ia harus mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Dengan perkataan lain di sini terungkap asas akulturasi, dan asas konvergensi.

SANDINGAN DENGAN AJARAN-AJARAN KI HADJAR DEWANTARA

Kalau kita telah mengadakan telaah kontekstual terhadap Pasal 32 dan mencoba mengungkap wawasan dasar yang terkandung di dalamnya dengan mengadakan analisa atas Penjelasan terhadap Pasal 32 itu secara analitikal maupun secara integral (analitikal, yaitu telaah kalimat demi kalimat; integral, yaitu telaah terpadu) dan kemudian kita membandingkan dengan beberapa wawasan Ki Hadjar Dewantara mengenai kemanusiaan, kebangsaan dan kebudayaan, yang tentu saja dilandaskan atas wawasan Ki Hadjar mengenai kodrat alam Illahi, akan dapat kita lihat betapa terdapat kesejalaran pandangan antara wawasan-wawasan yang terkandung dan menjiwai Pasal 32 tersebut dengan ajaran-ajaran Ki Hadjar mengenai kebudayaan, terkait dengan ajaran-ajaran Ki Hadjar mengenai kodrat alam, kemanusiaan, kebangsaan dan kebudayaan itu, yang sudah diulasnya sejak tahun 1930-an. Untuk mempermudah perbandingan ini baiklah di kemukakan secara singkat pokok-pokok ajaran Ki Hadjar.

Wawasan dan Ajaran Ki Hadjar mengenai Kodrat Alam

Pemikiran Ki Hadjar yang dapat disebut sebagai pangkal dan dasar di atas mana selanjutnya dapat dibangun dan ditemukan titik-titik pertemuan adalah wawasannya mengenai kodrat alam Illahi. Di dalam ajaran ini terkandung suatu wawasan bahwa segala sesuatu itu masing-masing mempunyai kodrat sebagai sifat dasarnya. Alam semesta, flora dan fauna, tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia, masing-masing mempunyai kodrat alamnya.

Di dalam ajaran Ki Hadjar, kodrat adalah *kasunyatan* dasar. Namun di dalam ajaran Ki Hadjar apa yang dinamakan kodrat bukanlah hal yang statis. Kodrat itu mengalami perkembangan, pertumbuhan, gerak, evolusi, di sepanjang jalannya alam dan zaman.

Tidak jarang Ki Hadjar disalah-mengerti sehingga dipandang sebagai penganut dari aliran *naturalisme* yang sekular dan bahkan ada yang mengira Ki Hadjar sebagai penganjur ajaran Naturalisme yang atheistik. Perkiraan seperti itu tidaklah benar. Itulah sebabnya maka yang dinamakan kodrat tersebut diungkapkan sebagai kodrat alam Illahi, maksudnya kodrat alam yang diciptakan oleh Tuhan. Ia adalah sifat dasar yang hakiki yang diadakan oleh Pencipta. Ki Hadjar mempunyai wawasan yang religius, dalam arti yang sesungguhnya-sungguhnya, yaitu: religi yang artinya dari kata *religare*, ialah mengikat lagi hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ki Hadjar mempunyai kesadaran mendasar akan ikatan dan hubungan yang ada antara manusia dengan Tuhan, antara kodrat dengan Tuhan.

Berdasarkan pengamatan atas evolusinya semesta dunia ini, maka Ki Hadjar memandang kodrat manusia sebagai kodrat yang tertinggi di antara berbagai ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini, terutama karena manusia adalah makhluk yang berbudi. Kemanusiaan mempunyai tempat yang sentral di dalam konstelasi kodrat alam. Manusia bukanlah sekedar entitas kosmis, akan tetapi manusia adalah entitas kultural. Dengan budi yang ada padanya itulah maka manusia adalah entitas kultural. Di dalam dan dengan manusia itulah apa yang dinamakan natur mengalami transformasi menjadi kultur. Kultur atau kebudayaan adalah segala hasil buah budi manusia, sebagai bagian dari evolusinya kodrat kemanusiaan sesuai dengan kodrat alamnya di dalam perkembangan alam dan zaman yang terjadi secara terus-menerus. Kemanusiaan merupakan *kasunyatan* yang amat sentral.

Pemikiran dan Ajaran Ki Hadjar Dewantara tentang Kemanusiaan

Kemanusiaan merupakan suatu pemikiran yang radikal dan sentral. Radikal dalam arti konsep kemanusiaan itu merupakan akar yang menjadi

titik-temu asasi yang mendamaikan hidup, kehidupan maupun penghidupan umat manusia yang telah menjadi kompleks, multiplikatif, dan sarat dengan permasalahan. Manusia merupakan suatu sifat dasar, kodrat alam, yang diciptakan oleh Tuhan, dan berevolusi di sepanjang keadaan alam dan zaman, terungkap di dalam sifat, bentuk, isi dan irama yang berubah-ubah. Dalam manusia inilah tumbuh dan berkembang kebudayaan, terutama karena manusia itu adalah makhluk yang istimewa, yaitu makhluk yang berbudi. Apa yang dinamakan adab kemanusiaan di dalam pemikiran Ki Hadjar Dewantara merupakan acuan yang amat mendasar, dalam pengertian bahwa apa pun yang dikembangkan oleh manusia dalam bidang apa pun juga harus selalu sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Dalam pengertian ini maka perkembangan tersebut akan merupakan manifestasi dari kebudayaan. Tidaklah mengherankan apabila Ki Hadjar Dewantara lazim dipandang sebagai seorang humanis. Ini perlu diartikan secara khusus, sebab istilah humanisme ataupun humanis tersebut mempunyai tafsir dan aliran yang bermacam-macam. Ki Hadjar Dewantara dapat disebut sebagai seorang humanis, dalam pengertian bahwa manusia dan kemanusiaan merupakan acuan dasar di dalam ajaran dan pemikirannya.

Banyak naskah yang mengungkapkan ajaran Ki Hadjar Dewantara mengenai hal ini, seperti misalnya terungkap di dalam diskusinya dengan Jonkman, di dalam Asas-asas Pendirian Tamansiswa dan di dalam berbagai uraian lainnya. Akan tetapi tampaknya refleksi Ki Hadjar Dewantara mengenai Pancasila, yang ditulisnya di dalam naskahnya pada tahun 1948, dapat dipandang sebagai dokumentasi yang memuat ajaran Ki Hadjar Dewantara mengenai kemanusiaan itu. Bagi Ki Hadjar Dewantara, Pancasila menggambarkan keluhuran sifat hidup manusia. Berkatalah Ki Hadjar Dewantara:

Meresapkan isi, maksud dan tujuan Pancasila merupakan suatu konfrontasi antara diri kita dengan pusat budi atau geweten kita sendiri, seolah-olah kita melihat ke dalam kaca benggala dan melihat di situ gambar-gambar badan dan wajah kita sewajarnya, yang menunjukkan beberapa keindahan dan keburukan, kebenaran dan kesalahan, kebersihan dan kekotoran yang ada pada tubuh kita. Memang sebenarnya Pancasila kita itu mengajarkan dan menunjukkan pada kita, bagaimana seharusnya kita berpendirian, bersikap dan bertindak, tidak saja sebagai warga negara yang setia, melainkan juga sebagai manusia yang jujur dan bijaksana.

Di dalam bagian lain dari naskah itu dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara:

Bahwa di dalam alam dunia ini manusia mempunyai kedudukan yang paling tinggi, istimewa, tiadalah yang akan menyangkal.

Kesimpulan tentang kedudukan hidup manusia teranglah, yaitu bahwa sari-sari dan pokoknya tidak lain daripada dua pangkal sifat tadi, yaitu keiuhuran dan kehalusan. Dah inilah yang disebut perikemanusiaan, seperti yang menjadi salah satu dasar Pancasila kita dan bagi saya sendiri boleh dianggap dasar yang paling luas dan paling dalam.

Keluhuran dan kehalusan adalah nama-nama sifat, belum menunjuk bentuk, belum pula menyebut isi, belum pula menggambarkan iaku irama daripada tiap orang. Manusia yang

beradab dan susila, yakni luhur dan halus budinya, tentulah mengerti akan kebenaran ajaran itu.

Menegaskan pandangannya mengenai Pancasila, Ki Hadjar Dewantara berkata sebagai berikut:

Menurut saya sendiri, maka pokok sarinya Pancasila kita itu ialah perikemanusiaan, sedangkan dengan cara deduktif dapatlah dasar pokok ini kita pecah menjadi dasar lainnya. Atau apabila kita berpikir Induktif dasar perikemanusiaan itu kita letakkan di belakang sendiri sebagai kesimpulan umum. Imbangan antara dasar yang kita anggap pokok atau pangkal itu, dengan dasar lain-lainnya lalu dapat tergambar demikian:

1. Ketuhanan menurut adab perikemanusiaan,
2. Kebangsaan yang berdasar kemanusiaan,
3. Kedaulatan rakyat dengan mengingat syarat-syarat kemanusiaan, dan
4. Keadilan sosial dengan tuntutan adab kemanusiaan.

Sebagai seorang yang menghayati alam pikiran sintetis integralistik, sampai-lah pula Ki Hadjar Dewantara kepada kesimpulan berikut di dalam naskah tentang Pancasila yang terbit pada tahun 1948 itu:

Kemerdekaan yang sejati (tidak hanya dalam arti kebebasan, namun pula dalam artinya keharusan untuk memelihara tertib damainya ciri dan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama, berdasarkan imbangan yang harmonis antara hidup pribadi dan masyarakat) adalah sila yang pokok pula dalam pengertian perikemanusiaan. Janganlah pula dilupakan bahwa kebudayaan, baik yang lahir maupun yang batin, yang mengandung arti keluhuran dan kehalusan dalam segala sifat dan bentuk, serta isi dan laku hidup manusia seutuhnya, termasuk pula dalam arti kemanusiaan.

Dengan uraian di atas cukuplah tujuan saya tentang arti perikemanusiaan, sebagai salah satu dari lima dasar Pancasila yang menurut hemat saya adalah yang utama. Akan tetapi sebagai *Kesatuan Lima yang bulat*, tidaklah dasar yang satu bisa diabaikan atau dikurangi, dengan tidak mengurangi sifat kebulatan itu, malahan bisalah tiap-tiap sila tadi dijadikan pokok-pangkal uraian, menurut keyakinan tiap orang. Tetapi tiap-tiap uraian sukar akan berhenti sebelum mencapai pemecahannya sendiri, yaitu: Manusia Indonesia merdeka yang bertanggung jawab, tunduk ikhlas kepada Tuhannya, didukung oleh masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Pemikiran dan Ajaran Ki Hadjar Dewantara mengenai Kebudayaan

Pemikiran Ki Hadjar Dewantara mengenai manusia dan kemanusiaan bukanlah suatu pemikiran yang statis. Kemanusiaan merupakan konsep yang dinamis, evolutif, organis. Dalam kaitan ini maka pemikiran dan ajaran tentang kebudayaan tidak lain adalah kelanjutan dari pemikiran dan ajaran Ki Hadjar Dewantara mengenai kemanusiaan itu. Banyaklah naskah-naskah yang memuat pemikiran Ki Hadjar Dewantara mengenai kebudayaan itu. Dari salah satu naskah itu dapat kita baca ajaran Ki Hadjar Dewantara mengenai kebudayaan:

Menurut perkataannya, maka kebudayaan berarti *buah budi manusia*, sedangkan bila kita mengingat cara terjadinya atau lahirnya kebudayaan, bolchlah kebudayaan itu kita namakan:

kemenangan atau hasil perjuangan hidup manusia. Budi itu tidak lain ialah jiwa yang sudah masak, sudah cerdas dan oleh karenanya sanggup dan mampu mencipta. Karena budi manusia itu mempunyai dua sifat yang istimewa yaitu sifat luhur dan sifat halus, maka segala ciptaannya senantiasa mempunyai sifat luhur dan halus pula, sesuai dengan pelajaran etika dan estetika.

Sebagai kemenangan atas hasil perjuangan hidup manusia, yaitu dalam perjuangannya terhadap dua kekuatan yang kuat dan abadi, yakni alam dan zaman, dalam perjuangan mana manusia tetap dan terus-menerus berhasrat mengatasi segala pengaruh alam dan zaman yang menyukarkan hidupnya lahir dan batin, maka kebudayaan itu selain bersifat luhur dan halus (atau indah), juga selalu mempunyai sifat *menggampangkan* hidupnya serta pula memperbesar *hasil* hidupnya. Ini berarti memberi kemajuan hidup dan penghidupan kepada manusia. Inilah kejayaan hidup manusia. Kemajuan hidup dan penghidupan manusia pada umumnya tampak sebagai keinginan, kesanggupan dan kemampuan untuk mewujudkan hidup yang serba tertib dan damai; tertib dalam sifatnya lahir dan damai dalam sifatnya batin; dan inilah yang mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan.

Sebagaimana halnya dengan pemikiran dan ajarannya mengenai kemanusiaan, maka ajaran Ki Hadjar Dewantara mengenai kebudayaan juga bukanlah ajaran yang sifatnya statis. Berkatalah Ki Hadjar Dewantara:

Kebudayaan itu tidak pernah mempunyai bentuk yang abadi, tetapi terus-menerus berganti-ganti wujudnya; ini disebabkan karena berganti-gantinya alam dan zaman. Kebudayaan yang dalam zaman lampau menggampangkan dan menguntungkan hidup, boleh jadi dalam zaman sekarang menyukarkan dan merugikan hidup kita. Itulah sebabnya kita harus senantiasa menyesuaikan kebudayaan kita dengan tuntutan alam dan zaman baharu.

Mengenai hidup dan tumbuhnya kebudayaan ini, di dalam naskah lain Ki Hadjar Dewantara mengatakan berikut ini:

Hidup tumbuhnya segala kebudayaan itu seperti hidup tumbuhnya manusia, Kebudayaan itu pada waktunya lahir, tumbuh, maju, berkembang, berbuah, menjadi tua, mundur, sakit-sakitan dan mati. Kebudayaan, bila bertemu dengan kebudayaan lain, dapat berkawan atau berlawanan; jika berkawan untunglah, karena ada asosiasi *manasuka*, dan ini memberi kemajuan. Jika berlawanan, lalu kadang-kadang berakibat pengaruh paksaan (kultur-imperialisme) dan ini dapat menyebabkan kemunduran atau kematian kebudayaan yang asli.

Maka dari itu manusia harus selalu berusaha membaca alam dan zaman untuk dapat menumbuhkan kebudayaan. Maka berkatalah Ki Hadjar Dewantara:

Hukum seleksi terdapat pula dalam hidupnya kebudayaan; apa yang sehat dan kuat gampang terus hidup; apa yang lemah dan sakit mudah mati dengan sendiri. (Ingat akan adanya tekanan atau kekangan atau faktor-faktor yang menyalahi kodrat). Kebudayaan harus dapat hidup menurut kodrat iradatnya sendiri, bebas, merdeka.

Ditopang oleh pemikiran mengenai kebudayaan sebagai perkembangan kemanusiaan itu, maka Ki Hadjar Dewantara melihat secara jernih posisinya kebudayaan bangsa Indonesia. Dan berkatalah Ki Hadjar Dewantara:

Di zaman kebingungan ini seharusnya keadaan kita sendiri, kultur kita sendiri, kita pakai sebagai penunjuk jalan untuk mencari penghidupan baru, yang selaras dengan kodrat kita

dan akan memberi kedamaian dalam hidup kita. Dengan keadaan bangsa kita sendiri, kita lalu pantas berhubungan dengan bangsa-bangsa lain.

Ajaran Ki Hadjar Dewantara mengenai kebudayaan ini, baik dalam arti fundamental universal maupun dalam hubungannya dengan kebudayaan bangsa itu, memperoleh pengukuhan di dalam Pasal 32 UUD 1945, di mana dinyatakan berikut ini: Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Adapun di dalam Penjelasan atas pasal tersebut dikemukakanlah keterangan berikut ini:

Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Pemikiran dan Ajaran Ki Hadjar Dewantara mengenai Kebangsaan

Kebangsaan merupakan ajaran Ki Hadjar Dewantara yang amat fundamental, baik sebagai bagian dari wawasan kemanusiaan, maupun terutama apabila kita pandang Ki Hadjar Dewantara sebagai pejuang pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Terlibat dengan simpang-siurnya gerakan kemerdekaan, baik karena orientasi kedaerahan, keagamaan, keturunan, golongan-golongan ataupun ideologi-ideologi, Ki Hadjar Dewantara menumbuhkan wawasan kebangsaan sebagai dasar radikal dari kebangkitan nasional, dari perjuangan pergerakan menuju Indonesia merdeka. Ki Hadjar Dewantara menampilkan kebangsaan sebagai ideologi perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Dalam kaitan ini maka ajaran kebangsaan Ki Hadjar Dewantara adalah ajaran yang ingin mengatasi segala perbedaan dan diskriminasi yang dapat tumbuh dan terjadi. Maka itulah wawasan kebangsaan tersebut tidak dilandasi oleh orientasi daerah, suku, keturunan, ataupun keagamaan. Kebangsaan tidaklah mempunyai konotasi etnis, rasial biologis, status sosial ataupun keagamaan. Ideologi kebangsaan inilah yang diterapkannya secara konsekuen manakala Soewardi Soeryaningrat bersama dengan Dr. Tjipto dan Douwes Dekker mendirikan Indische Partij pada tahun 1912. Partai ini adalah organisasi politik yang radikal, menuntut kemerdekaan, dan memakai ideologi kebangsaan. Hal ini merupakan bukti yang amat jelas bahwa kebangsaan itu tidaklah diperkaitkan dengan pertimbangan etnis, kepribumian, keaslian, kedaerahan ataupun keagamaan. Ajaran kebangsaan inilah yang selanjutnya tumbuh dan berkembang sebagai ideologi perjuangan, sebagaimana tampak di dalam Sumpah Pemuda. Bahkan ajaran kebangsaan ini pula yang selanjut-

nya mengantarkan perjuangan rakyat Indonesia mencapai kemerdekaannya. Diproklamasikanlah kemerdekaan kita itu dengan kalimat berikut ini: "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Proklamasi 17 Agustus itu pun segera diikuti oleh pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kebangsaan, dengan ideologi kebangsaan sebagai dasarnya dan konstitusi kebangsaan sebagai undang-undang dasarnya. Pancasila dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang juga merupakan ideologi nasional kita, pada dasarnya adalah suatu formulasi dari ideologi kebangsaan itu, dari wawasan kebangsaan kita itu.

Maka itu walaupun nasionalisme yang bangkit di berbagai penjuru dunia ini kadangkala dilihat sebagai akibat dan kelanjutan dari Revolusi Perancis serta nasionalisme di Eropa, hal tersebut kiranya perlu kita tanggapi dengan hati-hati. Memang benar bahwa Revolusi Perancis dan segala pemikiran mengenai kemerdekaan dan tentang nasionalisme itu ikut memacu perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia, namun kebangsaan Indonesia itu tidaklah dapat kita katakan sebagai bersumber, apalagi sebagai subsistem dari nasionalisme yang terjadi di Eropa tersebut.

Tentang kebangsaan ini berkatalah Ki Hadjar Dewantara di dalam naskah yang ditulisnya pada tahun 1932 sebagai berikut:

Rasa kebangsaan adalah sebagian dari rasa kebatinan kita manusia, yang hidup dalam jiwa kita dengan disengaja. Asal mulanya rasa kebangsaan itu timbul dari Rasa Diri, yang terbawa dari keadaan perikehidupan kita, lalu menjalar menjadi Rasa Keluarga; Rasa ini terus jadi Rasa Hidup bersama (rasa sosial).

Adapun rasa kebangsaan itu sebagian dari atau sudah terkandung di dalam arti perkataan Rasa Hidup bersama-sama itu, sedangkan adakalanya rasa kebangsaan itu berwujud dengan pasti sebagai angan-angan yang kuat dan mengalahkan segala perasaan lain-lainnya. Wujudnya rasa kebangsaan itu umumnya ialah dalam mempersatukan kepentingan bangsa dengan kepentingan diri sendiri; nasibnya sendiri; kehormatan bangsa ialah kehormatan diri, demikianlah seterusnya.

Bahwa kebangsaan merupakan ideologi perjuangan yang tegas dan mendasar, hal ini dapat kita lihat dari naskah pidato rapat umum Tamansiswa di Malang pada tanggal 2 Februari 1930, di mana Ki Hadjar Dewantara antara lain memberikan uraian mengenai Tamansiswa dengan Kebangsaan. Berkatalah Ki Hadjar Dewantara:

Di dalam waktu di mana segenap rakyat sedang memikirkan nasib kebangsaannya, maka hal itu sebagai suatu kenyataan oleh Tamansiswa dibuat dasar bagi usahanya. Dan Tamansiswa tiadalah sekali-kali berdasarkan kebangsaan yang menyebelah kepada satu golongan, umpamanya berdasarkan kebangsaan Jawa. Bukti kenyataannya pun sudah boleh buat menyangkal tuduhan semacam itu.

Sebagai sudah saya katakan tadi, Tamansiswa sudah dapat berkembang di Sumatera dan juga di Borneo. Sedang pengharapan masih terkandung ialah supaya seluruh Indonesia bisa menerima Tamansiswa. Dan kita memang percaya, akan demikian juga kejadiannya.

Ajaran Ki Hadjar Dewantara mengenai kebangsaan itu terungkap pula secara kuat dan jernih rasional ketika kepadanya dihadapkan masalah mengenai golongan minoritet. Mengenai hal ini berkatalah Ki Hadjar Dewantara:

Sebenarnya pengertian minoritet itu bagi kami masih berbau kolonial, sekalipun lahir dan tumbuhnya serta terpakainya perkataan tadi ada di dalam zaman Indonesia sudah merdeka. Merdeka sebagai negara dan sebagai bangsa. Merdeka dengan memakai dasar Pancasila, di antaranya dasar demokrasi dan keadilan sosial. Di dalam negara yang sedemikian, maka seharusnya hanya ada perbedaan antara warga negara dan orang asing.

Ajaran kebangsaan itu menentang segala bentuk diskriminasi. Bagi Ki Hadjar Dewantara tidak ada pengkotakan antara warga negara kelas satu dan kelas dua, asli atau bukan asli.

Dalam semangat persatuan kebangsaan seperti itu pula Ki Hadjar Dewantara berbicara mengenai kebudayaan di daerah-daerah. Berkatalah Ki Hadjar Dewantara antara lain sebagai berikut:

Kesatuan kebudayaan berarti kesamaan sifat dan bentuk-bentuk yang pokok dalam hidup dan kehidupan rakyat di seluruh negeri itu, dan sekali-kali tidak mengharuskan adanya kesamaan dalam segala isi dan cara atau bagian-bagian hidup dan kehidupan segenap rakyat, karena biasanya di samping kesamaan alam dan zaman yang pokok-pokok masih ada perbedaan-perbedaan keadaan di daerah-daerah yang sangat mempengaruhi hidup dan kehidupan.

Perbedaan-perbedaan keadaan di daerah-daerah tadi makin lama makin akan berkurang apabila hubungan antara daerah-daerah tersebut baik yang bersifat lahir (kereta api, radio dan lain-lain) maupun batin (semangat) semakin dipermudah; dengan begitu kemajuan ke arah kesatuan kebudayaan, dalam zaman yang serba modern ini, pasti akan terjadi dengan sendiri dan dapat dipercepat dengan sengaja.

Di bagian lain Ki Hadjar Dewantara menegaskan:

Jangan pula dilupakan adanya anasir-anasir kebudayaan yang bernilai tinggi di daerah-daerah, bahkan di kota-kota, dan ingatlah selanjutnya bahwa kebudayaan nasional itu sebenarnya tumbuh atau terbentuk dengan memakai bahan-bahan dari kebudayaan daerah, sedangkan kebudayaan daerah itu senantiasa dapat isi dari kebudayaan kota-kota.

Secara tegas Ki Hadjar Dewantara mengutarakan pendapatnya mengenai posisi kebudayaan di daerah-daerah itu:

Tetapkanlah sebagai dasar kesatuan bahwa kebudayaan nasional Indonesia ialah segala puncak-puncak dan sari-sari kebudayaan yang bernilai di seluruh kepulauan, baik yang lama maupun yang ciptaan baru, yang berjiwa nasional. Dalam pada itu janganlah segan-segan:

- a. menghentikan pemeliharaan segala kebudayaan lama yang merintangi kemajuan hidup perikemanusiaan.
- b. meneruskan pemeliharaan kebudayaan lama yang bernilai dan bermanfaat bagi hidup perikemanusiaan, di mana perlu dengan dipcrubah, dipcrbaiki, discsuaikan dengan alam dan zaman baru.

Dalam pada itu Ki Hadjar Dewantara memberikan pesan sebagai berikut:

Sedikitnya janganlah menganggap daerah-daerah yang bukan daerahnya sendiri itu sebagai konkuren. Akulah apa saja yang bernilai dan dapat memperkaya dan memperkembang hidup rakyat kita sebagai kebudayaan nasional.

Dan kemudian masih lagi Ki Hadjar Dewantara memberikan ulasan mendasar mengenai masalah hubungan antara daerah dan cita-cita persatuan-kesatuan itu:

Baik dalam memelihara maupun dalam mewujudkan cita-cita itu tampaklah sebagai pokok dari kesibukan rakyat kita, betapa besarnya hasrat untuk menyatukan segala apa yang perlu dan dapat dipersatukan. Di lapangan ketatanegaraan dan pemerintahan negeri, di lapangan sosial dan ekonomi, di lapangan pendidikan dan keagamaan, di lapangan kebudayaan, pendek kata di semua lapangan diadakan tindakan-tindakan untuk menyatukan hidup dan penghidupan rakyat pada umumnya Masalahnya ialah bagaimana sebaiknya kita mempersatukan kepentingan-kepentingan yang beraneka-warna itu hingga mencapai sifat-sifat nasional yang satu, namun tidak dengan memperkosa sifat-sifat kedaerahan apabila perkosaan itu dapat merugikan rakyat. Dengan perkataan lain, bagaimanakah kita seharusnya menetapkan hubungan-hubungan dan imbalan-imbalan antara kepentingan-kepentingan daerah dan kepentingan-kepentingan nasional. Agar lebih luas dan lebih mendalam pandangan kita maka baiklah kepentingan-kepentingan itu kita perluas dan perdalam menjadi kepentingan-kepentingan kebudayaan dalam sifatnya yang wutuh.

Walaupun ajaran kebangsaan itu merupakan ideologi perjuangannya, namun Ki Hadjar Dewantara tidak mengajarkan nasionalisme sempit, tidak mengajarkan apa yang dikenal sebagai *chauvinisme*. Hal ini disebabkan antara lain karena Ki Hadjar Dewantara secara mendasar melihat kemanusiaan sebagai titik-temu yang radikal, sehingga kebangsaan itu merupakan bagian dan ungkapan dari evolusi kodrat kemanusiaan tersebut. Akan tetapi di situ pulalah dasarnya hak kemandirian bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang berdaulat dan merdeka, duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Karena itulah maka penjajahan merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran kemanusiaan maupun kebangsaan, secara kodrati. Dengan demikian maka ajaran kebangsaan Ki Hadjar Dewantara itu juga mempunyai pendasaran kultural yang kuat. Ajaran kebangsaan sebagai ideologi pergerakan perjuangan kemerdekaan itu memperoleh landasan kultural yang mendalam, sehingga pergerakan kemerdekaan dan pembangunan bangsa itu pun merupakan bagian daripada kebudayaan sebagai perjuangan. Dalam rangka inilah, sebagai manusia aktivis, sebagai insan yang kontemplatif aktif, Ki Hadjar Dewantara melihat pendidikan sebagai wahana kebudayaan, dan pendidikan kebangsaan sebagai wahana pergerakan kemerdekaan kebangsaan serta pembangunan kebudayaan kebangsaan. Ajaran-ajaran Ki Hadjar Dewantara mengenai pendidikan dapatlah kita pandang sebagai terapan operatif dari ajaran-ajaran pokoknya mengenai kemerdekaan, kebangsaan, kemanusiaan dan kebudayaan. Pemikiran dan ajaran itu pulalah yang dituangkannya ketika Ki Hadjar Dewantara membentuk Taman-siswa.

Ajaran Ki Hadjar Dewantara mengenai Dinamika Kebangsaan dan Kebudayaan

Kodrat kemanusiaan bukanlah kenyataan yang statis, akan tetapi kenyataan yang dinamis evolutif. Demikian pula halnya dengan kebangsaan dan kebudayaan. Namun demikian Ki Hadjar Dewantara dihadapkan pula kepada kebudayaan dan kebangsaan sebagai hal yang kompleks dan majemuk, dan tidak jarang simpang-siur, berbenturan yang satu dengan yang lain. Tidak saja kompleksitas horisontal (yaitu dengan mengingat adanya bangsa-bangsa di dunia), akan tetapi juga kompleksitas vertikal (adanya perbedaan tingkat, bobot dan kekuatan), dan kompleksitas temporal (adanya pengaitan dengan masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang). Menghadapi kenyataan inilah Ki Hadjar Dewantara mengemukakan pemikiran serta ajarannya tentang dinamika pertumbuhan kebangsaan dan kebudayaan, yang lazim dikenal sebagai asas Tri-Kon, ialah: Kontinuitet, Konvergensi dan Konsentrisitas. Di dalam sebuah naskah yang ditulisnya pada tahun 1937, Ki Hadjar Dewantara memberikan uraian sebagai berikut:

Bersambung-sambungannya zaman silam dan zaman yang menyusul itu bersifat kontinyu, yakni tidak berputus-putus; kodrat ini harus menjadi penunjuk dalam melakukan pembaharuan. Kontinuitet itu memudahkan, mempercepat dan menyempurnakan laku (kecerdasan); sebaliknya pembaharuan yang sekonyong-konyong itu akan menyukarkan, melambatkan dan mengeruhkan kemajuan.

Sesudah kontinuitet dilakukan haruslah ingat kepada konvergensi, yakni kebudayaan dari satu bangsa itu tak boleh dan memang tak dapat terus murni berdiri sendirian, akan tetapi harus dan akan bersambungan dengan kebudayaan lain-lain bangsa. (Purisme dan isolasi itu menuju ke kematian.)

Konvergensi dengan sendirinya berarti tidak hanya meniru belaka atau ngeblak pola (copieren), tetapi *urun udu*, yakni membawa bekal modal untuk bekerja bersama-sama.

Sesudah kontinuitet dan konvergensi lalu datanglah asas kebudayaan yang ke-3, yaitu konsentrisiteit, yang berarti bahwa alam manusia itu bersusun-susun. Persatuan yang kuat dan sempurna itu bukan persatuan yang sama bagian-bagiannya, akan tetapi yang bagian-bagiannya itu (walaupun berjenis-jenis sifatnya) dalam perhubungannya dan timbangannya bersifat patut, runtut, harmonis.

Kebudayaan sebagai proses humanisasi yang evolutif, organis, dialektikal, yang tumbuh di atas jalur kontinuitas, konsentrisitas, konvergensi dan akulturasi, yang secara nasional tumbuh sesuai dengan sifat dasar bhinneka tunggal ika dan kenusantaraan, yang lingkupnya mencakup usaha pengembangan budi (mind, spirit, kebudayaan batin) maupun usaha pengembangan adab (gestaltung, perangkat, civilisation, kebudayaan lahir) itulah pesan dasar yang terkandung di dalam Pasal 32. Karena itu kebudayaan yang tumbuh maupun pengembangannya tidak boleh melupakan dasar-dasar Ketuhanan Yang Mahaesa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RELEVANSI DAN DINAMIKANYA

Sarasehan Kebudayaan yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1986 oleh Lembaga Pengkajian Kebudayaan Sarjana Wiyata Tamansiswa di Yogyakarta sampai kepada suatu kesepakatan bahwa ajaran-ajaran Ki Hadjar Dewantara masih mempunyai relevansi terhadap problem-problem saat ini dan di masa yang akan datang. Prof. Dr. Teuku Jakob pada kesempatan itu menunjukkan betapa wawasan Ki Hadjar Dewantara mengenai kebudayaan adalah wawasan yang amat maju apabila diukur dari zamannya dan bahkan diukur dengan perkembangan pemikiran saat ini. Dewasa ini tumbuh suatu wawasan kebudayaan baru yang didasarkan atas pendekatan biologiko-kultural, dan memang makin mengungkapkan bahwa kenyataan hidup dan kehidupan manusia itu baik secara individual maupun kolektif adalah kompleks, interdependen, dinamik, organik, dan bhinneka tunggal ika.

Apabila wawasan Ki Hadjar Dewantara masih mempunyai relevansi, maka dapatlah kiranya dikatakan pula bahwa Pasal 32 UUD 1945 itu pun tentu masih mempunyai relevansi, baik ditinjau dari kedudukan konstitusionalnya maupun ditinjau dari segi substansi wawasannya mengenai kebudayaan nasional Indonesia. Bahkan tidak mustahil wawasan dasar Pasal 32 tersebut jauh lebih maju dari pemikiran-pemikiran kebudayaan yang ada hingga saat ini.

Alangkah janggalnya apabila saat ini kita masih membiarkan diri kita terlibat dengan problem-problem dikotomikal dan kuasi-dilema mengenai lama dan baru, mengenai Timur dan Barat, mengenai tradisional dan modern, mengenai kedaerahan dan kebangsaan, mengenai batin apa lahir. Sikap-sikap mendasar terhadap masalah-masalah tersebut secara bijaksana namun fundamental sudah dituangkan di dalam Pasal 32 itu. Alangkah janggalnya pula apabila kita saat ini masih bertanya-tanya apakah bangsa kita mempunyai konsep mengenai kebudayaan. Konsep itu ada. Wawasan itu ada. Dan bahkan terdapat di dalam Konstitusi kita. Pembangunan kebudayaan merupakan amanat konstitusi.

Memang yang amat penting adalah dinamika Pasal 32 tersebut, dan untuk keluarga Tamansiswa berarti juga dinamikanya ajaran-ajaran Ki Hadjar Dewantara. Yang penting bukan lagi menjawab pertanyaan: menolak yang lama atau tidak, membuat yang baru atau tidak, mengembangkan kebudayaan di daerah-daerah atau tidak, tertutup atau terbuka. Ini semua adalah soal-soal lama, tantangan-tantangan lama yang sudah dijawab, sehingga bagi generasi saat ini terasa menjadi berbau kuno, dan bertele-tele. Masalah aktual modern sekarang ini adalah menentukan: elemen-elemen mana saja dari yang lama itu harus kita buang dan mana yang masih harus dikembangkan terus; elemen-elemen mana dari yang baru harus dikembangkan-tumbuhkan dan mana harus dianggap kurang relevan; pengaruh-pengaruh asing manakah yang

harus kita terima untuk memperkaya kebudayaan bangsa kita saat ini dan di masa mendatang, mengembangkan kebudayaan bangsa kita, yang memajukan peradaban, kebudayaan, persatuan dan mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa kita saat ini dan di masa mendatang, dan pengaruh-pengaruh luar mana yang kita tolak. Inilah tantangan-tantangan dinamika masa kini dan masa mendatang. Untuk itu maka yang penting adalah dihayatinya dan dilaksanakannya pemahaman Pasal 32 tersebut secara kreatif dan operatif.

Sehubungan dengan dinamika Pasal 32 ini maka dapatlah dikemukakan bahwa salah satu tugas besar di dalam pembangunan kebudayaan nasional saat ini adalah tugas menjawab tantangan akulturasi ke-4 yaitu akulturasi kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan global, di mana ekonomi, teknologi dan ilmu menjadi perangkat-perangkat utamanya. Ini adalah tantangan yang membawa serta urgensi masa kini dan masa depan, pertama karena dalam bidang-bidang tersebut peradaban kebudayaan kita masih lemah; kedua, karena pertumbuhan peradaban kebudayaan global tersebut berkembang dengan amat cepat, makin akseleratif, akan tetapi juga menjadi makin kompetitif, dan tidak mustahil menjadi makin selektif dan diskriminatif pula. Namun tentu saja tugas akulturasi ke-4 ini harus pula dilaksanakan dengan memperhatikan seluruh wawasan kebudayaan yang diamanatkan oleh Pasal 32 tersebut, sehingga usaha memajukan ekonomi, teknologi dan ilmu itu haruslah dalam rangka mengembangkan dan memperkaya kebudayaan nasional kita, dalam rangka memajukan adat dan budaya, memajukan persatuan dan mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Secara lebih jelas dapatlah dikemukakan bahwa usaha memajukan ekonomi, teknologi dan ilmu tersebut tidak boleh hanya memperkaya dan mengembangkan kemajuan peradaban golongan manusia saja, tidak boleh merusak ataupun mengakibatkan terjadinya degradasi peradaban dan kebudayaan, tidak boleh memecah persatuan kebangsaan, dan tidak boleh dilakukan kalau itu bersifat memperendah derajat kemanusiaan bangsa kita.

Kiranya memang tidak salah apabila ada yang berkata bahwa fungsi pembangunan kebudayaan adalah untuk memberikan wawasan-wawasan mendasar yang melandasi segala pertumbuhan dan kemajuan di berbagai sektor kehidupan bersama kita ini: ideologi, politik, ekonomi, sosial, kemasyarakatan, pertahanan keamanan, hukum, kehidupan beragama, bahasa, pembangunan daerah dan lain sebagainya lagi.

Apabila hasil akhir dari pembangunan nasional jangka panjang yang pertama ini adalah terwujudnya kerangka landasan pembangunan nasional, maka hal tersebut berarti tumbuhnya sistem-sistem ideologi, politik, ekonomi, kemasyarakatan, pertahanan keamanan, di atas landasan wawasan budaya yang diamanatkan oleh Pasal 32 UUD 1945 ini.

Pengertian pembangunan nasional yang kita artikan sebagai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya pada hakikatnya juga menekankan bahwa pembangunan itu pada hakikatnya adalah hal kebudayaan. Dalam kaitan ini menjadi amat menarik untuk direnungkan dan dipikirkan bahwa pembangunan nasional tersebut lebih lanjut juga dipandang sebagai pengamalan Pancasila, karena di dalam Pancasila itulah termuat nilai-nilai dasar yang menjiwai kebudayaan kita.

Maka mengenai pembangunan dan mengenai Pancasila itu pun sudah seharusnya kita tidak membiarkan diri terjebak ke dalam problem-problem dikotomis dan dilema-dilema semu yang tidak jarang menggoda pemikiran kita. Pengertian manusia seutuhnya di dalam pembangunan nasional itu bukanlah pengertian-pengertian deterministik esensialistik, melainkan pengertian kultural yang lebih bersifat evolutif, organis, dialektikal, eksistensialistik. Pengertian masyarakat Indonesia seluruhnya pun harus pula kita pahami di dalam konteks pengertian yang sama. Inilah artinya kalau kita oleh Soepomo diajak untuk berpikir secara integralistik dinamik.

Pembangunan adalah hal kultural. Ia merupakan proses humanisasi yang aktualisasinya terjadi di dalam kodrat alamnya masyarakat dan rakyat Indonesia; yang isi, bentuk maupun iramanya sesuai dengan sifat-sifat dasar masyarakat Indonesia yaitu kenusantaraan dan bhinneka tunggal ika. Yang melingkupi pembangunan kebudayaan lahir maupun pembangunan kebudayaan batin. Yang tidak secara sewenang-wenang menolak hal-hal lama namun tidak pula menjadi tertutup terhadap kemajuan dan pengaruh-pengaruh dari luar. Pembangunan itu adalah usahanya seluruh rakyat Indonesia, untuk memajukan adab dan budayanya, memperkuat persatuannya, memajukan derajat kemanusiaannya.

Pembangunan adalah hal kebudayaan, karena itu ia berjalan melewati jalur akulturasi, jalur kontinuitas, konsentrisitas, dan konvergensi, dilandasi oleh wawasan kebangsaan dan wawasan kemajuan, diusahakan secara bersama dan dalam kebersamaan. Kebudayaan itu memajukan; kebudayaan itu mempersatukan dan tidak memecah-belah; kebudayaan itu menghargai yang lama tanpa tumbuh menjadi archaisme; kebudayaan itu terbuka untuk maju tanpa tumbuh menjadi futurisme; kebudayaan itu usaha budinya seluruh rakyat Indonesia, maka itu merupakan usaha bersama dalam kebersamaan dan dalam wawasan kerakyatan. Kebudayaan itu mempertinggi derajat kemanusiaan dan tidak sebaliknya merendahkan derajat kemanusiaan bangsa. Kebudayaan itu memajukan adab dan tidak sebaliknya menghasilkan kebiadaban.

Cita-cita Politik untuk Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahap II*

Soepardjo RUSTAM

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai pembangunan jangka panjang tahap kedua adalah berbicara mengenai pesan dan cita-cita. Pesan, karena kurun waktu itu terjadinya masih agak jauh di masa yang akan datang. Tidak mustahil bahwa kita semua yang ikut serta di dalam sarasehan kebudayaan sekarang ini belum tentu akan masih dapat mengalami perkembangan itu nanti. Cita-cita, karena pembangunan nasional jangka panjang di masa yang akan datang itu adalah bagian dari perjuangan kebangsaan kita, dan pembangunan yang akan datang itu pun kita harapkan akan tetap merupakan kesinambungan usaha mewujudkan cita-cita nasional kita, sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat dan maju. Dengan demikian pembangunan politik di masa yang akan datang itu juga harus kita lihat sebagai bagian dari perjuangan mewujudkan cita-cita kebangsaan tersebut. Itulah sebabnya, sebagai pangkal tolak pemikiran dan pandangan kita mengenai kurun waktu tersebut, perlu terlebih dahulu memahami pembangunan politik Indonesia yang tumbuh dari cita-cita kebangsaan Indonesia.

POLITIK SEBAGAI AKTUALISASI CITA-CITA KEBANGSAAN KITA

Wawasan kebangsaan Indonesia merupakan wawasan yang amat penting dalam arti bahwa wawasan tersebut membentuk dan menjiwai sejarah Indonesia Modern. Sudah barang tentu wawasan tersebut mempunyai akar pertumbuhannya dari perkembangan sejarah Indonesia sebelumnya, sudah barang tentu pula bahwa perkembangan itu juga dipengaruhi oleh masuknya unsur-

*Disampaikan pada Sarasehan Tamansiswa, 10 November 1986.

unsur kebudayaan dan peradaban baru khususnya yang datang dari Eropa pada waktu itu. Namun segalanya itu telah diolah secara kreatif pada zaman Kebangkitan Nasional dan dari pertumbuhan tersebut lahirlah wawasan kebangsaan Indonesia. Wawasan kebangsaan ini pula yang menjadi kekuatan yang mengantarkan terus pergerakan kemerdekaan kita, sehingga perjuangan rakyat Indonesia itu sampai kepada Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berdirilah Negara Kebangsaan Indonesia, dengan konstitusi kebangsaan Indonesia, dengan dasar negara dan ideologi Pancasila.

Sebagai peristiwa sejarah, proklamasi, konstitusi dan ideologi bukanlah hal-hal yang berdiri sendiri. Peristiwa besar yang telah melahirkan dan mengukuhkan bangsa Indonesia, yang telah menetapkan serta mencanangkan suatu ideologi nasional, memang tidak terlepas dari proses sejarah yang memangkunya, yaitu zaman Kebangkitan Nasional.

Di sekitar awal dasawarsa abad ke dua puluh ini, muncullah kebangkitan nasional rakyat Indonesia. Walaupun pada mulanya gerakan-gerakan itu masih bersifat majemuk dan terpisah-pisah, namun di dalam perkembangannya menemukan titik-temu yang mendasar.

Pada tahun 1928 dinamika kebangsaan tersebut diungkapkan secara lebih jelas dan tegas di dalam bentuk Sumpah Pemuda, di mana diikrarkan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Di dalam suasana pertumbuhan cita-cita kebangsaan ini pula, mendengunglah lagu Indonesia Raya, yang selanjutnya menjadi lagu kebangsaan kita, sebagai manifestasi simbolik dari cita-cita kebangsaan Indonesia.

Perjalanan Kebangkitan Nasional Indonesia ini mengalami pasang-surut, sebagai akibat dari tumbuh dan berkembangnya bermacam-macam aliran yang secara sadar atau tidak telah menggiring perjalanan historis kebangsaan kita untuk kembali pada suasana dan sifat divergensi dan heterogenitas. Namun demikian, berbagai halangan dapat diatasi, berbagai rintangan dapat dilampaui, dan kebangkitan nasional telah mengantarkan rakyat Indonesia memasuki pintu gerbang Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Dengan selesainya babak kebangkitan nasional, bangsa Indonesia memasuki zaman kemerdekaan, yang tidak lepas dari suasana perjuangan, karena zaman ini merupakan perjalanan bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan kemerdekaan, persatuan dan kesatuan.

Kemerdekaan, kedaulatan, persatuan dan kesatuan adalah suatu anugerah, dan sekaligus adalah suatu tanggung jawab. Cobaan demi cobaan datang, baik dari luar maupun dari dalam, yang membawa serta ancaman,

gangguan, dan hambatan-hambatan. Zaman kemerdekaan bukanlah perjalanan yang tanpa rintangan. Ini terjadi secara berantai dan berangkai dari sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1965.

Selama 20 tahun sesudah Proklamasi Kemerdekaan, dari tahun 1945 sampai tahun 1965, kita harus mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dari segala macam ancaman dan marabahaya. Dari tahun 1945 hingga pengakuan kedaulatan menjelang akhir tahun 1945, kita berjuang dalam perang kemerdekaan. Melalui perjuangan berat dan lama, bangsa kita berhasil membulatkan wilayah Indonesia dengan merebut kembali Irian Jaya pada tahun 1962 yang semula masih berada dalam kekuasaan Belanda. Sejak pengakuan kedaulatan dan pada tahun-tahun sesudahnya, kita berjuang melawan bahaya-bahaya yang datang dari paham-paham federalisme, separatisme, kesukuan, kedaerahan, ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Tidak jarang segala ancaman dan bahaya tadi bercampur dengan subversi asing.

Gerak percaturan politik itu menjangkau baik kehidupan kenegaraan maupun kehidupan kemasyarakatan, sehingga suasana "multi-ideologi" mempengaruhi pula kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan kita. Salah satu episode yang dapat secara gamblang mengungkapkan betapa masalah ideologi merupakan hal yang amat sentral pada masa itu adalah terjadinya Peristiwa Madiun: Pemberontakan PKI-Muso. Pada tanggal 1 Desember 1948 tokoh-tokoh PKI di Madiun memproklamasikan berdirinya "Republik Soviet Indonesia." Bahwa pemberontakan PKI-Muso itu mempunyai asas ciri ideologi, amatlah jelas. Tetapi Pancasila, ideologi kebangsaan kita, merupakan acuan penangkal yang kuat.

Ditandatanganinya pengakuan kedaulatan sebagai salah satu hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) bukanlah berarti selesainya perjuangan mempertahankan kemerdekaan, persatuan dan kedaulatan. Di tingkat internasional, kita masih menghadapi masalah Uni Indonesia-Belanda dan terutama masalah Irian Jaya. Di tingkat nasional pergolakan-pergolakan pun masih terjadi: ada gerakan DI/TII/NII, petualangan APRA, pergolakan RMS, pertentangan-pertentangan politik yang sifatnya terbuka pada jalur ketatanegaraan.

Terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950 adalah suatu episode yang penting di dalam perjalanan bangsa Indonesia, karena bentuk negara kita sepenuhnya dikembalikan kepada cita-cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Namun, perjalanan untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan persatuan ternyata belum memperoleh ketetapan dan kemantapan yang meyakinkan. Hal

ini disebabkan oleh berbagai faktor. Sistem ketatanegaraan sebagaimana ditentukan di dalam UUDS 1950 yang berlaku pada waktu itu mengandung percampuran yang tidak serasi antara "Weltanschauung" peserta kebangsaan di satu pihak dengan "Weltanschauung Liberalistik" di lain pihak. Dalam pada itu, sifat kesementaraan dari konstitusi itu sendiri mengundang pergulatan politik dan pergulatan ideologi untuk memberi ciri pada bentuk dasar dari Negara Indonesia.

Kehidupan politik formal dengan sendirinya tumbuh di dalam suasana perpecahan, di dalam sekat-sekat pengkotakan politik ideologis yang bersifat struktural dan dogmatik. Pertumbuhan kekuatan politik seperti itu tercermin di dalam jatuh-bangunnya kabinet, silih berganti, yang menunjukkan ketidakmantapan dari sistem yang berlaku.

Proses terpecah-pecahnya ideologi seperti itu mengalami peningkatan, makin intensif dan ekstensif, dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum. Dan tanpa disadari, PKI yang dalam tahun 1948 telah melancarkan pemberontakan, bahkan memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia, memiliki pula kesempatan dan hak untuk ikut serta di dalam pergulatan politik dan ideologi tersebut.

Gejolak politik ideologi itu terus berlanjut hingga masa sesudah dibentuknya DPR dan Konstituante. Pergolakan yang bersifat separatisme ideologis maupun teritorial terjadi, perpecahan pun semakin melukai persatuan bangsa. Bahkan di dalam sidang Konstituante terungkap secara terbuka perpecahan ideologi yang sifatnya mendasar, yakni pada waktu diperdebatkan tentang dasar negara. Hanya melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, situasi itu dapat diatasi.

Tetapi sejarah mencatat, bahwa problema ideologi dan masalah yang menyangkut kemantapan Pancasila masih menghadang perjalanan bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan antara lain karena dekrit itu sendiri dipermasalahkan. Di samping itu, pernyataan berlakunya kembali UUD 1945 tidak dilanjutkan dengan pelaksanaan yang konsekuen dan konsisten, sehingga penyimpangan-penyimpangan masih terjadi.

Pancasila dipandang melulu sebagai wadah dan bukan isi, sehingga kekuatan-kekuatan politik dan kemasyarakatan berpacu untuk mengisinya dengan ciri ideologi mereka masing-masing. Kehidupan politik, baik pada tataran institusional maupun pada tataran kemasyarakatan masih tidak berbeda dengan situasi sebelumnya. Kesadaran, bahwa Pancasila adalah wadah dan sekaligus juga isi, kurang dikembangkan. Pada masa itu, belum disadari bahwa Pancasila dapat mewadahi kehidupan seluruh bangsa Indonesia, yang bersatu, merdeka dan berdaulat, justru karena isinya itu.

Di dalam kemelut politik yang tidak kunjung selesai itulah PKI dengan jembatan proses Nasakom, membangun kekuatan, baik di tingkat kenegaraan, di tingkat kemasyarakatan. Semua itu akhirnya bermuara kepada terjadinya Gerakan G-30-S/PKI. Bangsa Indonesia ditantang lagi untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan persatuannya.

Peristiwa demi peristiwa yang menyertai perjalanan bangsa kita itu telah menyentak kesadaran rakyat Indonesia untuk mengambil hikmah dari pengalaman sejarahnya: bahwa jalan yang paling tepat untuk kita tempuh sebagai bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat adalah kembali kepada cita-cita Proklamasi Kemerdekaan. "Engagement" dan "Commitment" politik total kepada Ideologi Pancasila adalah pilihan yang disimpulkan dari pengalaman sejarah yang berat dan panjang ini. Dan, itulah pula yang menjadi sumber motivasi bagi kelahiran Orde Baru di atas pentas sejarah nasional.

Tekad dan kehadiran Orde Baru, ditandai oleh keinginan yang kuat untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Namun demikian, tekad politik untuk menata kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan berdasarkan Pancasila harus dilaksanakan setapak demi setapak, karena suasana kehidupan multiideologi yang menjadi sumber perpecahan dan diintegrasikan bangsa, masih belum tersembuhkan dari kehidupan bangsa kita. Selain itu, pembangunan nasional harus tetap dilaksanakan secara konstitusional serta diselenggarakan secara terencana berkesinambungan.

Dengan kenyataan sejarah yang seperti itu, perjalanan politik Orde Baru pun harus terlebih dulu melampaui beberapa fase pengamalan ideologis, untuk mengantar bangsa Indonesia memasuki fase Pengamalan Pancasila.

Penyelenggaraan pemilihan umum secara teratur sejak tahun 1971 merupakan langkah politik yang secara nyata membedakan Orde Baru dengan pemerintahan sebelumnya. Proses pemilihan umum itu juga merupakan gambaran dari tahap-tahap kristalisasi politik di sektor infrastruktural, di mana berlangsungnya proses penyederhanaan kehidupan pertanian, serta penyatuan langkah di dalam derap pembangunan nasional, yang secara konsisten dilaksanakan oleh Orde Baru. Pemilihan Umum 1971 merupakan langkah awal untuk melihat realitas keberadaan daripada kekuatan-kekuatan sosial politik yang ada dalam masyarakat.

Kemenangan Golkar yang cukup meyakinkan pada Pemilihan Umum 1971 merupakan titik awal yang penting dari perombakan struktur politik Indonesia. Terbentuknya kekuatan mayoritas mutlak Golkar dalam lembaga-lembaga legislatif, baik pada tingkat nasional maupun daerah, merupakan salah satu jaminan bagi keabsahan sistem politik Orde Baru.

Keadaan ini memungkinkan dimatangkannya kondisi politik yang mengarah kepada penyederhanaan jumlah partai-partai politik di Indonesia, yang kemudian terwujud melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975, di mana hanya dua partai politik (PPP dan PDI) dan satu Golkar. Mendampingi kekuatan sosial politik itu, bangsa Indonesia memiliki ABRI yang mengemban dwifungsinya.

Dipandang dari segi jumlahnya, perubahan dari sembilan partai politik (Partai NU, Parmusi, Perti, PNI, PSII, IPKI, Partai Kristen, Partai Katolik dan Murba) menjadi dua itu, merupakan prestasi politik yang luar biasa. Hal itu merupakan sesuatu yang hampir mustahil untuk terwujud pada masa sebelumnya. Prestasi politik Orde Baru dengan Undang-undang No. 3/1975 itu bukan hanya berkenaan dengan penyederhanaan jumlah partai politik, tetapi juga tidak terlepas dari kenyataan tentang ditempatkannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai asas utama dari Partai Politik dan Golkar (Pasal 2 ayat 1). Walaupun dalam Pasal 2 ayat 2 masih tetap diakui adanya asas/ciri lain.

Permasalahan yang dihadapi justru terletak pada kenyataan tentang tidak konsistennya penerimaan formal itu dengan perilaku politik yang ditampilkan oleh kekuatan-kekuatan sosial politik dimaksud. Keadaan yang kurang memuaskan itu sebenarnya merupakan kompleksitas kehidupan politik, yang terbentuk dari berbagai faktor yang berinteraksi, namun diyakini bahwa sebab utamanya justru bertolak dari kenyataan masih dominannya asas/ciri spesifik dari partai-partai politik tersebut.

Dalam pada itu, Sidang Umum MPR tahun 1978, telah tampil sebagai momentum yang mempunyai nilai kualitatif strategis. Sidang tersebut antara lain menghasilkan Ketetapan MPR-RI Nomor II Tahun 1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa, yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Langkah tersebut dilanjutkan dalam Sidang MPR-RI 1983, dengan ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi kekuatan sosial politik, yang menetapkan pula bahwa pembangunan nasional pada hakikatnya adalah Pengamalan Pancasila.

Dengan tekad ini, ideologi Pancasila telah kita tempatkan sebagai sumber nilai dan sekaligus sebagai "motivating force" di dalam rangka pembangunan. Harapan ini bukan merupakan hal yang mustahil, karena ideologi, terutama jika dalam dirinya terkandung nilai-nilai operasional yang dapat membangkitkan kesadaran dan solidaritas, yang menuntut ketaatan dan sekaligus komitmen untuk bertindak, bukan saja tetap relevan sebagai sumber motivasi pembangunan, tetapi juga dapat memberi dorongan bagi tegaknya sikap-sikap disiplin di dalam proses pembangunan itu. Pada tingkat kesadaran

semacam ini, ideologi akan menjadi sumber nilai, yang di samping memberi motivasi bagi penyelenggaraan pembangunan, juga menjadi pengendali efektif dari perilaku orang-orang yang terlibat di dalam proses pembangunan itu. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai sumber motivasi bagi seluruh gerak pembangunan nasional, dan menjadi satu-satunya asas kehidupan politik kita, berarti kita telah mengarah secara mantap menuju integrasi nilai yang lebih tuntas.

Berdasarkan atas perkembangan itu kita sampai kepada tahap lebih lanjut, yaitu keputusan politik yang merupakan konsensus nasional untuk menempatkan Pancasila sebagai satu-satunya asas, yaitu Tap MPR No. 11 Tahun 1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Ketetapan ini kemudian telah dijabarkan ke dalam undang-undang di bidang politik yang baru saja disahkan oleh DPR-RI. Konsensus ini merupakan prestasi politik yang tidak pernah kita capai sebelumnya. Perjalanan kehidupan politik nasional kita, tampaknya memerlukan waktu antara 35 hingga 40 tahun untuk sampai kepada konsensus itu.

MEMBANGUN KERANGKA LANDASAN POLITIK

Secara khusus marilah kita lihat proses maupun produk usaha Orde Baru di dalam membangun "design" politik nasional kita. Berbicara mengenai arah dan jalannya pembangunan politik nasional kita tentu saja harus berangkat dari pemahaman mendasar mengenai "the political will" dari Orde Baru. Apakah political will dari Orde Baru tersebut. Kiranya sudah jelas dari uraian di atas yaitu tekad untuk mengadakan penataan kehidupan bangsa dan negara yang sifatnya mendasar dan menyeluruh berdasarkan kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Pembangunan politik itu mencakup sekurang-kurangnya dua dimensi: dimensi struktural dan dimensi kultural. Pembangunan struktur politik meliputi dua bidang: *pertama*, suprastruktur politik dan *kedua*, infrastruktur politik. Tugas sejarah pertama-tama yang dihadapi oleh Orde Baru di dalam tahap awalnya adalah mengadakan penataan suprastruktur politik nasional. Berdampingan dengan itu adalah mengadakan penataan infrastruktur politik yang sesuai dengan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Dan ini ditempuh melalui proses yang sifatnya konstitusional dan bertahap. Proses ini kemudian diberi kelengkapan yang lebih mendasar oleh Ketetapan-ketetapan MPR tahun 1978 dan tahun 1983 (P-4 dan Pancasila sebagai satu-satunya asas) yang keseluruhannya mengukuhkan pembangunan kultur politik kita.

Berdasarkan atas bacaan terhadap jalannya sejarah politik selama Orde Baru ini dapatlah ditarik beberapa kesimpulan berikut:

- (1) Bahwa pembangunan politik telah terjadi dalam suatu wawasan strategi yang jelas, dan diselenggarakan dengan suasana penuh kearifan, kebijaksanaan dan disertai dengan semangat tawakal dan sabar.
- (2) Bahwa pembangunan politik itu melingkupi proses pembaharuan di dalam suprastruktur politik nasional, infrastruktur politik nasional dan kultur politik nasional.
- (3) Ditinjau dari perkembangan *suprastruktur politik*, dapat dikatakan terjadi pertumbuhan pembaharuan yang makin mantap, baik di dalam tata kerja kelembagaannya maupun di dalam produk-produk keputusan politik yang dihasilkannya.
- (4) Ditinjau dari perkembangan *infrastruktur politik*, tampak bahwa jalannya pembaharuan tata politik nasional lebih banyak mengalami kendala-kendala serta hambatan, baik pada tataran infrastruktur politik yang formal maupun pada tataran infrastruktur politik yang tidak formal. Ada dua faktor sekurang-kurangnya yang mempengaruhi kenyataan ini:
 - a. Masih terasa adanya tendensi kebhinnekaan yang sifatnya desintegratif, sehingga cenderung keluar ataupun merusak faktor ketunggalikaan.
 - b. Proses konsolidasi organisasi maupun konsepsi khususnya pada Partai-partai Politik masih amat lemah.
- (5) Ditinjau dari perkembangan *kultur politik*, kita mengalami tumbuhnya gerakan penghayatan dan pengamalan Pancasila, dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

STABILITAS POLITIK DAN PERTUMBUHAN DEMOKRASI KITA

Seluruh proses pembangunan politik pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya adalah merupakan pertumbuhan demokrasi kita.

Ada kaitan yang amat erat dan mendasar antara wawasan kebangsaan Indonesia dan pertumbuhan demokrasi kita itu. Wawasan kebangsaan adalah suatu wawasan yang inti dasarnya adalah persatuan kesatuan dalam persamaan dan kebersamaan. Persamaan dan kebersamaan itu terletak di dalam pandangan mendasar mengenai derajat kodrat kemanusiaan sebagai ciptaan Tuhan yang pada kehidupan kebangsaan kita merupakan suatu ungkapan dan aktualisasi dari kemanusiaan tersebut. Maka itulah wawasan kebangsaan kita adalah wawasan kebangsaan yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Mahaesa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan pandangan yang mendasar mengenai kemanusiaan, kebangsaan, persatuan, kesatuan, kesamaan dan kebersamaan itulah maka perjuangan bangsa Indonesia menuju kepada cita-cita kemajuan itu, tertuang pula di dalam cita-cita demokrasinya. Bagi kita bangsa Indonesia, esensi dari demokrasi adalah persatuan, kesatuan dan kebersamaan. Bagi kita cita-cita demokrasi itu bukanlah kemerdekaan semata-mata. Demokrasi adalah cita-cita kemerdekaan di dalam persatuan, kesatuan dan kebersamaan. Demokrasi adalah cita-cita kemerdekaan kebangsaan dan kebudayaan.

Itulah sebabnya maka demokrasi kita itu tidak hanya terbatas kepada demokrasi politik saja, melainkan juga demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial kebudayaan. Cita-cita ini pun tertuang di dalam pasal-pasal batang tubuh UUD 1945 serta dengan penjelasan-penjelasanannya.

Pembangunan politik nasional yang saya kemukakan di atas itu adalah suatu perjalanan membangun perwujudan demokrasi kita itu pula. Maka dari itu pembangunan politik itu pun bukan pembangunan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai kaitan dan independensi pula dengan pembangunan-pembangunan ekonomi dan pembangunan kebudayaan serta kemasyarakatan. Itu pula sebabnya pembangunan politik itu juga kita kembangkan untuk dapat mendukung terjadinya pertumbuhan demokrasi ekonomi dan demokrasi kemasyarakatan dan kebudayaan di Indonesia ini. Dalam konteks inilah perlu kita pahami arti penting dari stabilitas politik.

Pengalaman selama Orde Baru ini memberikan pelajaran kepada kita betapa stabilitas itu merupakan kondisi yang memberikan kemungkinan bagi bangsa kita untuk mengembang-tumbuhkan pembangunan di berbagai bidang, khususnya pembangunan ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ditinjau dari pandangan politik, Orde Baru merupakan sejarah stabilitas yang paling panjang di dalam kurun waktu sejarah Indonesia modern. Karena itu pula Orde Baru dapat tumbuh menjadi Orde Pembangunan.

Dari pelajaran tersebut kita perlu menarik hikmah yang kiranya mempunyai relevansi pula bagi pembangunan jangka jauh di depan nanti betapa stabilitas politik mempunyai arti yang mendasar. Sudah barang tentu stabilitas tersebut adalah stabilitas yang dinamis, yang kreatif pula untuk membangun bidang-bidang kesejahteraan, kemasyarakatan dan kebudayaan. Stabilitas bukanlah sebuah kondisi yang kalau sudah selesai dapat ditanggalkan. Stabilitas adalah sebuah kondisi yang diperlukan adanya secara terus-menerus. Kehidupan bangsa dan negara yang penuh gejolak dan instabilitas politik akan tidak memungkinkan terjadinya pembangunan-pembangunan yang menyeluruh dan makin kompleks sifatnya. Ini semua karena demokrasi

politik tumbuh berkembang berjalanan dengan demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial kebudayaan. Stabilitas politik merupakan bagian dari aktualisasinya wawasan kebangsaan kita yang sifatnya dinamis dan integralistik.

Dengan melihat perkembangan sejarah kebangsaan di dalam konteks pertumbuhannya demokrasi kita itu, menjadi jelaslah betapa pentingnya fase meletakkan kerangka landasan pembangunan saat ini. Dengan usaha tersebut kita berusaha membangun basis-basis pertumbuhan demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial kebudayaan kita. Kerangka landasan pembangunan politik kiranya makin lama telah menjadi makin mantap, dan makin jelas pula *design* maupun strukturnya, sebagaimana sudah saya uraikan di depan. Kerangka inilah yang harus dijaga dan dikembangkan terus secara kreatif. Politik di masa yang akan datang akan menjadi lebih kompleks dan lebih interdependen. Kalau problem politik di masa yang telah lalu terutama adalah masalah-masalah yang sifatnya ideologikal, di masa yang akan datang di samping problem ideologikal, kita akan dihadapkan pula kepada masalah-masalah sosial ekonomi, masalah-masalah kemasyarakatan sebagai problem politik. Insya Allah, kerangka landasan politik, yang mencakup suprastruktur, infrastruktur dan kultur politik itu tetap akan dapat menciptakan stabilitas politik yang mendukung terwujudnya kerangka landasan demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial serta kebudayaan.

PERJALANAN KE DEPAN: PERSPEKTIF KENUSANTARAAN

Dengan mencoba memikirkan pembangunan jangka panjang yang kedua pertanyaan yang kita hadapi sebetulnya adalah: Bagaimanakah bakal kelanjutannya sejarah kebangsaan Indonesia. Bagaimanakah bakal kelanjutannya wawasan kebangsaan kita.

Terlebih dahulu perlu dilihat secara jelas bahwa wawasan kebangsaan Indonesia itu membawa di dalamnya wawasan kemajuan. Kebangkitan nasional terjadi karena adanya cita-cita dan kemauan untuk maju. Maka itu wawasan kebangsaan Indonesia pada hakikatnya bukanlah wawasan yang menutup diri.

Lebih lanjut perlu kita perhitungkan pula hasil-hasil yang akan kita capai dari pembangunan nasional jangka panjang yang pertama ini. Apabila sasaran utama yang dapat dikatakan final dari pembangunan jangka panjang yang pertama ini adalah terwujudnya kerangka landasan pembangunan dan Insya Allah dalam waktu tujuh tahun mendatang ini dapat kita wujudkan semuanya itu dengan selamat sentosa -- maka jelas sekali bahwa wawasan

kebangsaan kita itu telah makin diperlengkapi pula untuk melangkah mewujudkan kemajuan-kemajuan lebih jauh lagi. Dengan didukung oleh kerangka landasan demokrasi politik, kerangka landasan demokrasi ekonomi dan kerangka landasan demokrasi sosial serta kebudayaan, maka bangsa kita diberi bekal kemungkinan untuk tumbuh dan maju terus.

Stabilitas politik yang dapat tumbuh dan berkembang selama ini telah pula membawa hasil-hasil yang perlu pula diperhatikan dan diperhitungkan. Di samping mengembangkan tradisi kehidupan bangsa dan negara secara konstitusional dalam wujud perputarannya kalender demokrasi politik, telah pula dikembangkan tumbuhnya kemampuan administrasi, disiplin perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta tentu saja tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan di berbagai wilayah di negara kita. Dipadukan dengan perkembangan di bidang transportasi dan komunikasi, maka semua itu telah mulai menunjukkan adanya pusat-pusat awal dari proses modernisasi di berbagai wilayah Indonesia. Ini berarti bahwa perkembangan kehidupan bangsa dan negara kita telah tumbuh di dalam perspektif kenusantaraan.

Dalam pengertian itu, maka Wawasan Nusantara akan menjadi referensi yang amat penting bagi perkembangan masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. Wawasan kebangsaan yang terjalin dengan wawasan kemajuan, telah membawa masyarakat Indonesia modern memasuki era Nusantara di masa yang akan datang, yaitu eranya Indonesia sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan budaya, satu kesatuan pertahanan keamanan: satu bentuk kesatuan yang penuh dinamika dan sesuai dengan sifat dasar masyarakat Indonesia yaitu bhinneka tunggal ika. Dengan kerangka landasan pembangunan yang dihasilkan oleh pembangunan nasional jangka panjang yang pertama, cita-cita kebangsaan kita akan memasuki zaman Nusantara.

• Mungkin pada saat itulah akan terasa betapa bangsa, negara dan masyarakat Indonesia itu akan mengalami gerak-gerak yang ruang lingkupnya menjadi luas, interaksinya menjadi makin cepat, kemungkinan-kemungkinannya juga menjadi makin terbuka. Masyarakat Indonesia akan tumbuh menjadi multiplikatif dan makin majemuk. Dan sudah barang tentu perkembangan ini juga akan membawa dampak sampingan seperti misalnya terjadi problem interdependensi yang dapat menjadi rumit, tumbuhnya kecenderungan desintegratif, keterkaitan dengan perkembangan internasional yang menjadi makin meningkat pula. Doktrin Ketahanan Nasional akan menjadi makin penting. Di dalam perkembangan itu maka Trilogi Pembangunan akan pula harus dilaksanakan dalam perspektif kenusantaraan. Di dalam perkembangan seperti itu, stabilitas politik akan menjadi semakin diperlukan untuk menjaga perkembangan masyarakat yang menjadi makin cepat, makin luas ruang lingkupnya, makin banyak interaksinya, makin majemuk permasalahannya.

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI SASARAN UTAMA

Dapatkah kita membuat suatu perkiraan pula mengenai sasaran utama di dalam pembangunan nasional jangka panjang tahap II itu nanti? Apabila sasaran utama pembangunan nasional jangka panjang tahap yang pertama, sebagaimana dikemukakan di atas adalah terwujudnya kerangka landasan pembangunan nasional, yaitu kerangka yang menjadi landasan pertumbuhannya demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial kemasyarakatan kita, maka upaya selanjutnya kiranya adalah mengusahakan agar kerangka itu dapat dijaga dan dikembangkan terus oleh para pemakai kerangka itu. Dengan perkataan lain apabila sasaran utama jangka panjang pertama adalah kerangkanya, sasaran utama jangka panjang tahap kedua adalah manusia-manusianya, manusia yang akan memakai dan mengembangkan kerangka itu: baik sebagai "dragers" maupun sebagai "ontwikkelaars" dari pertumbuhan demokrasi kita. Dengan perkataan lain perhatian utama di dalam pembangunan jangka panjang kedua itu nanti akan banyak ditujukan kepada pembangunan sumber daya manusia.

PENUTUP

Demikianlah beberapa pemikiran yang ingin saya sumbangkan pada sara-sehan kebudayaan yang diselenggarakan oleh Tamansiswa dalam rangka merayakan Hari Pahlawan yang mengambil tema tentang pembangunan nasional jangka panjang yang kedua. Saya tidak perlu memberikan ulasan mengenai relevansinya bagi kita semua membahas tema ini.

Bagi kita, pembangunan adalah hal cita-cita dan perjuangan. Berdasarkan atas pengalaman sejarah di masa yang telah lampau telah saya kemukakan bahwa pembangunan politik merupakan aktualisasi dari cita-cita kebangsaan kita. Dan cita-cita ini masih tetap menyejarah sampai saat ini.

Sebagai bagian dari usaha mewujudkan kerangka landasan pembangunan yang merupakan sasaran akhir dari pembangunan nasional jangka panjang kita tahap yang pertama, maka kita telah membangun pula kerangka landasan politik, yang meliputi pembangunan suprastruktur, infrastruktur, dan kultur politik kita. Dengan berpegang kepada kerangka landasan politik itu telah tumbuhlah kekuatan-kekuatan politik nasional kita, dalam wujud Partai-partai Politik, Golongan Karya serta ABRI.

Pembangunan politik itu pun ditujukan terutama kepada terselenggaranya stabilitas politik, yang terkait dengan pelaksanaan Triologi Pembangunan dan perwujudan Ketahanan Nasional. Dalam rangka itulah maka pembangunan

politik merupakan pembangunan demokrasi politik, yang terkait secara terpadu dengan pertumbuhan demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial dan kebudayaan.

Atas dasar pengalaman-pengalaman tersebut, maka pembangunan nasional jangka panjang yang akan datang itu nanti akan merupakan proses kelanjutan dari pertumbuhan demokrasi kita, yaitu demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosio-kultural berdasarkan Pancasila. Di masa mendatang itu nanti perspektif kenusantaraan akan menjadi makin tampil ke depan, sehingga dengan demikian maka Trilogi Pembangunan harus pula dibayangkan pelaksanaannya secara terkait dengan perspektif kenusantaraan tersebut. Dalam hubungan ini stabilitas politik nasional tetap merupakan elemen yang amat penting untuk menjadi kondisi yang mendukung pertumbuhan masyarakat yang menjadi makin maju, bergerak makin cepat dan majemuk, dengan interaksi yang menjadi lebih multiplikatif.

Itu semua adalah bagaikan pesan-pesan yang dapat kita angkat dari pendalaman kita mengenai sejarah kebangsaan Indonesia modern hingga hari ini. Itu semua adalah ungkapan dari cita-cita kebangsaan yang menjiwai kita semua sampai hari ini sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berusaha untuk menjadi bangsa yang maju.

Pesan dan cita-cita itu bukanlah sekedar suatu dambaan tanpa didasarkan kepada realisme sejarah. Baiklah kita catat betapa wawasan kebangsaan Indonesia, yang bermula pada awal abad kedua puluh ini, ternyata masih tetap mengantarkan perjalanan rakyat Indonesia hingga sampai hari ini, yang berarti berjalan hampir satu abad lamanya. Atas dasar itulah kita dibenarkan untuk mengharapakan bahwa kerangka landasan pertumbuhan demokrasi kita berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945 ini pun mempunyai daya yang mampu menjangkau puluhan, bahkan ratusan tahun di masa yang akan datang.

Kita dibenarkan untuk mengharapakan bahwa lagu kebangsaan kita Indonesia Raya masih akan tetap menggema. Bendera Kebangsaan kita Sang Dwiwarna masih tetap akan berkibar. Bangsa Indonesia akan masih tetap bersatu, merdeka dan berdaulat. Pancasila masih tetap menjadi dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi nasional. Konstitusi Proklamasi masih tetap menjadi acuan bakunya tradisi politik kebangsaan kita. Demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi sosial dan kebudayaan masih tetap tumbuh berdasarkan asas Pancasila.

Untuk ini maka dibangunlah terus sumber daya manusia, yang tumbuh dalam wawasan kebangsaan dan wawasan kemajuan, diperkaya dengan kualitas penguasaan ilmu dan teknologi, dilandasi oleh sikap dan pandangan dasar Pancasila.

Kebudayaan Indonesia di Masa Mendatang*

Haryati SOEBADIO

PENDAHULUAN

Bila kita ingat sejenak akan sejarah penelitian mengenai kebudayaan, maka jelaslah, bahwa semua definisi, mulai yang paling luas yang dibuat pada tahun 1871 oleh Tyler¹ dan yang menyatakan, bahwa kebudayaan itu meliputi keseluruhan kemampuan manusia, termasuk keyakinan dan kepercayaan di samping seni, adat-kebiasaan, moral, etika, tatacara, hukum, perundang-undangan, pengetahuan dan lain-lain sampai dengan rumusan singkat yang kini berlaku, yaitu bahwa kebudayaan berupa sistem nilai yang mengarahkan keseluruhan hidup manusia, maka jelaslah, bahwa kebudayaan disadari sebagai kemampuan khas manusia. Selanjutnya bisa dipahami, bahwa timbul pendapat, bahwa kebudayaan karenanya berwujud sama dan serupa bagi keseluruhan umat manusia.

Akan tetapi, dengan berkembangnya ilmu-ilmu kemanusiaan seperti etnologi (yang kemudian lebih banyak disebut antropologi budaya), dan sosiologi, disertai timbulnya negara-negara baru dalam abad ke-20 ini, disadari dimensi khusus dalam pengertian kebudayaan, yaitu bahwa kebudayaan secara intrinsik bersifat paradoksal dan sulit dikenakan kualifikasi menyeluruh atau merata. Di satu pihak, sebagai kemampuan khas seluruh umat manusia, tetap disadari dan juga terbukti kesamaan universal yang berlaku merata untuk semua masyarakat, keseluruhan umat manusia. Kesamaan universal tampak dalam berbagai prinsip dasar, tatanilai, pola atau struktur berbagai segi kehidupan manusiawi yang memungkinkan perkaitan antarbudaya. Namun di

*Ceramah Dirjen Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, disampaikan pada Sarasehan Tamansiswa, 10 November 1986.

¹Edward B. Tyler, 1871, *Primitive Culture*, 2 Jilid, Cet. 1958, Gloucester, Mass. USA.

pihak lain mesti diakui dan berupa kenyataan pula, bahwa kebudayaan berwujud aneka-ragam dalam bentuk lahiriah serta memiliki isi yang tak terhingga variasinya menurut tempat kelahiran dan perkembangan dalam kawasan masing-masing. Artinya, wujud kebudayaan berbeda-beda mengikuti jenis masyarakat pendukungnya. Kemudian ternyata, bahwa justru unsur yang berbeda-beda itulah yang memberikan makna khusus serta sanggup mengembangkan kepribadian khas dan menjadikan kebanggaan setiap masyarakat pendukung, sehingga terjadi beda mutlak antarmasyarakat dan antarbudaya masing-masing kelompok masyarakat.

Selain dari itu disadari, bahwa justru karena kebudayaan itu berupa kemampuan khas umat manusia, maka kebudayaan mesti dipahami sebagai sesuatu yang berkembang, artinya bersifat dinamis, mengikuti perkembangan umat manusia, yaitu masing-masing masyarakat pendukung bersangkutan. Namun demikian, justru karena mengikuti keadaan masyarakat pendukung masing-masing, maka ada yang bisa berkembang cepat, dan ada yang terasa sangat lamban, hampir, walau bukan pada hakikatnya, tampak statis.

Adapun wujud bangsa Indonesia yang majemuk dan terdiri dari aneka macam suku bangsa, telah disadari dari saat awal diadakan penelitian terhadap kehidupan suku-suku bangsa kita dan bahasanya. Penelitian itu telah mulai dilaksanakan secara lebih sistematis sejak abad ke-19.² Dan memang sifat bangsa kita itu sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu kemanusiaan seperti antropologi budaya, hukum adat, dan kemudian juga linguistik modern, terutama yang menyangkut bahasa-bahasa di wilayah Indonesia secara khusus dan rumpun bahasa Malayo-Polinesia atau Austronesia secara umum.

Maka tidak mengherankan, bahwa sifat majemuk bangsa kita itu pun disadari sepenuhnya dan dijadikan perhitungan oleh para bapak kita yang menghadapi Kemerdekaan dan penyusunan Undang-Undang Dasar Negara pada tahun 1945. Pemikiran mereka tentang kebudayaan, terutama pengembangan kebudayaan nasional, karenanya cukup memadai dan tetap bisa dijadikan landasan dalam perkembangan sejarah.

Adapun, bila dikaji secara saksama, pemikiran-pemikiran tentang landasan ideologi negara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, terutama justru uraian mengenai Kebudayaan Nasional, pada hakikatnya berupa pemikiran tentang sistem nilai yang diharapkan dapat mengarahkan dan

²Dalam *History of Java*, yang terbit pada tahun 1817, Raffles sudah menunjukkan konsep sistematis dalam penelitian bahasa dan kebudayaan di Jawa dengan mengadakan perbandingan dengan bahasa-bahasa dari Luar Jawa. Periksa, misalnya Appendix E dalam Jilid II (Kuala Lumpur, Oxford University Press).

membentuk kehidupan bangsa Indonesia secara nasional. Artinya, bukan lagi terbatas sejauh keberadaan setiap warga budaya Indonesia sebagai anggota salah satu suku bangsa atau daerah tertentu, melainkan juga dan khususnya sebagai warga nasional Negara Indonesia.

Hal itu dengan sendirinya jelas, apabila sistem nilai yang diharapkan bagi Kebudayaan Nasional Indonesia kita rinci sesuai bidang-bidang yang diketahui paling jelas menggambarkan wujud suatu kebudayaan serta kesanggupannya untuk menyerap perkembangan akibat zaman, yaitu ideologi, organisasi sosial dan teknologi. Dalam pada ini Pancasila dan UUD 1945 beserta uraian dalam GBHN dan juga lambang negara Bhinneka Tunggal Ika, tampak memberi pengarahannya secara cukup memadai atas ketiga segi budaya tersebut.

Di bidang ideologi, misalnya, Pancasila sanggup memberi landasan yang mempersatukan semua sistem ideologi, norma hidup, tatanan adat-istiadat dan lain sebagainya yang selama ini mengarahkan kehidupan suku bangsa di daerah-daerah secara terpisah-pisah. Dalam pada ini telah ditemukan,³ bahwa Pancasila, baik dalam masing-masing sila, maupun secara keseluruhan, tidak mengandung segi yang bisa dianggap diametral bertentangan dengan norma dan paham hidup suku bangsa, daerah maupun kelompok masyarakat manapun di Indonesia, sehingga mampu dijadikan landasan hidup dalam semua aspek budaya untuk keseluruhan bangsa Indonesia dalam jangkauan nasional pada setiap saat.

Dengan demikian Pancasila mampu dan mesti tercermin dalam kehidupan dan organisasi sosial bangsa secara nasional. Yang paling penting dalam hal ini ialah paham yang dalam GBHN disebut "manusia seutuhnya" yang sesungguhnya berupa manusia Indonesia sebagaimana dibayangkan dalam pembicaraan menjelang Kemerdekaan tahun 1945 itu.⁴ Yaitu manusia yang bukan mementingkan kehidupan dan perannya sebagai perorangan (individu) semata-mata ataupun dipandang sebagai hanya anggota masyarakat suku bangsa, daerah dan kelompok terbatas sendiri, melainkan sebagai manusia Indonesia yang mampu merasa diri terkait-erat dengan keseluruhan bangsa secara nasional. Jelas, bahwa hal itu penting sekali untuk mengarahkan kehidupan dan seluruh tatanan sosial secara praktis, karena mesti digaris-bawahi, bahwa manusia Indonesia sebagai individu maupun dalam kelompok terbatas sebagai minoritas bukan semestinya ditentangkan maupun merasa

³Lihat terbitan dalam Proyek Inventarisasi Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang mengumpulkan bahan sastra lisan dari seluruh wilayah Indonesia.

⁴Lihat pidato Profesor Soepomo yang dikutip lengkap dalam Drs. A.T. Soegito Bc. Hk., Profesor Soepomo (terbitan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979/1980).

diri bertentangan dengan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sebaliknya masyarakat Indonesia dalam keseluruhan bukan semestinya menekan individu atau minoritas hanya karena alasan jumlah.

Di sinilah pula tampak kearifan Penjelasan pada Pasal 32 UUD 1945, yang menyatakan kepentingan keikutsertaan seluruh bangsa dalam pengembangan Kebudayaan Nasional. Hal itu jelas pula dari lambang negara Bhinneka Tunggal Ika. Namun, sebaliknya penggarisannya mesti juga dilihat dari sisi suku bangsa, daerah, minoritas maupun individu, yang tidak diharapkan memaksakan pendapat atau memisahkan diri dari kehidupan bangsa secara keseluruhan.

Sehubungan dengan organisasi pemerintahan hal itu pun memberi pengarahan atas kaitan timbal-balik antara Pusat dan Daerah beserta segi-segi lintas-sektoral seperti yang selalu dihimbaukan. Dengan sendirinya pengarahan tersebut berlaku pula dalam hal hubungan antara pihak swasta dan pemerintah.

Sistem teknologi pun ada pengarahannya untuk mengembangkan modernisasi, apabila diingat penggarisan mengenai "kemajuan adab" dalam Penjelasan pada Pasal 32 UUD 1945. Bangsa Indonesia, walaupun berpegangan pada kepribadian sendiri, bukan bermaksud kembali hidup dalam masa megah bagaimanapun di zaman jauh lampau, melainkan bermaksud mengambil tempat wajar dalam kehidupan internasional masa kini dan masa mendatang, sebisa-bisanya di samping negara-negara yang paling maju. Ilmu pengetahuan dan teknologi modern dengan demikian jelas mesti mendapat tempat yang layak, sekalipun tetap perlu diperhitungkan keadaan bangsa, bukan hanya yang hidup dalam kota-kota besar, melainkan juga dan justru yang berada di daerah-daerah yang hingga kini tetap bersifat agraris, termasuk juga yang disebut terbelakang dan hidup di daerah-daerah terpencil. Demikianlah pengembangan dan kemajuan (modernisasi) mesti diusahakan secara menyesuaikan dengan tahap perkembangan masing-masing daerah dan keadaan lingkungannya, bukan dilaksanakan secara pukul rata dan samarupa dalam bentuk maupun sifat untuk keseluruhan wilayah Indonesia. Hal itu kiranya penting dalam menangani pengembangan suku bangsa terbelakang dan daerah terpencil sebagaimana yang masih terdapat dalam wilayah kita dan telah disinggung di atas.

Ideologi negara dalam hal tersebut pun memberi pengarahan yang cukup jelas. Dalam memantapkan kepribadian dan ketahanan bersifat nasional, perlu diperhatikan keadaan "bhinneka" bangsa yang tidak bisa tidak meliputi perbedaan horisontal maupun vertikal dalam hampir semua segi. Artinya, sifat budaya pribadi suku-suku bangsa di masing-masing daerah tetap mesti

diberi kesempatan mengembangkan diri, sekalipun mesti menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dalam hubungan kehidupan bernegara tunggal dalam suasana nasional, kesatuan dan persatuan. Hanya dengan cara memperhitungkan sifat pribadi budaya masing-masing sendiri itu Kebudayaan Nasional Indonesia bisa berkembang dalam kepribadian yang nasional pula dengan keseluruhan sistem budaya bertumpu pada, dan sebaliknya ikut mengembangkan, kepribadian dan ketahanan budaya yang nasional. Memang mesti digaris-bawahi bahwa Ketahanan Nasional dan Sistem Kebudayaan Nasional berkembang bersama-sama dengan perkembangan bangsa secara keseluruhan.

SIFAT BHINNEKA BANGSA DAN KESATUAN NASIONAL

Penggarisan dan pengarahannya hukum dan perundang-undangan negara yang betapapun telah dirasakan memadai, namun dengan sendirinya belum sekaligus bisa menjadi fakta hidup. Karenanya selamanya perlu diadakan usaha praktis dalam kehidupan berbangsa. Dalam pada ini tidak mungkin diingkari, bahwa sifat masyarakat Indonesia memang bhinneka dan memiliki kebudayaan asli yang bhinneka pula. Dalam pada ini keadaan masyarakat kita itu bukan berupa keanehan atau kekecualian. Kebanyakan negara, khususnya juga yang hidup di kawasan Asia Tenggara ini, pada hakikatnya bersifat multikultural dan bahkan multirasial. Maka bila dikaji secara garis besar, maka sifat bhinneka budaya di Indonesia pertama-tama meliputi:

- (a) kebudayaan etnik atau suku bangsa, yaitu kebudayaan yang didukung oleh masing-masing suku bangsa (grup etnik) kita;
- (b) kebudayaan daerah, yang pada hakikatnya berupa gabungan ataupun pembauran antara berbagai kebudayaan suku bangsa yang kebetulan hidup dalam satu daerah tertentu secara berdekatan dan berhasil saling mempengaruhi sejak lama.

Kebudayaan-kebudayaan setempat itulah yang diharapkan bisa berkembang dan ikut membentuk Kebudayaan Nasional sebagai kerangka hidup nasional dalam persatuan di negara kesatuan.

Adapun, bila diingat, bahwa suatu kebudayaan berupa hasil kemampuan manusia yang didukung oleh kelompok masyarakat tertentu, perlu disadari, bahwa baik kebudayaan suku bangsa tertentu, maupun kebudayaan yang berada di masing-masing daerah, tetap akan hidup dan berkembang sepanjang zaman, selama masih ada pendukungnya. Hal itu akan terjadi di samping berkembangnya Kebudayaan Nasional, yaitu yang mesti disifatkan sebagai kerangka hidup nasional.

Maka jelaslah, bahwa, supaya tidak terjadi saling menentang antara kebudayaan setempat dengan Kebudayaan Nasional, perlu ada kesadaran me-

ngenai kesatuan nasional, atau, dengan perkataan lain, perlu digalang perasaan solidaritas nasional. Dalam pada ini, sebagaimana diketahui, masalah solidaritas nasional sudah banyak dibicarakan dan telah juga menimbulkan berbagai penjelasan dan pengertian. Namun demikian, secara umum solidaritas nasional itu dapat diartikan sebagai rasa persaudaraan, tenggang rasa, antarkelompok masyarakat, suku bangsa maupun jenis minoritas lain, yang telah bertekad bersama untuk mencapai tujuan bersama pula.⁵ Tujuan bangsa Indonesia dengan sendirinya adalah hidup dalam persatuan di negara kesatuan atas dasar Pancasila dan UUD 1945.

Adapun, sebagaimana telah sering diungkapkan, dalam hubungan keadaan majemuk masyarakat Indonesia, pada hakikatnya bangsa kita memiliki kelebihan. Yaitu, bahwa, betapapun *bhinneka* kenyataan praktis antarsuku bangsa, namun ada kesatuan dasar budaya yang terutama terbukti dalam kesamaan rumpun bahasa, namun juga dalam berbagai segi budaya secara umum. Karena itu kalimat kedua dalam Penjelasan pada Pasal 32 UUD 1945 memang ada kenyataan sejarahnya, yaitu bahwa "Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia" memang dimungkinkan "terhitung sebagai kebudayaan bangsa," sekurang-kurangnya karena ada kesamaan dasarnya.

Mungkin tidak tampak langsung, namun kalimat itu pun pada hakikatnya merumuskan landasan Kebudayaan Nasional dengan memberi penggarisan atas ciri-ciri khas yang dikehendaki, yaitu mesti berkepribadian bangsa. Sebagaimana telah disinggung di muka, justru segi-segi tradisional suatu kebudayaan, yaitu yang berkembang sesuai tempat asal dan keadaan lingkungan sepanjang sejarah, memberi makna khusus serta membentuk identitas, kepribadian, pada para pendukungnya. Karena itu, bila Kebudayaan Nasional memang diinginkan memiliki kepribadian khas Indonesia yang kuat dan berakar, maka Kebudayaan Nasional itu mesti berlandaskan kebudayaan di daerah dan suku bangsa yang menjadi anggota serta pendukung Kebudayaan Nasional.

Dalam pada ini perlu diperhatikan pula, bahwa dalam penggarisan bersangkutan jelas disebutkan "daerah-daerah di seluruh Indonesia." Artinya, dalam menilai "puncak-puncak kebudayaan lama dan asli" bukan semestinya ditonjolkan ciri-ciri khas suatu daerah atau suku bangsa yang tertentu saja. Semua daerah, semua suku bangsa, pendeknya, keseluruhan bangsa, harus diberi kesempatan memberi masukan untuk pengembangan Kebudayaan Nasional Indonesia. Di sini terletak kepentingan untuk meneliti, dan juga menyebarluaskan hasil penelitian, atas semua segi budaya di keseluruhan wilayah Indonesia, dengan tujuan memperkenalkannya dan dengan demikian memberi kesempatan untuk mengadakan pilihan. Dengan demikian peningkatan dari

⁵Dalam hal ini pengertiannya sejajar dengan "nacion."

wilayah budaya terbatas pada daerah atau suku bangsa untuk menjadi wilayah budaya nasional dalam penggalangan persatuan dan kesatuan nasional, bisa berlangsung tanpa menimbulkan frustrasi yang kurang menguntungkan. Dasar kesamaan budaya yang memang ada, dalam hal ini justru akan bisa membantu banyak dalam menemukan relevansi kuat menggalang solidaritas dan menumbuhkan persatuan dalam kesatuan yang diinginkan.

KEBUDAYAAN INDONESIA DALAM INTERAKSI ANTARBUDAYA

Sebagaimana telah disebutkan di muka, kebudayaan secara umum berwujud aneka-ragam dan majemuk dalam kenyataan masing-masing penampilan individual setiap kelompok masyarakat terbatas. Hal itu pun berarti, bahwa pada prinsipnya setiap kebudayaan terbatas memiliki ciri-ciri yang memungkinkan masyarakat bersangkutan berkembang hanya sesuai dengan jalur khasnya sendiri.

Namun demikian, suatu kebudayaan khas atau terbatas seperti itu tidak mungkin dibayangkan dan dipahami sebagai sesuatu samasekali tidak ada kaitan dengan, atau mengalami sentuhan sedikit pun dari, kebudayaan-kebudayaan lain. Suatu kebudayaan yang tertutup secara hermetis dan hanya bereksistensi dalam kalangan terbatasnya, lama-kelamaan akan mengering, menurun dan akhirnya mati dengan sendirinya pula.

Sebagaimana dapat disaksikan di seluruh dunia, justru hubungan terbuka antarbudaya memberi dasar kuat dan gairah untuk mengembangkan diri bagi setiap kebudayaan sesuai dengan kepribadiannya, justru akibat saling memberi masukan dan terus-menerus mengadakan sintesis sehat antara sifat-sifat intern sendiri dengan masukan yang didapat. Kenyataan menunjukkan, bahwa memang dalam persimpangan jalan antarbudaya masing-masing kebudayaan menjadi lebih sadar dan yakin akan kepribadian sendiri, dan malahan dapat memantapkan diri, sehingga dalam menerima masukan dari luar wilayah budaya sendiri dapat terjadi penggabungan yang wajar akibat penyesuaian sadar maupun tidak sadar terhadap masukan itu sesuai dengan kecocokan pribadinya. Dalam sejarah umat manusia memang juga ditemukan, bahwa, walau berbagai kebudayaan secara menyeluruh menyebar akibat perpindahan bangsa-bangsa penduduknya (seperti misalnya terjadi dengan bangsa Mongol atau bangsa Huna), namun suatu jenis kebudayaan tertentu tidak pernah diterima oleh bangsa ataupun grup etnik lain tanpa diadakan perubahan atau pemilihan unsur-unsur tertentu yang dianggap cocok. Dan justru dalam mengubah dan memilih itu tampak kepribadian dan ketahanan budaya bangsa bersangkutan.

Keadaan seperti itu dapat disaksikan dalam kontak-kontak budaya yang dialami oleh bangsa Indonesia dalam masing-masing daerah dan dengan

masing-masing suku bangsa sepanjang sejarah. Kenyataan dalam pada itu memberi gambaran, bahwa suku bangsa dan daerah yang mengalami banyak hubungan dengan bangsa dan kebudayaan lain, justru bisa berkembang lebih pesat daripada masyarakat yang tertutup dan hidup terpencil dari arus lalu-lintas bangsa-bangsa.

Namun demikian, dalam hubungan antarbangsa dan interaksi antarbudaya itu perlu juga diperhatikan berbagai masalah. Pertama-tama menjadi kenyataan pula, bahwa untuk berhasilnya kontak budaya dalam arti bisa menimbulkan interaksi budaya yang wajar dan seimbang, diperlukan adanya keyakinan mutlak akan kepribadian dan kedaulatan budaya sendiri. Di samping itu diperlukan juga keterbukaan terhadap, dan kesediaan untuk mengakui dan menghargai, kepribadian dan kedaulatan budaya bangsa lain.

Dengan perkataan lain, kontak budaya bisa menghasilkan interaksi budaya seimbang, apabila yang mengadakan kontak itu berupa dua pihak yang mampu merasa sama nilai, artinya di satu sisi memiliki keyakinan cukup akan kedaulatan budaya sendiri, dan di sisi lain bersikap terbuka dan bersedia mengakui dan menghormati kedaulatan budaya pihak yang dihadapi.

Telah dialami cukup sering dan di seluruh dunia pula, bahwa bila kontak terjadi antara dua pihak yang tidak sanggup merasa sama-sama berdaulat, maka timbul bahaya bahwa satu pihak menjadi "kebudayaan pembina" (*leading culture*), dan akibatnya pihak yang lain menjadi "kebudayaan yang dibina" (*led culture*). Dalam pada ini masalah kebudayaan pembina dan yang dibina itu hingga sekarang menjadi masalah psikologis terutama bagi bangsa negara-negara baru di Benua Afrika dan telah menimbulkan gambaran tentang adanya "kebudayaan kuat" dan "kebudayaan lemah" yang saling berhadapan dengan hasil yang mudah dapat dibayangkan.

Untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan seperti itu, perlu dipupuk dan diperkuat terus-menerus rasa harga diri, kepercayaan terhadap diri dan bangsa sendiri, serta keyakinan akan kepentingan dan martabat kebudayaan dan kepribadian sendiri dalam menghadapi bangsa dan kebudayaan asing. Hanya dengan keyakinan itu, yang kita sebut Ketahanan Nasional, dapat dihindari bahaya yang selalu dikhawatirkan dalam seluruh dunia berkembang, yaitu bahwa kontak budaya, terutama dengan negara-negara maju yang membawa modernisasi, mutlak akan memusnahkan kepribadian dan kebudayaan sendiri.

Dalam hubungan itu suasana yang menguntungkan bagi pengembangan kreativitas bangsa perlu ditingkatkan. Guna mempertahankan dan mengembangkan kepribadian budaya sendiri, suatu bangsa perlu merasa berkaitan erat dengan, dan mendapat inspirasi dari kreativitas bangsanya sendiri. Justru

dengan gairah kreativitas itu dapat disuburkan dan diperkuat kepribadian bangsa lewat akar-akar budaya sendiri. Dan tanpa akar kuat tidak ada kebudayaan yang mampu berkembang secara sehat.

Kreativitas bangsa juga akan memberi rasa keaslian, "authenticity" yang menguntungkan bagi pemasukan kelengkapan struktural yang lahir dalam dialog antarbudaya (termasuk yang terjadi di dalam batasan kemajemukan bangsa sendiri) dengan hasil memperkaya masing-masing kepribadian. Dalam pada itu dapat dideteksi secara awal dan ditanggulangi secara langsung pula titik-titik rawan dalam hubungan pengaruh masukan baru terhadap sifat-sifat khas dan inti bangsa, yaitu yang terwujud dalam ciri-ciri khusus, warisan budaya tradisional serta nilai hidup yang telah berkembang sepanjang sejarah bangsa.

Dengan demikian kontak antarbudaya dan antarbangsa akan dapat dimanfaatkan secara maksimal sambil memperkecil segi-segi negatif yang lazim dikhawatirkan dalam menghadapi setiap pengaruh yang datang dari luar, terutama yang datang dari pihak bangsa dan negara yang sudah lama maju. Dengan perkembangan komunikasi modern dewasa ini tidak ada bangsa atau negara satu pun di bumi ini, yang akan sanggup menutup diri atau membendung masuknya pengaruh kebudayaan asing ke dalam wilayahnya. Indonesia, yang terletak di antara dua lautan dan dua benua, dan sepanjang sejarah telah mengalami pengaruh dari luar, dengan sendirinya pun sulit menangkal pengaruh asing, kecuali dengan keyakinan akan kedaulatan budaya sendiri dan ketahanan dari dalam.

Dalam kaitan pengaruh kebudayaan asing itu tidak mungkin diabaikan dan perlu diperhitungkan pula pengaruh dari warga negara Indonesia yang berasal dari wilayah budayasing. Dengan sendirinya pengaruh mereka itu pun perlu dihadapi dengan kekuatan pribadi dan ketahanan nasional yang sama, serta dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan kecocokan budaya bangsa sendiri.

PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN NASIONAL INDONESIA

Kebudayaan-kebudayaan yang berada di wilayah Indonesia secara umum dapat dikatakan sudah mengalami perkembangan dari dalam dan sudah juga terkena pengaruh dari luar kawasannya sepanjang sejarah. Selain sudah terjadi hubungan antarpulau dan antardaerah sendiri, maka berupa kenyataan pula, bahwa wilayah Indonesia sejak cukup awal dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain terutama untuk kepentingan dagang. Peninggalan budaya bangsa dalam hal ini memberikan kenyataan. Dan kenyataannya bukan hanya tam-

pak secara fisik atau material dalam peninggalan berupa benda, melainkan juga terasa dalam peninggalan non-konkret atau spiritual seperti berbagai kebiasaan, ritual, isi sastra, dan lain-lain. Demikianlah dapat ditunjukkan bangunan lama yang jelas mengandung unsur budaya asing, seperti berbagai bangunan ibadah, bangunan umum dan perumahan, susunan pertamanan dan lain-lain, di samping ditemukan bentuk sastra, pandangan ritual dan filsafat ataupun kebiasaan tradisional yang menunjukkan suasana yang berasal dari luar kawasan aslinya. Dalam perkembangan budaya setempat juga tampak pengaruh antarpulau dan antardaerah dalam wilayah Indonesia sendiri. Hal itu terasa, bila kita misalnya, mendengar bunyi musik atau melihat gerak tari yang bersuasana, bahkan berbentuk, sama dalam berbagai daerah berdekatan atau yang diketahui telah mengadakan hubungan lewat laut sejak lama. Sebagai contoh dapat ditunjukkan pengaruh budaya Jawa terhadap kawasan Pantai Kalimantan dan lain-lain.

Namun demikian, dalam menerima pengaruh antarbudaya itu, di Indonesia jelas terjadi apa yang telah disinggung di muka, yaitu bahwa penerimaan dilakukan secara selektif dan sesuai dengan kecocokan pada kebudayaan sendiri. Malahan, bangsa Indonesia dalam hal ini terkenal sangat menunjukkan kepribadian sendiri yang kuat dan menonjol. Atas dasar penemuan arkeologi, misalnya, sarjana asing seperti Quaritsch Wales dan Bos⁶ telah memakai istilah "local genius" untuk sifat bangsa kita itu.

Memang telah dapat ditunjukkan secara nyata, betapa bangsa kita di masa lampau menerima pengaruh dari luar dengan kebebasan pribadi yang mandiri. Dalam disertasi Edi Sedyawati⁷ misalnya, kreativitas seniman patung Jawa berbicara jelas dalam pematungan kedewaan sekalipun, sedangkan menurut peraturan agama Hindu di India, pematungan kedewaan ketat sekali patokannya. Namun demikian, dalam hal pembangunan tempat pemujaan sudah sejak awal disadari kebebasan bangsa kita.⁸ Candi Borobudur dalam hal ini berupa contoh kongkret paling menonjol yang terkenal di seluruh dunia. Borobudur adalah bangunan unik untuk dunia, walaupun tetap diakui, bahwa suasana keagamaan adalah Buddhisme, yang berasal dari Benua India.

Justru karena kenyataan "local genius" itu, maka sangat penting untuk mempelajari ungkapan kebebasan watak dan kreativitas pribadi bangsa In-

⁶Dibahas mendalam oleh F.D.K. Bosch, *Het Vraagstuk van de Hindoe-kolonisatie van de Archipel*, Leiden, 1964.

⁷1985, dalam promosi cum laude Edi Sedyawati membicarakan dan membandingkan pematungan Ganesha.

⁸R. Goris, *Bijdragen tot de Kennis der Oud-Javaansche en Balineesche Theologie*, Leiden, 1926, hal. 69 dst., menyebutkan bahwa dalam arsitektur Jawa zaman Hindu terlihat perkembangan dari contoh India menjadi bangunan yang makin banyak menunjukkan unsur Jawa.

donesia. Warisan budaya bangsa dengan demikian mutlak perlu mendapat perhatian khusus, bukan untuk sekedar membangun kembali atau dengan tujuan pelestarian secara kering, melainkan terutama supaya dapat dipelajari dan dihayati makna "local genius" dan kedalaman bangsa sendiri.

Sebagai telah diuraikan di atas, justru kesadaran akan, dan rasa menyambung dengan kreativitas bangsa sendiri, akan mampu memberi rasa keaslian, kepribadian, yang menguntungkan hubungan dan pengenalan dengan kebudayaan lain. Hanya dengan rasa kepribadian yang kuat dan diyakini sepenuhnya, interaksi dengan kebudayaan lain akhirnya dapat terjadi tanpa frustrasi atau mengalami bahaya dilanda oleh masukan asing dengan akibat keaslian sendiri terkorbankan.

Hal itu penting juga, kiranya, dalam menghadapi segi lain dalam hubungan interaksi budaya, yang tampak kurang mendapat perhatian, yaitu peran kebudayaan kita sendiri dalam pengembangan peradaban global dunia.

Di atas telah disebutkan, bahwa setiap kebudayaan memiliki ciri-ciri khas di samping sifat-sifat universal, yang justru memungkinkan perkaitan antarbudaya dan menunjukkan pola tumpang-tindih serta nilai-nilai yang berlaku secara umum untuk keseluruhan umat manusia. Keadaan itu memang justru berupa bukti, bahwa kebudayaan berupa ciri khas manusia yang mutlak membedakannya dari kehidupan dan dunia hewan. Konsekuensinya ialah, bahwa pada dasarnya keseluruhan umat manusia ikutserta dalam membentuk dan memajukan wujud kebudayaan khas umat manusia itu dan membawanya ke arah peradaban dunia secara menyeluruh.

Namun demikian, dalam pada ini berupa kenyataan pula, bahwa dengan perkembangan teknologi mutakhir yang sangat berperan dalam memberi informasi dan mengadakan komunikasi yang kini didominasi oleh negara-negara maju, seakan-akan tampak proses "globalisasi" budaya yang cenderung memeratakan hanya beberapa segi dalam gaya hidup dan ungkapan budaya yang tertentu, yaitu yang berasal dari bangsa dan negara maju tersebut. Globalisasi yang terasa sepihak itulah, yang kini sangat dikhawatirkan akan dapat memusnahkan kepribadian bangsa-bangsa dari negara berkembang, karena mereka itu jauh ketinggalan dalam memberi informasi dan mengadakan komunikasi mengenai kebudayaan sendiri, dengan akibat sulit menangkal atau melunakkan pengaruh yang datang dari negara-negara maju itu.

Meskipun demikian, sejauh ini dunia secara menyeluruh masih jelas memperlihatkan keaneka-ragaman budaya yang luar biasa kayanya. Mungkin sebab utamanya ialah, bahwa semua bangsa di seluruh dunia kini benar-benar sadar akan kepentingan kepribadian budaya, "cultural identity," sendiri.

Tetapi, perlu diperhitungkan pula, bahwa baik secara terbatas dalam wilayah kecil, maupun secara global di seluruh bumi, sulit terjadi atau dapat diusahakan kesama-rupaan mutlak. Dunia memang akan menjadi kaku dan sulit berkembang, andaikata tidak ada perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh kekhasan masing-masing kebudayaan setempat dan yang sepanjang sejarah umat manusia justru dialami sebagai melahirkan pembaruan. Sifat aneka-ragam dunia itulah yang ternyata esensial untuk kemajuan umat manusia. Lewat kontak antarbudaya yang bermacam-macam itu lahir perubahan dan terjadi perkembangan akibat adaptasi, saling berpengaruh, saling meminjam dan memberi masukan. Kini sudah disadari, bahwa perkembangan adat manusia, yang relatif sangat cepat itu, harus dilihat sebagai terutama disebabkan oleh kemampuan umat manusia secara umum untuk saling meminjam unsur masing-masing kebudayaan, mengintegrasikan serta mengembangkannya di dalam kebudayaan sendiri, dan akibatnya mengalami kemajuan.

Dalam pada itu mesti disadari, bahwa semua kebudayaan, yang berasal dari semua bangsa yang hidup, pernah hidup dan akan hidup di bumi ini, pada hakikatnya memiliki potensi yang sama untuk ikut mengembangkan Peradaban Dunia.

Maka, dalam pengembangan Kebudayaan Nasional yang berarti mempertahankan dan mengembangkan kepribadian sendiri ke arah peradaban sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, perlu juga diadakan usaha untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi tentang Kebudayaan Nasional keluar kawasan sendiri. Bagi bangsa-bangsa berkembang memberi informasi budaya itu mempunyai keuntungan ke dua arah. Pertama-tama ada keuntungan kedalam: Usaha informasi menambah pengetahuan tentang kebudayaan sendiri serta dapat memperkuat kesadaran dan keyakinan akan identitas sendiri. Hal itu umumnya memupuk gairah untuk memperkuat identitas budaya sendiri pula. Keuntungan kedua mengarah keluar: Usaha memberi informasi dengan sendirinya berakibat memperkenalkan kebudayaan sendiri keluar batas-batas wilayah sendiri. Dengan demikian bangsa berkembang itu mau tak mau ikutserta dalam memberi sumbangan untuk perkembangan Peradaban Dunia.

Selanjutnya, dalam memberi dan sebaliknya menerima informasi budaya dari luar, pandangan mau tak mau akan meluas pula, sedangkan dengan mengadakan perbandingan antarbudaya yang, sebagaimana telah dialami dalam sejarah dunia, acapkali justru menguntungkan pengembangan kebudayaan sendiri, akan dapat dimajukan dan dikembangkan lebih lanjut lagi kebudayaan sendiri itu. Dengan demikian sumbangan dari pihak bangsa-bangsa, termasuk yang kini sedang berkembang, ikut serta secara positif dalam pengembangan Peradaban Dunia. Dalam Pendahuluan UUD 1945

secara jelas keikutsertaan bangsa Indonesia dalam perkembangan Peradaban Dunia digariskan.

Dengan sendirinya usaha informasi dan komunikasi keluar sulit dilaksanakan, apabila tidak dibarengi dengan penelitian dan pengembangan pengetahuan mendalam yang berkaitan dengan materi maupun sarana. Di samping perlu dikembangkan mutlak metodologi informasi dan komunikasi, mesti juga diadakan studi tentang sarana penyebaran supaya dapat terlaksana secara yang paling efektif dan efisien.

Dalam pada ini makin jelas, bahwa sikap terbuka, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir berupa syarat mutlak.

PENDIDIKAN DALAM HUBUNGAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN NASIONAL

Dalam arti paling luas pendidikan di satu pihak berupa upaya dan sarana untuk meneruskan nilai-nilai budaya dari generasi yang satu ke generasi berikutnya, dan di pihak lain berupa sarana komunikasi untuk kepentingan kehidupan kemasyarakatan. Dengan perkataan lain, pendidikan berupa upaya akulturasi di samping sosialisasi.

Demikianlah pendidikan penting, baik dalam pelestarian maupun sekaligus pula dalam pengembangan identitas budaya dalam hubungan kehidupan nasional. Dalam pada ini mesti digarisbawahi, bahwa identitas atau kepribadian budaya bukan berkaitan hanya dengan warisan budaya ataupun nilai-nilai tradisional, sekalipun unsur-unsur tradisional itu penting dalam pemantapan ciri-ciri khasnya. Namun, seperti juga kebudayaan, kepribadian atau identitas budaya bersifat dinamis dengan berkembang terus mengikuti perkembangan bangsa. Demikianlah pendidikan mesti berkaitan, baik dengan memantapkan kepribadian nasional sesuai dengan nilai-nilai yang telah dianggap relevan sepanjang zaman, di samping mesti melihat ke depan dan mengaitkan diri dengan sifat dinamis perkembangan kebudayaan maupun bangsa.

Hal itu berarti, bahwa dalam menghadapi pendidikan nasional yang mesti relevan untuk masa mendatang, harus diusahakan penggabungan secara berimbang dari nilai-nilai bangsa yang dianggap relevan itu dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi modern dan tuntutan kehidupan di masa kini dan masa mendatang.

Adapun usaha komunikasi dan sosialisasi lewat pendidikan tersebar luas sebagaimana terjadi di masa kini, terutama akibat penyebarluasan kemahiran

baca-tulis (literacy) secara menyeluruh yang terjadi karena ekspansi kebudayaan Barat lewat kolonisasi dan penguasaan bumi oleh bangsa-bangsa Barat itu. Sejarah menunjukkan, bahwa dalam kebudayaan-kebudayaan lama, betapa pun tinggi taraf yang telah dicapai, terdapat semacam konservatisme terhadap pendidikan, sehingga kemahiran baca-tulis dan penguasaan ilmu hanya terbatas pada elit tertentu. Demikian jelaslah, bahwa pendidikan lewat kemahiran baca-tulis sebagaimana yang kini terjadi di seluruh dunia, mesti diakui sebagai inovasi yang timbul akibat ekspansi dan gaya hidup Barat.

Di Indonesia pendidikan cara Barat itu dibawa masuk oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun sejak awal sudah mendapat kritik dari berbagai pihak. Ketrampilan intelektual yang tidak dibarengi dengan perkembangan mental-spiritual sesuai dengan kepribadian sendiri, apalagi dalam hubungan perubahan-perubahan sosio-kultural yang terjadi, terasa kurang menguntungkan bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang dijajah. Dari pihak pemerintah kolonial Belanda sendiri akhirnya juga diusahakan penyesuaian dengan keadaan sosio-budaya bangsa Indonesia, sedangkan dari pihak bangsa Indonesia jelaslah, bahwa Tamansiswa berupa contoh yang paling menonjol.

Pandangan Ki Hajar Dewantara pada dasarnya sejajar dengan pandangan yang masih berlaku sampai kini, yaitu bahwa pendidikan di Indonesia tidak bisa tidak mesti memperhitungkan latar-belakang sosial-budaya masyarakat Indonesia sendiri. Tujuan pendidikan disepakati untuk meningkatkan kesanggupan dan kesiapan intelektual, di samping memantapkan dan memperkuat identitas budaya nasional. Sebagaimana telah disebutkan di atas, penerimaan terhadap materi budaya baru sebagai masukan dari kebudayaan luar kawasan, termasuk juga ide-ide dan pengetahuan praktis mengenai teknologi dan ilmu pengetahuan modern, hanya dapat terlaksanakan secara baik, bila ada keyakinan mantap mengenai identitas pribadi. Pendidikan nasional dan pengembangan Kebudayaan Nasional bertujuan membentuk manusia Indonesia modern yang berkaitan erat dengan identitas budaya nasional sendiri, bukan perorangan yang merasa diri lepas akar dari masyarakat dan lingkungan hidup sendiri.

Kiranya jelas, bahwa hasil penelitian yang diadakan sehubungan dengan pengembangan Kebudayaan Nasional relevan sekali dan perlu dimanfaatkan untuk penyusunan konsep maupun dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Dalam masyarakat majemuk seperti di Indonesia pendidikan mesti relevan dengan keadaan masyarakat itu. Dengan demikian kebijaksanaan dalam pengembangan Kebudayaan Nasional tidak dapat dilepaskan dari kebijaksanaan pendidikan nasional secara menyeluruh.

Suatu Visi Baru mengenai Tata Masyarakat*

Hugh KAY

Menyusul pudarnya sistem-sistem ekonomi feodal dan kapitalis, dunia harus berpikir dan berusaha lagi untuk menemukan cara *memadukan kebebasan dan persatuan*. Satu cara ialah samasekali menolak dogma, baik Marxis maupun Kristen, dan mencari kebenaran secara anarkis lewat *revolusi*. Cara lain ialah mencari *humanisme teosentris*, atau suatu anthropologi ketuhanan, yang tidak berkisar pada *sacrum imperium* atau imperium suci, tetapi pada kebebasan orang-orang yang bersatu dalam Tuhan. Ini menuntut suatu organisme, tetapi suatu organisme yang memberikan lebih banyak tempat kepada *pluralisme* daripada tema persatuan Abad Pertengahan. Waktu itu pluralisme hanya berarti multiplisitas yurisdiksi dan suatu keaneka-ragaman hukum kebiasaan. Kini pluralisme harus berarti suatu *heterogenitas organik yang baru*: keaneka-ragaman kelompok-kelompok dan struktur-struktur sosial yang menjelmakan kebebasan-kebebasan positif. Masyarakat harus dianggap terdiri bukan saja atas orang-orang tetapi atas perkumpulan-perkumpulan khusus yang mereka bentuk dan setiap kelompok menikmati otonomi sebesar mungkin. Keaneka-ragaman adalah bagian dari struktur itu, bukan suatu infrastruktur sesuatu monolit. Asas pemersatu tidak akan terletak dalam persatuan iman tetapi dalam bidang di mana segala macam umat beriman dan umat tak beriman dapat menemukan suatu kepentingan bersama dalam kodrat manusia mereka.

Kecenderungan para theolog kini adalah *menyangkal* kemungkinan adanya sesuatu seperti *tata sosial Kristen* atau bahkan suatu *etika sosial Kristen*. Menurut suatu pendapat, masih terdapat alasan untuk menerima konsep *hukum kodrati* (natural law), asal orang melihatnya sebagai sesuatu

*Diambil dari Hugh Kay, *The Case for a Christian Co-operative Social Order* (London: Foreign Affairs Research Institute, 23/1979), oleh Kirdi DIPOYUDO.

dinamis dan bukan statis, suatu cara tingkah laku yang harus kita anut untuk hidup secara manusiawi dan konsisten dengan cara merancang kodrat kita. Penerapan asas-asas umum pada situasi-situasi khusus kehidupan kita adalah soal penemuan dan penglihatan tajam manusia, sekalipun diterangi tradisi Kristen dan dengan motif untuk meniru Kristus.

Mengenai pemerintahan, kristalisasi pandangan Kristen ialah bahwa tidak ada bentuk yang ditolak oleh ajaran Kristen asal dia *mengakui hak-hak asasi manusia*, dan konsisten dengan pandangan bahwa *manusia adalah pusat masyarakat*, bahwa *masyarakat harus mengabdikan pada martabat pribadi manusia*, dan bahwa *pribadi itu pada gilirannya berpusat pada Tuhan*.

Diakui bahwa adanya bermacam-macam keadaan dan tradisi menuntut peraturan yang berbeda-beda pula, dan bahwa sekalipun demokrasi merupakan konsep yang paling baik yang pernah disusun oleh manusia, sasaran-sasarannya bisa dicapai dengan bermacam-macam cara. Oleh sebab itu negara partai tunggal tidak mesti salah. Yang jelas ditolak oleh tradisi Kristen ialah suatu *bentuk totaliter pemerintah*, di mana pribadi manusia ditundukkan di bawah negara dan oleh sebab itu Gereja Katolik lama menolak konsep "sosialisme Kristen," yang menurut pemikir-pemikir Katolik adalah suatu kontradiksi dalam peristilahan. Tetapi timbul sejumlah masalah yang tak terbatas akibat berbagai arti sosialisme dan akibat perkembangan-perkembangan yang sangat jelas dalam ajaran sosial Katolik selama setengah abad yang lalu.

MENGENDALIKAN PASAR BEBAS

Sebelum membahas perkembangan-perkembangan itu secara terperinci, harus dikatakan sesuatu mengenai pendekatan tradisional terhadap *milik dan organisasi ekonomi*. Pada umumnya pandangan Kristen modern atau sikap Kristen yang dominan menerima gagasan *ekonomi campuran*, yang sebagian didasarkan atas pemilikan swasta dan kekuatan-kekuatan bebas di pasar terbuka, sebagian atas industri-industri milik negara, dan sebagian atas perundang-undangan yang dimaksud untuk menjamin agar kebebasan-kebebasan bisnis dilaksanakan secara adil. Dengan semakin kompleksnya kehidupan, kehidupan harus lebih diorganisasikan, dan seperti diakui oleh Paus Johannes XXIII, ini harus berarti banyak *meningkatnya intervensi negara*. Tetapi tindakan negara harus *dibatasi oleh asas subsidiaritas*, yaitu negara tidak boleh mengambil-alih fungsi-fungsi yang dapat dijalankan secara wajar oleh kelompok-kelompok bawahan dan orang-orang -- kecuali kalau kesejahteraan umum menuntutnya sebagai jalan terakhir. Fungsi primer hukum ialah memberi hati, mendorong, mengawasi dan mengkoordinasikan, bukan mengambil-alih. Dengan demikian pengawasan dan pemilikan negara

sampai batas-batas tertentu dibenarkan, dan dalam Ensikliknya *Populorum Progressio* Paus Paulus VI mengusulkan semacam *kekuasaan dunia* untuk melindungi negeri-negeri miskin yang dibutuhkan dunia untuk bahan mentah dan hasil-hasil primer. Tingkah pasar tidak dibolehkan merintangi harga-harga dasar yang adil yang dapat melindungi mereka terhadap kemiskinan yang mencekam. *Pasar bebas dapat dipertahankan tetapi harus diawasi atau dikendalikan.*

MARTABAT MANUSIA MEMBUTUHKAN MILIK PERORANGAN

Garis pemikiran ini mengemukakan bahwa *alternatif sosialis* untuk ekonomi campuran telah dicoba dan ternyata *gagal*. Monopoli negara tidak kurang tiranis daripada monopoli swasta, dan yang terakhir ini lebih mudah diawasi hukum. Milik pribadi adalah perlindungan orang terhadap negara yang rakus dan jaminan yang paling baik bagi keamanan keluarganya. Jaminan-jaminan bahwa hak-hak miliknya akan dilaksanakan secara yang menguntungkan masyarakat luas dapat ditemukan dalam *ramuan hukum dan etika perdagangan*. Kebanyakan negara sosialis telah menyimpang dari praktek sosialis yang ketat karena menemukan bahwa sosialisme hanya efektif sebagai tindakan ambulans: dia *dapat meringankan kemiskinan tetapi tidak bisa menciptakan keberlimpahan dan pertumbuhan*. Ekonomi campuran mempunyai kelemahan-kelemahannya, tetapi belum ditemukan suatu sarana alternatif untuk menciptakan kekayaan. Putusannya haruslah tidak menghapus milik perorangan, tetapi mengusahakan agar setiap orang mempunyainya. Dengan demikian milik perorangan dilihat sebagai *dasar martabat manusia* dan dikemukakan bahwa pelepasan milik oleh para rahim hanya dapat diterima karena sukarela; hal itu tidak dapat dipaksakan atas masyarakat sebagai keseluruhan.

Suatu jawaban langsung terhadap argumen-argumen itu ialah bahwa ekonomi campuran sering di luar kekuasaan hukum. Pemerintah-pemerintah bisa menerangkan bahwa mereka tidak dapat memajaki keuntungan yang menggembung terlalu berat karena ini akan menghambat investasi, dan tanpa investasi pertumbuhan tidaklah mungkin. Kalau demikian, haruskah ketidakadilan dibiarkan? Dapatkah suatu sistem yang mempunyai akibat-akibat serupa itu benar? Lagipula, mungkin benar bahwa manusia sering mencapai puncak kemampuannya dalam konteks persaingan, tetapi benarkah akan membahayakan hidup dan kesehatan banyak orang dengan menyerahkan kebutuhan-kebutuhan dasar mereka kepada kekuatan-kekuatan pasar kompetitif yang tak kenal ampun? Seorang bisnis Kristen kiranya akan menjawab bahwa kedua keberatan itu bisa dijawab kalau sistem ekonomi dibaharui, bukan dihapus, dan bahwa pembaharuan yang tepat berarti mencapai *perim-*

bangun yang tepat antara bisnis dengan kode serta etikanya dan beroperasinya negara lewat hukum. Terserah kepada bisnis itu sendiri untuk mengajar anggota-anggotanya agar menyesuaikan alasan-alasan mereka sehingga mereka, misalnya, puas dengan keuntungan dan tidak mengejar keuntungan yang paling besar.

Pendapat di gereja-gereja Kristen kini menjadi semakin *aneka-ragam* dan *kompleks* dan sikap-sikap yang cukup tegas dari masa di belakang kita sering dipersoalkan. Kesucian milik perorangan jelas tidak diajarkan oleh bapak-bapak Gereja, dan sementara orang akan mengatakan bahwa dia adalah ciptaan zaman modern yang memenjarakan Gereja untuk mendukung sistem kapitalis seperti dia muncul dari revolusi industri.

Dalam tradisi Kristen awal dikira bahwa *milik perorangan harus dibatasi pada minimum*, yang perlu untuk kelangsungan hidup manusia, dan bahwa kelebihannya harus diberikan sebagai derma. Kemudian tradisi berkembang untuk mengizinkan konsep keberlebian atau kemakmuran, yang tunduk pada kelepasan batin di mana pemilik harus bersedia merelakan miliknya bila itu perlu bagi pelaksanaan rencana Tuhan baginya. *Kerja*, yang dilihat sebagai suatu keharusan akibat dosa, mulai mendapat *arti panggilan*, biarpun orang masih percaya bahwa kemiskinan adalah lebih konsisten dengan hidup utama daripada kemakmuran. Perkembangan-perkembangan yang lebih baru mengisyaratkan bahwa *kerja dan milik terlibat dalam karya penebusan dan harus digunakan untuk transformasi tata sosial* dalam suatu proses *meletakkan fondasi Kerajaan Tuhan dalam sejarah*. Pemilikan harus dilihat sebagai kebenaran dan sebagai suatu hak yang tunduk pada hak tertinggi semua orang untuk menikmati hasil-hasil bumi dan suatu pembagian kekayaan yang adil.

KETEGANGAN KONSTRUKTIF

Pada generasi terakhir semakin banyak orang Kristen menerima bahwa sosialisme, paling tidak dalam bentuk non-totaliternya, sudah tidak perlu dilihat sebagai tak konsisten dengan cita-cita Kristen. Sementara orang Kristen menggambarkan diri mereka sebagai *Marxis Kristen*. Banyak orang tidak pergi sejauh itu tetapi membedakan antara sosialisme negara, yang berarti dominasi ekonomi oleh negara, dan lain-lain bentuk pemilikan sosial, dan lebih menekankan masyarakat daripada negara. Ketegangan dasarnya ialah antara *sistem integrasi* dan *sistem paksaan*. Paus-paus modern misalnya sangat menekankan konsep integrasi dan persatuan. Mereka menganjurkan suatu kebijaksanaan yang menyamakan keadilan dengan perdamaian, dan berusaha mencari keadilan *lebih lewat pembaharuan daripada lewat revolusi struktur-struktur sosio-ekonomi*. Kini sementara pemikir Katolik mengatakan

bahwa konsep ini kurang memperhatikan *unsur-unsur sistem paksaan* yang bisa membantu dalam usaha mencari tata sosial yang tepat. Mereka akan melihat kekerasan hanya sebagai jalan terakhir dan tidak akan mengikuti suatu perintah Marxis untuk merangsang suatu konflik yang akan meledak menjadi suatu revolusi total dari struktur-struktur sosial yang ada, tetapi mereka yakin akan *perlunya suatu perubahan struktural radikal* yang dilancarkan oleh ketegangan konstruktif. Secara demikian sistem, yang disebut *teologi pembebasan, menyucikan perjuangan perubahan radikal*, karena sadar bahwa usaha persatuan dan suatu pembagian adil kekayaan lewat tata sosial yang ada di Barat tidak berhasil, bahkan dalam masyarakat-masyarakat yang secara teoretis Kristen. Untuk mencapai suatu pembaharuan sosial sejati tanpa pemaksaan sarana-sarana totaliter, maka diajukan argumen bahwa perubahan itu harus dirangsang, tidak dengan serangkaian ajaran sosial yang dipaksakan dari atas bahkan oleh Gereja, tetapi *lewat perubahan-perubahan struktural* yang dikembangkan dan diorganisasikan *oleh rakyat* itu sendiri pada tingkat bawah. Konsep ini mengejawantah dalam ribuan "*komunitas dasar*" yang kini muncul di Amerika Selatan, di mana umat-umat Kristen setempat memusatkan kehidupan sosial dan ekonomi mereka pada Ekaristi dan suatu *aksi ekonomi koperasi*, bukan kolektif.

Banyak orang melihat komunitas-komunitas dasar itu sebagai semacam Gereja alternatif, tetapi di banyak tempat komunitas-komunitas itu mendapat dukungan kuat dari pimpinan Gereja. Yang jelas ialah bahwa mereka dapat diceraikan dari Gereja dengan mudah, kalau Gereja itu tetap lebih menekankan penyesuaian ajaran daripada tindakan positif untuk keadilan di mana kelompok-kelompok Kristen mengembangkan ajaran baru sambil berjalan. Keinginan untuk mempertahankan struktur-struktur yang ada dalam suatu bentuk yang diperbaiki dapat dibela, tetapi perdamaian dan persatuan yang di belakangnya hanya akan menyembunyikan ketegangan yang dengan kedok keterhormatan terus merusak dan meracuni.

KOPERASI PRODUSEN

Akar semuanya itu adalah kesadaran bahwa kita biasanya hidup dalam suatu *masyarakat pasif* di mana keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi hidup kita sebagian besar diambil di atas kepala kita, bahkan dalam negara-negara demokrasi. Meningkatnya permintaan, bahkan di negeri-negeri industri Barat yang makmur, akan partisipasi oleh kaum buruh dalam pemilikan dan pengelolaan perusahaan-perusahaan yang mengerjakan mereka mengungkapkan suatu kesadaran yang meningkat bahwa suatu masyarakat pasif, khususnya sesudah generasi-generasi pendidikan umum, *sangat tidak konsisten dengan cita-cita martabat manusia*. Boleh jadi konsep

yang kiranya akan menyatukan semua aliran pemikiran Kristen dan humanis yang kacau dan beraneka-ragam itu dalam perjuangan tata sosial yang adil adalah suatu *konsep lama* yang tidak gagal karena belum dicoba secara penuh.

Ide *koperasi produsen* itu adalah setua Reduksi-reduksi Paraguay pada abad ke-17 dan 200 tahun kemudian orang-orang Kristen di Eropa berusaha mengembangkannya melawan meningkatnya Marxisme. Ide itu menawarkan lebih banyak daripada formula Marxis. Dia mengakui hak perorangan untuk menjadi pemilik dan ikut mengambil keputusan, tetapi hak-hak itu harus dilaksanakan semata-mata dalam konteks suatu komunitas. *Segi pribadi dan segi sosial dipadukan di situ*. Idenya lebih kompleks daripada saingan Marxisnya dan mungkin kurang meyakinkan karena sejarah orang-orang Kristen dalam pembelaan suatu sistem kapitalis yang tidak adil menghambat kredibilitas yang diperlukan pemikir Kristen untuk mengembangkan suatu visi masyarakat yang baru dan dinamis. Dalam masyarakat industrial koperasi produsen sejati merana. Pada generasi kita, orang Kristen akhirnya menerima bahwa ketidakadilan tidak boleh dibiarkan sebagai suatu manifestasi Salib yang tak terhindarkan, tetapi bahwa *Kerajaan Tuhan harus dicari dari sejarah manusia* dan bahwa *pembangunan suatu masyarakat yang adil terletak di pusat kerjasama kreatif antara manusia dan Tuhan*.

Di banyak daerah pedesaan dunia berkembang, koperasi dengan inspirasi Kristen telah menghasilkan perbedaan antara kehidupan tak manusiawi dan kehidupan yang lumayan bagi masyarakat-masyarakat lokal yang kecil. Pengumpulan sumber-sumber daya kecil dalam suatu usaha komunitas telah meningkatkan produksi dua tiga kali lipat, dan memberikan bahkan kepada mereka yang terganggu kemampuannya dan yang dikucilkan suatu martabat baru karena sebagian besar pekerjaan itu adalah kerja mereka. Institute Coady di Antigonish bertahun-tahun melatih pemimpin-pemimpin komunitas dari banyak negara, kebanyakan miskin, untuk mengorganisasikan dan merangsang *koperasi dan serikat-serikat kredit*. Disesalkan bahwa pusat-pusat serupa itu jarang padahal gereja-gereja Kristen mampu mengembangkannya di semua negara tempat mereka bekerja.

KOPERASI INDUSTRI

Biasanya diajukan argumen bahwa asas sistem koperasi, biarpun dapat dilaksanakan di daerah-daerah terbelakang atau perikanan, tidak dapat dipindahkan ke daerah industri maju, jangankan ke perusahaan-perusahaan multinational yang besar. Akan tetapi pandangan itu kini kurang dianut dibanding dahulu, dan hampir seribu orang dari kalangan bisnis, serikat buruh, akademisi dan ahli koperasi dari banyak negara berkumpul di Roma pada bulan

Oktober tahun 1978 untuk mengadakan suatu *Kongres Sedunia Terbuka mengenai Koperasi Industri*. Kalau ada suatu katalisator bagi meningkatnya perhatian baru itu, dia adalah *eksperimen Mandragon* dekat Bilbao, Spanyol, yang asas "pekerja-pemilik"-nya disajikan secara panjang lebar dalam *The Times* dan kini diterbitkan oleh Anglo-German Foundation untuk studi masyarakat industri.

Dalam kompleks Mandragon seluruhnya terdapat 58 koperasi industri dan 18 koperasi pedesaan. Seluruh omzet tahunannya adalah £200 juta. Sekitar 13.000 orang dipekerjakan. Kelompok-kelompok konsumen mempunyai 50.000 anggota. Suatu satuan dalam kelompok, Ulgor, adalah produsen kompor, mesin cuci dan almari es yang terkemuka di Spanyol, dengan kontrak untuk membangun pabrik di Uni Soviet, Aljazair dan Meksiko. Koperasi lain, Danoblat, adalah produsen peralatan mesin yang terkemuka di Spanyol.

Perhatian internasional untuk Mandragon mulai meningkat pada tahun 1977 ketika banyak orang di Barat menjadi kecewa, bukan saja dengan *kapitalisme monopoli* dan *sosialisme*, tetapi juga dengan *mentalitas neo-korporatis*, yang bahkan melanda Pemerintah Buruh Inggris. Disadari bahwa pergeseran kekuatan tawar-menawar dari tingkat nasional ke tingkat pabrik dalam hubungan-hubungan industrial berjalan cukup baik dalam sektor swasta, tetapi tidak di sektor pemerintah, dan bahwa para pemogok tidak resmi dalam industri yang dikuasai negara, dengan keluhan-keluhan yang sah, cenderung untuk menganggap bahwa negara dapat dipaksa untuk turun ke neraka guna memenuhi tuntutan-tuntutan gaji tanpa memperhatikan kenyataan komersial. Adalah menyolok bahwa Ulgor, koperasi Mandragon yang terbesar, hanya mengalami satu kali pemogokan sejak dimulai pada tahun 1956.

Dalam sistem Mandragon *para pekerja adalah pemegang saham masing-masing*, tidak karena mereka membeli saham, tetapi semata-mata berdasarkan status mereka sebagai pekerja. Mereka *memilih suatu dewan pengawas* atas dasar satu orang satu suara. Dewan menyewa pejabat-pejabat tinggi, yang pada gilirannya menyewa pemimpin-pemimpin menengah. Suatu Dewan Kerja membicarakan upah, diferensial dan syarat-syarat kerja. Selain itu para pekerja yang bergabung dengan koperasi yang baru mulai dapat memperoleh saham dengan menyerahkan £2.000 masing-masing atau £1.000 dalam kasus suatu perusahaan yang telah beroperasi, dan adakalanya uang itu dapat dibayar dengan angsuran. Upah dibayar setiap bulan dan sisa keuntungan para pekerja ditambahkan sebagai kredit pada rekening modal mereka sampai mereka meninggalkan perusahaan atau pensiun, dan dapat menarik jumlah yang terkumpul itu. Sejauh mungkin semua perusahaan dibatasi sampai 400-500 pekerja masing-masing. *Semua pekerja mempunyai suara dalam pengelolaan koperasi garis depan* di mana mereka bekerja, dan koperasi-

koperasi ini mempunyai satu suara lewat wakil-wakil dalam koperasi-koperasi garis kedua yang menyediakan pendidikan, pelayanan-pelayanan sosial dan suatu bank pusat. Lewat 64 cabang bank ini menyalurkan tabungan-tabungan lokal di proyek-proyek investasi koperasi, dan deposito telah mencapai £100 juta. Lewat kontrak-kontrak asosiasi dengan koperasi-koperasi garis depan, bank menuntut dan bahkan menyediakan manajemen modern yang bermutu tinggi bagi perusahaan-perusahaan.

Sudah barang tentu dalam suatu koperasi terdapat banyak kemungkinan bagi ketegangan dan konflik konstruktif untuk mengadakan antaraksi dengan usaha untuk mencapai sepakat kata. Ini bukanlah suatu peraturan korporatif di mana kelompok-kelompok di puncak, yang katanya mewakili pemerintah, majikan dan buruh, mencapai suatu kompromi dan memaksakannya pada seluruh bangsa. Ciri suatu sistem seperti sistem Mandragon ialah bahwa *semua karyawan ikut bertanggung jawab dan ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan* secara yang bisa mempunyai implikasi-implikasi penting untuk masalah keadilan dunia yang lebih luas. Suatu bangsa orang-orang yang benar-benar memikul tanggung jawab akan kurang cenderung menyerahkan tugas menyelesaikan masalah-masalah dunia yang kurang beruntung kepada pemerintah-pemerintah. Daripada bersembunyi di belakang perundingan-perundingan UNCTAD atau Dialog Utara-Selatan yang tidak penting, yang semuanya terbentur pada keserakahan dan ambisi nasionalis. Mereka mungkin lebih bersedia untuk menggalakkan dan mendukung *kelompok-kelompok pasaran bersama* yang menolong dirinya sendiri di kawasan-kawasan berkembang. Perusahaan-perusahaan multinasional yang banyak dicaci-maki mempunyai kedudukan yang sangat baik untuk mendirikan koperasi-koperasi industrial di negeri-negeri berkembang tempat mereka beroperasi, untuk mendukungnya dengan teknologi dan training, untuk memberikan kepada mereka sarana-sarana guna mengembangkan dirinya sampai mereka bisa bersaing dengan industri Barat di pasar-pasar Barat itu sendiri.

Tidaklah cukup bagi industri Barat untuk membagi keuntungan secara wajar dengan negara-negara tuan rumah di mana filial-filial mereka beroperasi, atau untuk mencapai suatu perimbangan antara barang-barang yang dihasilkan di negara-negara itu untuk ekspor dan barang-barang yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lokal. Jelas mereka harus juga menolong negara-negara itu ke arah *martabae pengelola diri* dan untuk menjadikan industri lokal di situ suatu *fungsi pendidikan masif yang mengubah status pekerja lokal dari seorang sewaan menjadi peserta*. Koperasi pada prinsipnya menyajikan obat penawar (antidote) bagi suatu masyarakat di mana kebanyakan di antara kita, bahkan di negara-negara demokrasi, hanya mempunyai suatu peranan yang sangat kecil dalam keputusan-keputusan penting yang menentukan kehidupan kita.

Perang dan Negara Kesejahteraan di Inggris*

T.H. MARSHALL

Suatu perang total modern mempunyai akibat-akibat tertentu yang dapat diramalkan atas masalah-masalah sosial bangsa-bangsa yang berperang. Perang menyerap para penganggur, merangsang pelayanan-pelayanan kesehatan dalam segi-segi teknis maupun organisasinya, menciptakan kekurangan rumah dengan menghancurkannya atau mencegah pembangunannya atau keduanya. Dalam arti yang lebih umum perang total mewajibkan pemerintah-pemerintah untuk memikul tanggungjawab yang baru dan lebih berat bagi kesejahteraan rakyat mereka, khususnya dengan mengendalikan produksi dan distribusi kebutuhan-kebutuhan yang langka, seperti pangan dan bahan bakar, dan dengan menjaga mereka yang menjadi tuna wisma akibat invasi, evakuasi atau pemboman. Dengan demikian pengalaman perang total pasti mempunyai akibat atas asas-asas kebijaksanaan sosial dan cara-cara administrasi sosial. Tetapi hakikat akibat ini akan bergantung untuk sebagian besar pada hasil perang -- pada soal apakah suatu negeri diserbu atau tidak, apakah ia menang atau kalah, dan pada tingkat penghancuran fisik dan kekacauan sosial yang dideritanya.

Pengalaman Inggris dalam perang adalah unik. Ia adalah satu-satunya negara berdaulat yang bertempur sejak awal sampai akhir, menderita serangan-serangan atas wilayahnya tetapi bukan invasi, dan akhirnya muncul sebagai pemenang, tanpa menderita disorganisasi sosial atau politik. Keadaan ini menolong menerangkan mengapa konsep Negara Kesejahteraan untuk pertama kalinya mendapat bentuk di Inggris. Besarnya usaha perang dan kerawanannya terhadap serangan menuntut pengorbanan dari semua orang dan bantuan yang diberikan tanpa mengeluh dan tanpa diskriminasi kepada semua

*Diambil dari bab 6 buku T.H. Marshall, *Social Policy in the Twentieth Century* (London, 1970), hal. 74-87, oleh Kirdi DIPOYUDO.

orang yang membutuhkannya. Profesor Titmuss berkata: "Pengumpulan sumber-sumber daya nasional dan pengambilan resiko oleh semua orang tidak selalu praktis dan juga tidak selalu dilaksanakan, tetapi merupakan asas-asas pembimbing."¹ Dan stabilitas politik negara, bersama-sama dengan kepercayaan yang teguh akan kemenangan, menerangkan segi cerita yang paling menyolok, yaitu cara *rakyat dan pemerintah, di tengah-tengah perang, mulai menyusun pola masyarakat baru* yang akan lahir pada waktu perang berakhir. Ia adalah suatu masyarakat yang akan dipimpin oleh *asas-asas pengumpulan dan partisipasi yang sama* yang memimpin tindakan-tindakan darurat perang. Secara demikian gagasan Negara Kesejahteraan diidentifikasi dengan tujuan-tujuan perang suatu bangsa yang berjuang untuk kehidupannya. Tidak mengherankan bahwa di Inggris ia mempunyai suatu sinar kesucian (halo) yang tidak akan terdapat pada negara-negara lain pada waktu mereka memulai tugas pembangunan kembali masyarakat. Dan juga tidak mengherankan bahwa pada waktu ia diperiksa secara terinci dengan mata dingin, akal sehat, para pendukungnya yang lebih bersemangat mengenakan panster dan menyatakan suatu perang suci melawan para kritisinya.

Sejak dini pada tahun 1941 Kementerian Kesehatan mengumumkan sebagai "sasaran pemerintah segera mungkin sesudah perang" penciptaan suatu pelayanan rumah sakit yang menyeluruh yang terbuka untuk semua orang.² Pada tahun 1943 Dewan Pendidikan menerbitkan suatu laporan Dewan Penasihat Kaum Muda (Youth Advisory Council) yang dibentuk pada tahun 1942 dengan maksud itu mengenai "Pelayanan Kaum Muda sesudah Perang." Pada tahun 1944 Parlemen mengesahkan suatu *Undang-undang Pendidikan* yang dimaksud memberikan *persamaan kesempatan yang penuh kepada semua*, tanpa memandang pendapatan keluarga, dan Pemerintah Inggris menerbitkan *rencananya untuk suatu Dinas Kesehatan Nasional* (National Health Service). Tetapi usaha yang paling berani untuk menulis tujuan-tujuan perdamaian bangsa dalam arti suatu *tata sosial baru* adalah *Laporan Beveridge* tahun 1942. Lewat Eden, pemerintah telah mengikat dirinya dengan asas bahwa "jaminan sosial harus merupakan sasaran pertama kebijaksanaan dalam negeri kita sesudah perang,"³ dan menandakan akan menuangkan "jaminan sosial" dalam Piagam Atlantik. Dengan demikian Beveridge dibenarkan sepenuhnya untuk mengatakan pada akhir laporannya, bahwa "pernyataan suatu kebijaksanaan pembangunan kembali oleh suatu bangsa yang sedang berperang adalah pernyataan tentang penggunaan kemenangan yang dimaksud oleh bangsa, setelah dicapai kemenangan."⁴ Dan adalah

¹R.M. Titmuss, *Problems of Social Policy* (1950), hal. 507.

²*Ibid.*, hal. 540.

³A.G.B. Fisher, *Economic Progress and Social Security* (1945), 23.

⁴Laporan Beveridge, paragraf 459.

sebagai *cetak biru tata sosial* untuk negara berperang di mana laporan diterima dan dipuji.

Namun apabila membacanya, kita akan mengetahui bahwa pada pokoknya laporan itu, seperti pemerintah menghendaknya, adalah suatu analisa teknis *masalah-masalah dan metode-metode asuransi sosial*, dengan beberapa usul yang sering sangat drastis dan cerdik untuk *menyatukan seluruh sistem dan menjadikannya lebih sederhana dan lebih efisien*. Dalam segi-segi itu ia adalah suatu dokumen menarik yang mempunyai suatu akibat mendalam atas kebijaksanaan sosial bukan saja di Inggris melainkan juga di lain-lain negeri. Akan tetapi ini saja belum menerangkan himbauan luar biasanya pada rakyat. Dalam kenyataan dalam rencana asuransi sosial itu hanya terdapat satu inovasi yang penting, yaitu *perluasan program asuransi wajib untuk mencakup seluruh penduduk*. Tetapi sebab utama mengapa laporan itu disambut dengan entusiasmo adalah gambaran yang dibuatnya mengenai *seluruh program sosial* yang hanya untuk sebagian terdiri atas rencana Beveridge. Laporan mengungkapkan suatu ide besar dan suatu pola agung yang rupanya menyatakan *suatu revolusi sosial*. Dalam suatu bagian yang termashur dan sering dikutip, Beveridge menyatakan bahwa asuransi sosial sungguh-sungguh merupakan suatu serangan terhadap *kekurangan*. Tetapi kekurangan hanyalah *satu dari lima raksasa* di jalan rekonstruksi dan dalam banyak hal yang paling mudah diserang. Lain-lainnya adalah *penyakit, ketidaktahuan, kejembelan* dan *pengangguran*.⁵ Rencana Jaminan Sosialnya adalah suatu rencana untuk memberantas kekurangan, tetapi hanya dapat berhasil apabila raksasa-raksasa lainnya diserang pada waktu yang sama. Oleh sebab itu dia menyebutkan *tiga asumsi* yang mendasari usul-usulnya, yaitu bahwa akan disediakan tunjangan untuk anak-anak tanggungan, untuk pelayanan-pelayanan kesehatan dan rehabilitasi yang menyeluruh, dan untuk mempertahankan kesempatan kerja.⁶ Dan dia kiranya bisa menambahkan sehubungan dengan kedua raksasa ketidaktahuan dan kejembelan pendidikan dan perumahan untuk rakyat.

Apakah semuanya itu berarti suatu revolusi? Beveridge itu sendiri menjawab pertanyaan ini. Dia menulis: "Program yang diusulkan di sini dalam beberapa hal adalah suatu revolusi, tetapi dalam hal-hal yang lebih penting suatu perkembangan alamiah dari masa lampau. Ia adalah suatu revolusi Inggris."⁷ Ini benar. Karena apa yang kita lihat disini adalah *tahap terakhir* dalam proses yang dipaparkan dalam bab kedua buku ini, lewat mana perkembangan logis dan evolusi alamiah ide-ide dan institusi-institusi akhir-

⁵*Ibid.*, paragraf 8.

⁶*Ibid.*, hal. paragraf 14.

⁷*Ibid.*, paragraf 31.

nya membawa ke *transformasi sistem*. Transformasi atau revolusi itu berupa menghimpun tindakan-tindakan kebijaksanaan sosial menjadi satu keseluruhan yang untuk pertama kalinya mendapatkan suatu kepribadiannya sendiri dan suatu arti yang sejauh itu hanya samar-samar. Mulai digunakan istilah "Negara Kesejahteraan" (Welfare State) untuk menyebutkan entitas baru yang terdiri atas unsur-unsur lama itu. *Seluruh tanggungjawab akhir negara untuk kesejahteraan rakyat diakui secara lebih eksplisit* daripada sebelumnya, dan pilihan antara ketiga filsafat politik yang dipaparkan dalam bab kedua dijatuhkan dengan tegas. Pelayanan-pelayanan sosial tidak akan dianggap sebagai keharusan-keharusan yang disayangkan yang akan dipertahankan sampai sistem kapitalis dibaharui atau disosialiskan; *pelayanan-pelayanan sosial* itu merupakan *bagian sistem sosial yang permanen* dan bahkan mulia. Orang harus bangga atasnya, tidak untuk minta maaf. Akan tetapi bahkan di sini ada *reservasi-reservasinya*. Ketika Pemerintah Nasional mengajukan (1944) versinya dari rencana asuransi sosial Beveridge, ia mendahuluinya dengan suatu pernyataan yang memuat suatu peringatan halus. Menurut pernyataan ini, kebijaksanaan nasional harus ditujukan untuk mengamankan "kemakmuran dan kebahagiaan umum warganegara. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan itu harus ditempuh dua kelompok tindakan. Yang pertama adalah untuk *membina pertumbuhan kemampuan produksi dan pendapatan nasional*, dengan kesempatan-kesempatan yang menyertainya untuk meningkatkan kesejahteraan, waktu senggang dan rekreasi. Yang kedua ialah merencanakan *pencegahan kemiskinan perorangan* akibat resiko-resiko nasib pribadi yang di luar kemampuan orang-orang."⁸ Pemerintah sangat memikirkan untuk tidak menyebarluaskan gagasan bahwa asuransi sosial adalah ganti produktivitas, tetapi pada tahap ini hanya menunjuk pada asuransi sosial, dan bukan pada seluruh program Negara Kesejahteraan. Pendidikan dan kesehatan bisa lebih dianggap sebagai sumbangan untuk meningkatkan produktivitas daripada untuk mencegah kemiskinan.

Beveridge itu sendiri bertekad untuk *memperkuat bermacam-macam skema asuransi sosial itu*, membakukan keuntungan-keuntungan secara tepat, dan menambah benefit atau pembayaran baru perlunya untuk menutup segala biaya kebutuhan akibat kehilangan pendapatan, atau insidensi tuntutan-tuntutan luar biasa atas pendapatan, seperti akibat perkawinan atau kematian. Dia mengusulkan untuk memasukkan Kompensasi Buruh (Workmen's Compensation atau Industrial Injury) ke dalam jangkauan asuransi sosial sehingga kompensasi itu dapat diterima sebagai suatu pembayaran (benefit), bukan sesuatu yang harus dituntut dari majikan, jika perlu di pengadilan. Ini dilakukan. Dia mengusulkan untuk mengubah pensiun hari tua menjadi pensiun habis masa kerja, yang hanya dapat dibayarkan kalau penuntutnya berhenti bekerja secara teratur. Mereka yang lebih senang bekerja terus dan

⁸*Social Insurance*, (1944), Bagian I, Cmd. 6550, paragraf 1.

menyumbang, sesudah usia minimum 65 untuk pria dan 60 untuk wanita akan menerima pensiun yang relatif lebih besar setelah mereka berhenti bekerja. Ini juga diterima. Kemudian dia mengusulkan untuk mengisi kedua kekosongan yang paling serius dalam benefit-benefit sebelum perang. Tunjangan orang-orang tanggungan hanya diberikan kepada janda dan penganggur mereka yang tidak bekerja, tidak kepada penarik pensiun dan orang sakit. Beveridge menandakan bahwa semua benefit harus mencakup semua anggota keluarga, kecuali kalau mereka mempunyai pencarian lain. Dan dia menginginkan agar suami-istri menerima "benefit gabungan" untuk tidak menghina istri dengan menyebutnya seorang tanggungan (dependent). Pemikiran khas ini diabaikan. Kedua, benefit-benefit pengangguran dibatasi pada jumlah maksimum minggu setiap tahun. Ia ingin membayarnya tanpa batas waktu, tetapi dengan syarat bahwa sesudah suatu periode tertentu orang yang menganggur harus mengikuti suatu latihan di pusat latihan. Usul yang berani ini, yang menunjukkan kepercayaan besar akan kemungkinan penempatan penuh (full employment), ditolak.

Dari pembayaran (benefit) baru yang diusulkan yang paling penting ialah *tunjangan-tunjangan anak-anak* (atau keluarga), yang mulai dengan anak kedua. Hal ini telah lama diperjuangkan secara sia-sia. Tunjangan-tunjangan-nya, biarpun bagian esensial dalam seluruh rencana, tidak akan diberikan sebagai suatu benefit asuransi, tetapi dibiayai dengan pajak-pajak. Dari enam benefit baru yang dianjurkan oleh Beveridge, hanya dua akhirnya diterima, yaitu *tunjangan-tunjangan melahirkan dan pemakaman*. Gagasannya untuk menambahkan tunjangan perkawinan, benefit untuk istri yang ditinggalkan, bantuan rumah tangga untuk ibu rumah tangga yang sakit, dan tunjangan latihan untuk mereka yang bekerja sendiri adalah terlalu cerdik atau terlalu rumit untuk mendapat dukungan politik. Bantuan rumah tangga memang terwujud, tetapi sebagai bagian pelayanan kesehatan lokal.

Yang menjadi pokok pemikiran kita di sini bukanlah perincian tetapi *asas-asas dasar* Laporan Beveridge, dan dalam hal ini penulisnya sangat eksplisit. Kita dapat membaginya menjadi *tiga kelompok*. Pertama, rencananya harus meliputi asuransi yang universal, wajib dan kontributoris. Kedua, iuran dan pembayaran harus sama untuk semua, dan benefitnya ditetapkan pada tingkat subsistensi. Dan ketiga, benefit-benefit statutoris harus dilengkapi dengan tabungan-tabungan sukarela, yang harus dirangsang dengan tindakan-tindakan positif. Ketiga asas ini saling terikat dan saling bergantung.

Jangkauan yang universal merupakan *inovasi yang paling berani* dalam rencana Beveridge. Namun dia tidak banyak bicara untuk membela penyimpangan dari praktek umum ini. Rupanya dia menganggap bahwa mengingat semangat zaman hal itu tak terhindarkan. Mungkin demikianlah halnya,

tetapi hal itu mempunyai pengecam-pengecamnya, dan di antara yang paling sengit dan efektif adalah ahli ekonomi H.D. Henderson. Dia menyatakan bahwa perluasan asuransi wajib ke kelas-kelas menengah kiranya tidak dapat berbuat sesuatu pun untuk memajukan sasaran Beveridge yang dinyatakan "untuk menghapus kekurangan." Cara logis untuk melakukannya adalah menemukan tempat kekurangan dan mengukurnya dan mengumpulkan serta mengeluarkan cukup uang untuk menguranginya.⁹

Akan tetapi Beveridge samasekali tidak mempertimbangkannya karena itu bukan asuransi. Ia mirip dengan sistem Selandia Baru, yang kemudian dilukiskan oleh salah seorang administratornya sebagai suatu sistem di mana "setiap warga negara akan menyumbang sesuai dengan kemampuannya, dan dari mana dia akan dapat menarik sesuai dengan kebutuhannya."¹⁰ Dan itu adalah bantuan pemerintah yang dibiayai dengan pajak. *Esensi asuransi* adalah *saling ketergantungan sumbangan dan benefit*, dan dia mengira bahwa asuransi kontributorislah yang diinginkan oleh rakyat Inggris. Mereka menginginkannya sebagai satu-satunya alternatif untuk "pemeriksaan pencarian" yang dibenci dalam periode antara kedua perang dunia. Oleh sebab itu maksudnya ialah "menjamin untuk segala waktu bagi semua orang suatu pendapatan subsistensi untuk diri mereka sendiri dan keluarga-keluarga mereka sebagai hak; yaitu tanpa bentuk pemeriksaan pencarian atau penelitian mengenai mata pencaharian mereka."¹¹

Dalam menekankan gagasan bahwa *benefit harus diberikan sebagai hak*, sudah barang tentu dia mengungkapkan dengan tepat tujuan sentral kebijaksanaan sosial Eropa sejak awal abad. Hal itu mendapat dukungan internasional pada tahun 1925 ketika suatu Konperensi ILO memutuskan bahwa jaminan sosial untuk kaum buruh "paling baik dicapai dengan suatu sistem asuransi sosial yang memberikan hak-hak yang dibatasi dengan jelas kepada para penerima."¹² Tetapi itu tidak berarti bahwa hak-hak ini dapat diadakan semata-mata dengan iuran-iuran. Beveridge sendiri mengajukan argumentasi dalam bukunya *Insurance for All and Everything*, bahwa asuransi hanyalah "pemikulan resiko secara kolektif," terlepas dari sumber dari mana dana asuransi diperoleh. Suatu sistem bukan lagi asuransi sosial hanya jika "penerimaan benefit bergantung pada kebijaksanaan instansi tertentu."¹³ Dan seorang anggota Parlemen Prancis maju selangkah lagi dan mengatakan bahwa asuransi sosial berbeda dengan asuransi komersial justru karena peker-

⁹H.D. Henderson, *The Inter-war Years* (1955), hal. 192-207.

¹⁰Bulletin of the International Social Security Association, Vol. XII (1959), No. 8-9.

¹¹Hansard (Lords), Vol. 182 (1953), kolom 675-676.

¹²Arnold Wilson dan G.S. Mackey, *Old Age Pensions* (1941), hal. 193.

¹³W.H. Beveridge, *Insurance for All and Everything* (1924), hal. 6-7.

ja dijamin bukan oleh iuran pribadi tetapi oleh masyarakat, yang memberinya hak-hak dan menjamin mereka dalam pencegahan, bantuan dan kompensasi terhadap kerugian akibat resiko-resiko sosial."¹⁴ Itulah soalnya; adalah *masyarakat yang memberikan hak-hak* dan ia bisa mengaitkannya dengan iuran atau tidak sesuka hatinya.

Tetapi sekalipun ia menegaskan watak kontraktual asuransi kontributoris, Beveridge mengakui dan menerangkan dengan jelas *perbedaan-perbedaan antara asuransi sosial dan lain-lain bentuk asuransi*. Dia mengatakan bahwa dalam asuransi sosial bisa ada suatu "pengumpulan resiko." Kita telah melihat bagaimana itu berlaku bagi penyakit dan pengangguran, di mana pada setiap kasus resiko-resiko yang sejenis tetapi berbeda tingkatnya ditutup dengan iuran-iuran yang sama. Dalam merancang suatu rencana komprehensif di mana *satu iuran pada satu kartu menutup segala manfaat*, dia memperluas "pengumpulan" itu ke seluruh bidang dan segala risiko berbagai jenis. Kedua, biarpun iuran-iuran harus dikaitkan dengan benefit-benefit, menurut dia kaitan itu bisa apa saja yang tampak atas dasar-dasar umum; ia tidak perlu didasarkan pada perhitungan notaris. Iuran-iuran itu harus "*cukup tinggi* untuk memberi orang yang diasuransikan, karena ia banyak menyumbang tanpa menunjuk pada pencarian, suatu klaim yang bisa dibenarkan untuk menerima benefit-benefit tanpa referensi pada pencarian."¹⁵ Tetapi tingkat iuran mana yang dimaksudnya tidak diketahui.

Juga ada alasan-alasan untuk mempersoalkan atau memperbaiki pembedaan tajam Beveridge antara suatu benefit yang diterima sebagai hak dan suatu benefit yang tunduk pada "pemeriksaan pencarian," atau "bergantung pada kebijaksanaan instansi tertentu." Karena "pemeriksaan pencarian," seperti digunakan dalam perang, sebetulnya tidak bijaksana. Benefit disesuaikan dengan pendapatan keluarga dengan suatu skala yang tetap; ada suatu pemeriksaan (yang tidak disenangi) tetapi tiada tempat untuk diskresi. Diskresi masuk apabila orang mulai meninjau kebutuhan. Pencarian dapat diukur dan diatur menurut suatu skala, tetapi kebutuhan-kebutuhan tidak, karena setiap kasus adalah unik. Suatu "pemeriksaan pencarian" merupakan suatu alat yang tepat untuk menetapkan apa yang harus dibayar seorang untuk suatu pelayanan, seperti suatu pendidikan universitas, tetapi tidak untuk menentukan apakah seseorang yang hampir "keserakat" harus menerima. Dalam kasus serupa itu ia mudah digunakan untuk menahan pemborosan dan menemukan sakit pura-pura. Yang sebenarnya dibutuhkan adalah suatu *pemeriksaan kebutuhan*, yang dalam arti yang paling luas adalah dasar setiap pelayanan kesejahteraan yang murah.

¹⁴J.L. Cohen, *Social Insurance Unified* (1924), hal. 23.

Asas Beveridge yang *kedua*, *asas tarif seragam dan tingkat subsistensi*, adalah juga sesuatu yang disenangi sedikit pemerintah seperti diketahuinya. Dia menulis: "Di kebanyakan negara lain benefit-benefit adalah prosentase upah/gaji dan oleh sebab itu berbeda dari orang ke orang."¹⁶ Di sini kita paling jelas melihat pengaruh filsafat politiknya, filsafat liberalisme abad-ke-20. Dia mengemukakan bahwa negara berhak untuk memaksa orang-orang menyumbang untuk biaya menjamin bagi mereka pendapatan minimum yang mutlak perlu untuk subsistensi. Di sini tiada tempat untuk preferensi-preferensi perorangan dalam pengeluaran. Tetapi "memberi lewat asuransi lebih daripada yang diperlukan untuk subsistensi adalah suatu campur tangan yang tidak perlu." Dia menamakannya "asas minimum nasional, di mana para warga negara hendaknya membelanjakan uang mereka secara bebas."¹⁷ Benefit-benefit subsistensi haruslah benefit-benefit tarif seragam, karena tingkat subsistensi, bagaimanapun diperhitungkan, adalah suatu kuantitas pendapatan yang mutlak, dan bukan relatif. Dan kalau asas asuransi kontributoris diterapkan, benefit-benefit tarif seragam berarti iuran-iuran tarif seragam pula. Sejauh diinginkan agar menyimpang dari asas ini dan memin-dahkan pendapatan dari yang kaya ke yang miskin, ini harus dilakukan lewat bagian seluruh biaya yang ditutup dengan hasil *perpajakan progresif*. Itulah sebabnya mengapa Beveridge lebih senang dengan *sistem tiga pihak* di mana majikan, karyawan dan pembayar pajak ikut menyumbang, dan memutuskan untuk meningkatkan bagian pembayar pajak.

Bagi Beveridge *subsistensi* adalah suatu kemajuan terhadap masa lampau dan sekaligus suatu pembatasan atas hari depan. Pada tahun-tahun antara kedua perang benefit-benefit tidak dimaksud untuk memberikan suatu pencarian, tetapi semata-mata suatu tambahan pada lain-lain sumber daya. Subsistensi dalam rencana Beveridge berarti suatu *pendapatan yang memadai*, bahkan kalau tiada pendapatan lain sama sekali. Dia membayangkan suatu pelayanan Bantuan Nasional, yang dikelola secara sentral, yang akan mengambil-alih fungsi-fungsi Poor Law lama sehubungan dengan bantuan keuangan di luar, tetapi adalah fundamental bagi rencananya bahwa tiada orang harus minta bantuan kepada Bantuan Nasional semata-mata karena benefit-benefit asuransi tidak memadai. Bantuan Nasional pada pokoknya akan memikirkan anomali-anomali, termasuk mereka yang karena salah mereka sendiri atau pun tidak memenuhi syarat untuk menerima benefit. Ia akan memberikan bantuan, yang terikat dengan pemeriksaan pencarian, dan "harus dirasa sebagai sesuatu yang kurang diinginkan daripada benefit asuransi; kalau tidak orang-orang yang diasuransikan tidak menerima sesuatu dari iuran-iuran mereka."¹⁸

¹⁵Laporan Beveridge, paragraf 288.

¹⁶*Ibid.*, Appendix F, paragraf 6.

¹⁷*Ibid.*, paragraf 294.

¹⁸*Ibid.*, paragraf 369.

Sistem serupa itu akan berjalan? Tingkat subsistensi Beveridge tampak seperti "*garis kemiskinan*" Rowntree, dan perhitungan-perhitungan atas mana yang pertama didasarkan banyak dipengaruhi perhitungan-perhitungan yang dibuat yang terakhir itu. Tetapi "*garis kemiskinan*" Rowntree adalah suatu alat riset sosial yang sesuai dengan definisi garis, dapat ada tanpa luas, *tingkat subsistensi adalah suatu konsep operasional yang harus memberikan suatu margin keamanan* dan sedikit ruang gerak dalam dunia yang berubah. Bila nilai uang terus menurun dan harga-harga naik secara gila dan tidak sama dari tempat ke tempat dan dari komoditi ke komoditi, *suatu benefit subsistensi yang universal tidak dapat berjalan*. Dan kalau benefit dinaikkan untuk semua di atas titik bahaya, iuran-iuran tarif seragam yang selaras dengan tingkat baru itu menjadi lebih tinggi daripada kemampuan membayar warga-warga masyarakat yang paling miskin. Adalah dengan alasan-alasan itu bahwa Pemerintah Nasional, dalam Kertas Putihnya September 1944, secara eksplisit *menolak* usul Beveridge. Dikatakan bahwa usul itu akan berarti mengikat benefit dengan biaya hidup, dan bermacam-macam benefit sesuai dengan kebutuhan masing-masing (yang bukan asuransi), atau menaikkan iuran-iuran ke tingkat yang terlalu tinggi.¹⁹ Sistem yang kemudian diajukan oleh Pemerintah Buruh adalah menuju subsistensi, tetapi gagal melakukannya, karena pemerintah semakin didorong untuk melengkapi benefit-benefit mereka yang tidak mempunyai mata pencaharian pribadi dengan tunjangan-tunjangan dari Bantuan Nasional. Untuk itu mereka dikecam oleh Beveridge di Majelis Tinggi, yang berseru kepadanya untuk menaikkan benefit-benefit atau menyatakan "*bahwa mereka secara formal melepaskan jaminan terhadap kekurangan tanpa suatu pemeriksaan pencarian dan menyatakan meninggalkan Laporan Beveridge dan kebijaksanaan tahun 1946.*"²⁰

Pada kesempatan itu Beveridge membela anak emasnya, dan hendaknya bisa dimaafkan bahwa dia *kurang memperhatikan kemungkinan-kemungkinan kekurangannya*. Tetapi apakah dia meramalkan kesulitan-kesulitan yang akan dijumpai ketika menjadikan subsistensi sebagai asas pembimbing rencananya? Dalam satu hal dia meramalkannya, karena dia membicarakannya secara panjang lebar. Itu adalah *soal sewa*. Sewa berbeda dari tempat ke tempat dan bisa merupakan bagian besar dalam anggaran-anggaran kecil. Dan tidaklah selalu mungkin mengurangi pengeluaran dengan pindah ke rumah yang lebih murah. Dapatkah suatu benefit subsistensi yang seragam menyerap item ini? Dalam kasus Bantuan Nasional ditemukan hal itu tidak mungkin, dan kemudian menyusul praktek menetapkan tunjangan standar di luar sewa, yang kemudian ditambahkan sebagai jumlah yang diperlukan untuk membayar sewa. Beveridge dengan seksama mempertimbangkan pengaturan-

¹⁹*Social Insurance*, Bagian I, paragraf 12-13.

²⁰Hansard (Lords), Vol. 182 (1953), kol. 677.

pengaturan serupa itu dan menolaknya sebagai tidak konsisten dengan asas-asas dasarnya. Seluruh sikapnya terhadap soal ini, dan terhadap masalah naiknya harga-harga, kini tampak picik. Mungkin dia mengantisipasi tindakan-tindakan yang lebih efektif untuk menghentikan inflasi daripada menghadapi kenyataan. Tidak diragukan dia banyak mengandalkan harapannya bahwa kebanyakan orang akan menambah benefit-benefit statutoris itu dengan *asuransi-asuransi sukarela*.

Dan ini membawa kita ke *asas pokoknya yang ketiga*, pentingnya memberikan tempat kepada *tabungan swasta*. Dia menginginkan langkah-langkah positif untuk menggalakkannya. Dia mengajukan dua usul, bukan sebagai bagian rencananya, tetapi sebagai sesuatu yang sangat diinginkan. Dia telah memutuskan melawan berlanjutnya penggunaan Approved Societies untuk mengoperasikan asuransi sakit sebagai agen-agen yang independen karena hal itu menghasilkan ketidaksamaan benefit. Tetapi dia menghendaknya sebagai saluran distribusi benefit-benefit standar statutoris, untuk memberinya kesempatan membujuk orang-orang agar mengambil *langkah-langkah tambahan secara sukarela*. Dalam usul ini dia tidak memasukkan Asuransi Industri yang dikelola secara komersial atau Collecting Societies karena seperti dikatakannya badan-badan itu dikelola untuk mencari keuntungan. Dan dia mengusulkan agar bisnis mereka diambil-alih oleh suatu Dewan Nasional yang mempunyai monopoli atas jenis bisnis ini berdasarkan undang-undang. Tetapi usul-usul ini ditolak.

Sebagai akibatnya *perimbangan rencana itu terganggu*. Beveridge menyebutkannya sebagai "mengkombinasikan tiga metode yang berbeda: asuransi sosial atau kebutuhan-kebutuhan dasar; Bantuan Nasional untuk kasus-kasus khusus; asuransi sukarela untuk menambah pendapatan dasar."²¹ Yang ketiga dari metode-metode itu dibiarkan mengurus dirinya sendiri, tetapi diambil tindakan untuk melembagakan yang kedua. Undang-undang tahun 1948, yang mendirikan Dewan Bantuan Nasional (National Assistance Board), mulai dengan kata-kata (telah dikutip sebelumnya) "undang-undang fakir miskin yang ada tidak lagi berlaku." Akhirnya diadakan keputusan dengan masa lampau, dan ia meliputi *dua inovasi penting* yang membedakan sistem Inggris dengan sistem-sistem lain. Pertama, bantuan keuangan digeser dari tarif-tarif ke pajak-pajak, artinya dari instansi-instansi lokal ke suatu badan nasional. Tradisi lama dunia Barat bahwa bantuan untuk fakir miskin adalah urusan tetangga-tetangga mereka diakhiri. Kedua, benefit-benefit keuangan sebagai akibatnya dipisahkan dari pelayanan-pelayanan pribadi, yang diserahkan kepada dewan-dewan lokal. Jalannya terbuka untuk pengembangan *pelayanan-pelayanan kesejahteraan modern, yang disediakan untuk semua orang yang membutuhkannya* dan bebas dari segala kesan amal atau noda

²¹Laporan Beveridge, paragraf 302.

pauperisme. Tetapi noda itu tetap melekat pada Dewan Bantuan Nasional. Akan berkatakah kita bahwa ia dikorbankan agar pelayanan-pelayanan kesejahteraan bisa lahir bebas dari dosa asal? Atau akan mungkinkah, kalau kedua dinas itu tetap bersama-sama, membersihkan keduanya? Tidak dapat diberikan jawaban yang tegas kepada pertanyaan-pertanyaan itu, tetapi pengalaman negara-negara Skandinavia mengisyaratkan bahwa yang kedua itu mungkin lebih mendekati kebenaran.

Sokoguru Negara Kesejahteraan yang kedua ialah Dinas Kesehatan Nasional (National Health Service). Ketika Pemerintah Buruh mengajukan rancangan undang-undang yang menjadi Undang-undang 1946, jurubicara-jurubicaranya menekankan kenyataan bahwa ia merupakan "hasil suatu usaha terpusat selama suatu periode yang lama," dan mencapai apa yang diperjuangkan orang-orang yang bertanggung jawab sejak sebelum perang. Ia juga bukan monopoli salah satu partai.²² Ini benar, tetapi tidak dapat terlalu ditekankan bahwa suatu Dinas Kesehatan Nasional adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dengan suatu sistem asuransi kesehatan. Survey yang dilakukan untuk Komisi Kerajaan 1924-1926 di empat belas negara lain menunjukkan bahwa perawatan kesehatan di semua negara itu diperlakukan sebagai suatu manfaat asuransi seperti halnya di Inggris. Kebanyakan dikelola oleh badan-badan lokal, yaitu perkumpulan-perkumpulan yang disahkan atau badan-badan statutoris semi otonom yang mewakili suatu tempat. Mereka berunding dengan dokter-dokter lokal dan mengadakan pengaturan-pengaturan dengan rumah-rumah sakit dan klinik-klinik setempat mengenai perawatan medis langganan-langganan mereka, yaitu keluarga-keluarga yang diasuransikan. Mereka berusaha mencakup sebanyak mungkin perawatan, dan umumnya menawarkan paling tidak beberapa di antaranya kepada orang-orang tanggungan. Para pasien biasanya harus membayar sebagian biaya perawatan yang mereka terima. Tetapi seperti telah kita lihat, sistem-sistem serupa ini tidak selalu berfungsi dengan lancar. Pergesekan sering timbul antara badan-badan lokal dan profesi kedokteran. Salah satu cara untuk menguranginya, yang terdapat secara luas di Jerman dan merupakan praktek umum di Prancis, adalah membiarkan pasien membayar dokter dan kemudian mengembalikan kepadanya bagian yang diwajibkan dari jumlah itu. Tetapi ini berarti mempertahankan transaksi keuangan langsung antara pasien dan dokter yang merupakan salah satu sasaran utama asuransi kesehatan nasional untuk dihapus. Kelemahan lain sistem asuransi kesehatan dengan basis lokal ialah bahwa ia tidak menjurus dan bahkan bisa menghambat. Pada penciptaan rencana-rencana menyeluruh untuk distribusi sumber-sumber daya dan pelayanan medis di seluruh negeri dan untuk pengembangan sistematisnya.

²²Hansard (Lords), Vol. 143 (1945-6), kol. 78.

Sistem Inggris sebelum perang adalah *suatu kompromi*. Praktek umum "dokter-dokter panel" memiliki watak suatu dinas nasional, dan dikatakan bahwa distribusi dokter dibandingkan dengan penduduk sangat diperbaiki maupun mutu pelayanan yang diberikan.²³ Tetapi tiada instansi lokal yang mengkoordinasi pelayanan-pelayanan medis; rumah-rumah sakit, praktek umum dan kesehatan masyarakat dikelola secara terpisah. Dan seperti di Eropa, pada prakteknya seluruh mekanismenya dihambat oleh tetek-bengek asuransi. Ini dapat digambarkan dengan beberapa kutipan serampangan dari suatu lukisan yang dibuat dalam perang: "Bagian dalam gedung Komite Asuransi adalah suatu sistem filing raksasa Setiap orang yang diasuransikan dimasukkan indeks menurut dokter maupun 'Approved Society'-nya Pergantian dokter memberikan banyak kesulitan kepada staf Sistemnya menderita karena dikaitkan dengan organisasi praktek umum yang usang di negeri ini.... Kesulitannya dengan Asuransi Kesehatan Nasional ialah bahwa ia tidak 'nasional.' Tekanan administrasi adalah pada kata 'asuransi.' Orang-orang sakit tidak dianggap sebagai warga negara tetapi sebagai orang yang diasuransikan."²⁴

Perjuangan untuk dinas kesehatan nasional berencana *diprალambangkan oleh dua laporan* yang diterbitkan antara kedua perang dunia. Yang pertama, yang disebut "*Laporan Dawson*," disiapkan oleh Dewan Konsultatif untuk memberikan nasihat kepada pemerintah. Ia mendekati soalnya dari sudut yang benar-benar praktis dan profesional, dan tidak dengan teori-teori yang dipikirkan sebelumnya mengenai asas-asas kebijaksanaan sosial. "Perubahan-perubahan yang kami nasihatkan," katanya, "menjadi perlu karena organisasi kedokteran telah menjadi tidak mencukupi, dan karena ia gagal mendatangkan keuntungan-keuntungan pengetahuan medis secara memadai ke dalam jangkauan rakyat."²⁵ Dokter umum dipotong dari fasilitas-fasilitas modern untuk diagnosa dan pengobatan dan dari kontak dengan para spesialis dan konsultan. Untuk memperbaiki keadaan ini laporan mengusulkan dibentuknya Pusat-pusat Kesehatan pada dua tingkat, tingkat lokal sebagai basis bagi dokter-dokter umum, dan tingkat regional untuk para spesialis. Yang terakhir ini kenyataannya akan merupakan rumah-rumah sakit mini. Rumah-rumah sakit swasta yang ada, yang mengalami banyak kesulitan, akan dibangun dan dijadikan suatu pelayanan umum di bawah pimpinan instansi-instansi kesehatan lokal. *Komisi Kerajaan tahun 1924-1926* melihat sebagian besar persoalan di bawah sinar yang sama, dan membayangkan suatu dinas kesehatan yang komprehensif. Mereka berkata: "Penyelesaian akhir akan terletak pada bentuk pemisahan samasekali dinas kesehatan dari sistem asuransi dan

²³Henry Brackenbury, *Patient and Doctor* (1935), hal. 149-150.

²⁴Joan S. Clarke, dalam W.A. Robson, Ed., *Social Security* (1945), hal. 92 dan 121-123.

²⁵Consultative Council on Medical and Allied Services, *First Interim Report*, Vol. XVII (1920), paragraf 3.

mengakuinya bersama-sama dengan segala kegiatan kesehatan umum yang lain sebagai suatu dinas yang harus dibiayai dari dana-dana umum pemerintah.”²⁶ Tetapi mereka mengira waktunya belum tiba. Sehubungan dengan meningkatnya beban pengeluaran pemerintah, ”negara bisa dibenarkan berpaling dari pemeriksaan kata hatinya untuk menjajaki keuangannya.”²⁷ Secara demikian tidak dilakukan sesuatu yang penting.

Perang menyingkirkan hambatan-hambatan itu, dan Laporan Beveridge meratakan jalan untuk tindakan. Adalah menarik untuk *membandingkan rencana yang diajukan oleh Pemerintah Nasional dengan Undang-undang yang disahkan di bawah Pemerintah Buruh*. Yang pertama membiarkan rumah-rumah sakit seperti adanya, tetapi menciptakan Instansi-instansi Gabungan (Joint Authorities), yang dibentuk dengan menggabungkan daerah-daerah pemerintah lokal yang berbatasan, untuk mengelola seluruh pelayanan lainnya. Maksudnya ialah memulihkan dan memadukan kembali praktek umum, dan menjadikannya tulang-punggung dinasny, yang dianjurkan oleh semua ahli pada masa antara kedua perang. Tetapi para dokter cemas. Mereka melihatnya sebagai langkah pertama untuk mengubahnya menjadi ”suatu dinas teknisi yang dikendalikan oleh kaum birokrat sentral dan oleh orang-orang lokal yang samasekali buta huruf dalam soal-soal medis.”²⁸ Aneurin Bevan, atas nama Pemerintah Buruh, *menjungkirbalikkannya*. Dia membiarkan para dokter umum seperti adanya, kecuali kenyataan bahwa Komite-komite Asuransi lama digantikan Dewan-dewan Eksekutif, yang separuh anggota-anggotanya terdiri atas profesi-profesi, dan dirancang sarana-sarana yang baru dan jauh lebih efektif untuk mengawasi distribusi praktek. Tetapi dia mengambil suatu langkah drastis untuk *menasionalisasi rumah-rumah sakit swasta* dan menempatkannya, dan rumah-rumah sakit kotapraja, di bawah dewan-dewan yang ditunjuknya dan bertanggungjawab kepadanya. Rumah-rumah sakit pendidikan masing-masing mempunyai badan pengurus langsung di bawah Menteri, sedangkan lain-lainnya dikelompokkan secara geografis di bawah Dewan-dewan Regional. Dan pada waktunya menjadi jelas bahwa *rumah-rumah sakit menjadi tulang-punggung dinasny*, sedangkan praktek umum berjalan dalam situasi kecewa terus-menerus dengan imbalannya maupun dengan syarat-syarat kerjanya. Seorang dokter umum yang optimis menulis pada tahun 1949, setelah melukiskan kesalahan-kesalahan dinas: ”Tata baru bisa mengubah ini. Penghubung antara pusat-pusat kesehatan di rumah-rumah sakit, gagasan rumah-rumah sakit praktek umum, meningkatnya perasaan bahwa tidak masuk akal melatih para mahasiswa dalam metode-metode modern dan kemudian menolak penggunaan metode-metode ini kepada mereka bila mereka berpraktek, kiranya akan segera meringankan tugas

²⁶Royal Commission on National Health Insurance, Vol. XIV (1926), hal. 138.

²⁷*Ibid.*, hal. 152.

²⁸Harry Ecksyein, *The English Health Service* (1959), hal. 142.

dokter dalam pengobatan secara luar biasa.”²⁹ Pada 1960-an orang-orang masih membicarakan bagaimana harapan ini bisa diwujudkan, tidak dibicarakan di sini.

Tetapi jasa besar Bevan adalah penciptaan *suatu dinas medis yang benar-benar universal dan bebas, yang dalam administrasinya samasekali terpisah dari aparat kontraktual asuransi* (biarpun menerima sebagian iuran-iurannya) dan menuju suatu standar pelayanan setinggi kemampuan sumber-sumber daya medis negara. Dia menulis: ”Bidang di mana klaim-klaim komersialisme perorangan secara langsung bentrok dengan gagasan-gagasan terhormat nilai-nilai sosial adalah bidang kesehatan.”³⁰ Dan dia bertekad bahwa tidak ada jejak komersialisme yang boleh masuk antara dokter dan pasien dalam dinas-nya. Dia kemudian menyetujui pembayaran satu shilling untuk setiap resep, tetapi ketika Pemerintah Buruh memulai pembayaran-pembayaran lain dia meletakkan jabatan, sambil mengatakan bahwa hal itu adalah ”awal penghancuran pelayanan-pelayanan sosial atas mana Partai Buruh sangat bangga dan yang memberikan kepemimpinan moral dunia kepada Inggris.”³¹

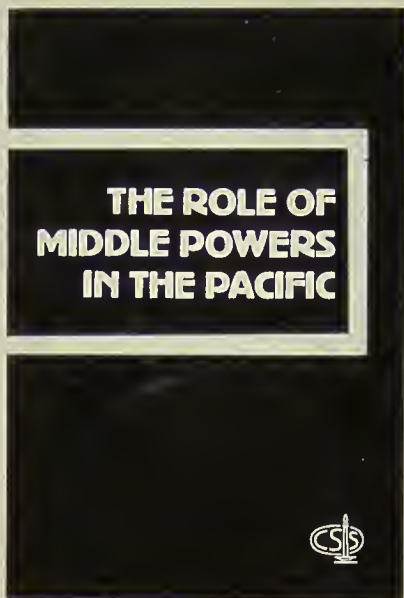
Ketiga sokoguru Negara Kesejahteraan Inggris adalah *Undang-undang Pendidikan, Undang-undang Asuransi Nasional, dan Undang-undang Dinas Kesehatan Nasional*. Sokoguru-sokoguru itu dikaitkan dengan nama-nama Butler, Beveridge dan Bevan -- seorang konservatif, seorang liberal dan seorang sosialis. Apabila diingat awal campuran kebijaksanaan sosial pada awal abad ini tidaklah mengherankan dapat menemukan bahwa Negara Kesejahteraan ketika lahir pada akhirnya, mempunyai orangtua campuran. Dan ketika ia ditinjau kembali pada dasawarsa berikutnya, kritisinya terdapat di ketiga partai itu. Sementara orang menyerang asas-asasnya, praktek-praktek-nya, dan yang lain lagi menuduhnya tidak menghayati cita-citanya sendiri. Adalah suatu kenyataan aneh bahwa tiada negeri yang menerima gagasan-gagasan dasar dan metode-metodenya di mana ia begitu kuat ditantang seperti di negeri kelahirannya. Ia bertahan terhadap serangan-serangan itu, dan kemudian menghadapi kritik dasawarsa 1960-an yang dipertimbangkan lebih mendalam dan lebih konstruktif. Pada waktu itu konsep Negara Kesejahteraan terdesak ke belakang, karena *tujuan-tujuan dan nilai-nilainya telah menjadi suatu bagian integral peradaban abad ke-20*, dan persoalan-persoalan berkisar pada sarana-sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan dan nilai-nilai itu di berbagai bidang di mana kebijaksanaan sosial diterapkan. Dalam artian ini semuanya itu bukan persoalan ideologi sosial tetapi manipulasi sosial, biarpun identitasnya sering digelapkan oleh sengitnya argumen yang terjadi di sekitarnya.

²⁹A. Massey, Ed., *Modern Trends in Public Health* (1949), hal. 130.

³⁰Aneurin Bevan, *In Place of Fear* (1952), hal. 73.

³¹Vincent Brome, *Aneurin Bevan* (1953), hal. 198.

Sudah Beredar



THE ROLE OF MIDDLE POWERS IN THE PACIFIC

1986, x + 193 hal., Rp. 3.500,00

- Pesatnya perkembangan hubungan kerjasama ekonomi maupun politik di kawasan Asia-Pasifik telah memberikan penekanan-penekanan baru pada politik luar negeri maupun hubungan dagang negara-negara kawasan ini.
- Buku ini memuat pembahasan mengenai peranan dari negara-negara besar serta negara-negara lainnya di kawasan, perkembangan kerjasama perdagangan, hubungan ASEAN dengan Indocina, ASEAN dengan Canada, serta peranan Indonesia di kawasan.

Dapatkan di toko-toko buku, atau pesan langsung (tambah ongkos kirim 15%) ke CSIS.



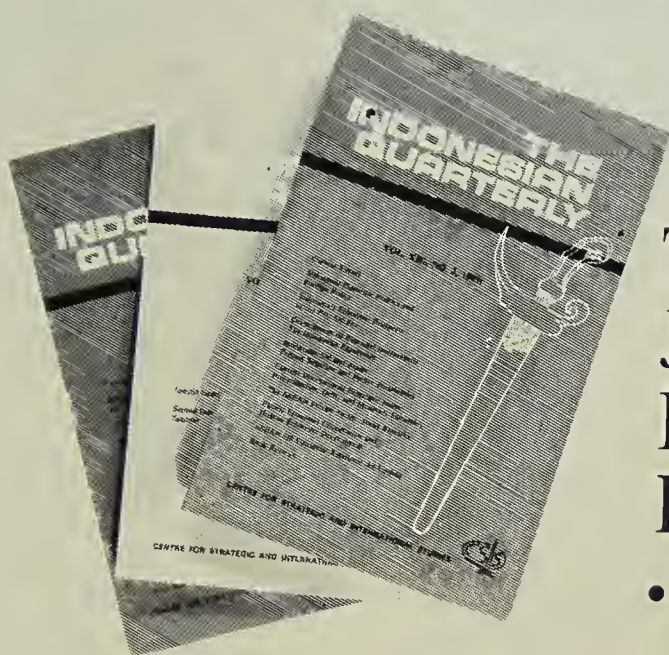
WAWANCARA DENGAN SAYUTI MELIK

1986, xiv + 382 hal., Rp. 7.000,00

"... PKI selalu berusaha menumpang kepemimpinan Bung Karno, maka saya ingin mengimbangi ulahnya itu dengan memberikan sumbangan pemikiran guna menjelaskan ajaran Soekarnoisme tadi supaya dapat dipahami oleh khalayak ramai secara benar, bukan mengikuti selera PKI." (hal. 120)

- Buku ini tidak saja memuat keterlibatan Sayuti Melik di dalam pergerakan perjuangan bangsanya, akan tetapi mengungkapkan pula sikap dan wawasan dasar yang dihayati oleh Sayuti Melik dan menjadi landasan perjuangan dan pergerakannya itu.
- Isi buku:
 - Bagian Pertama: Wawancara dengan Sayuti Melik
 - Bagian Kedua : Dua Tulisan Sayuti Melik
 1. "Sangkan Paraning Dumadi Pancasila"
 2. "Marxisme-Komunisme yang Menyesatkan di Indonesia"

The Indonesian Quarterly



The Outstanding Journal on Indonesian Problems

- The journal for scholars, diplomats, and journalists on Indonesian problems and related issues
- Keep you up-to-date
- Mostly by Indonesian writers
- Published since 1972 in January, April, July and October.

CSIS also publishes an Indonesian Journal ANALISA and books on socio-economic and international affairs:

- **Trends in Marketing,**
J. PANGLAYKIM.
- **Law in Indonesia,** *SOEBEKTI*
- **Golkar: Functional-Group Politics in Indonesia**
Julian M. BOILEAU
- **Pacific Economic Cooperation: The Next Phase,**
Hadi SOESASTRO and HAN Sung-joo (Eds.)



Centre for Strategic and International Studies
Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160.
Phone : 356532-35. Telex : 45164 CSIS IA.